

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN KINERJA



Tahun **2018**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 serta sesuai dengan dokumen APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dapat disusun berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Laporan Kinerja ini kami berupaya menyajikan laporan terhadap program-program yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan (RKPD 2019) serta strategi yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Penyusunan Laporan ini juga sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja yang disusun ini juga memiliki dua fungsi utama yaitu *Pertama* ; laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). *Kedua* ; laporan kinerja ini merupakan sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus-menerus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja terutama yang terkait aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang lalu.



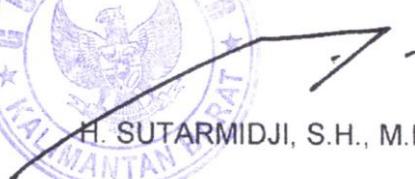
Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh Menpan dan RB atas evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018, telah dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 dengan tujuan agar setiap sasaran strategis terdapat indikator kinerja utama yang berkualitas *outcome* atau membawa dampak terhadap peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
2. Melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Perangkat Daerah.
3. Melakukan upaya peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain melalui penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT, semoga informasi kinerja dalam Laporan ini, dapat memberikan masukan yang berharga dan bermanfaat bagi internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik (*good local governance*).

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di Bumi Khatulistiwa Kalimantan Barat.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALBAR.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi dan Tupoksi	6
3. Sumber Daya Aparatur	8
4. Sumber Daya Keuangan	9
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RPJMD PROVINSI KALBAR	12
1. Visi	13
2. Misi	13
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	14
B. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	120
BAB IV PENUTUP	121
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	
Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018	
Pernyataan Telah di Reviu oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Pendahuluan

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemprov Kalbar

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun e-Kinerja (<http://ekinerja.kalbarprov.go.id>)



Gambar 1. Sistem Aplikasi e-Kinerja Prov. Kalbar

Dengan dikembangkannya aplikasi e-kinerja diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memantau dan memonitor terhadap progress setiap program yang mendukung sasaran strategis yang telah direncanakan dalam RKPD agar sesuai dengan target – target yang telah ditetapkan, sehingga capaian program tersebut dapat terealisasi dan terwujud serta membawa dampak bagi pelayanan dan pembangunan.

Tujuan diterapkannya Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas dan selaras serta sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:

1. Rencana Strategis
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan bagi arah pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.
2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun



- serta memuat rencana anggaran program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagai pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.
 4. Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
 5. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
Reviu merupakan langkah yang dilakukan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan hasil reviu tersebut berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

1.1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

1.1.1 Letak Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah

terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Batas-batas wilayah daerah provinsi Kalimantan Barat yaitu :

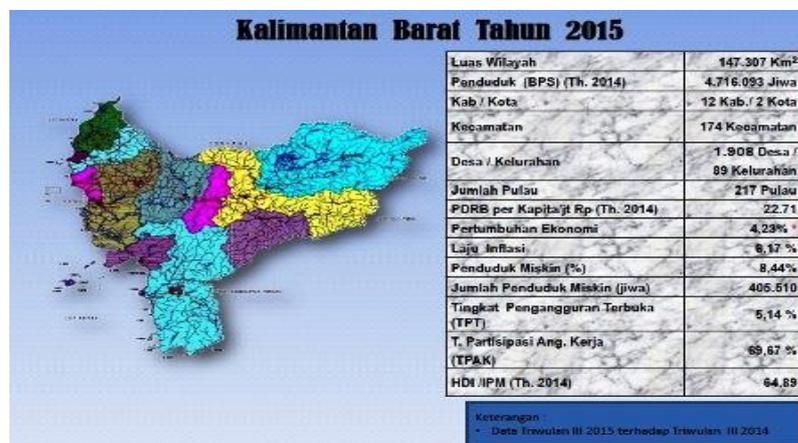
- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa dan Kalteng
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia yaitu; Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

1.1.2 Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

Dilihat dari luasnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah Irian Jaya (421.891 km²), Kalimantan Timur (202.440 km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 km²). Sedangkan luas wilayah Kalimantan Barat menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km² atau 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya.



1.1.3 Topografi

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut



Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove.

Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning) yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Kabupaten/Kota, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

1.1.4 Sungai dan Danau

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang dapat dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama di Kalimantan Barat yaitu Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya yaitu Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Landak (178 km).

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Danau yang ada hanya dua dan cukup berarti yaitu Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering apabila di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

1.1.5 Gunung-gunung

Wilayah Kalimantan Barat dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung yang ada relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibandingkan Gunung Semeru (Jatim,3.676 meter) atau Gunung Kerinci (Jambi, 3.805 meter).

Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu hanya menempati urutan tertinggi ketiga dengan ketinggian 1.767 meter. Sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter .



1.1.6 Pulau-pulau

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar disepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau, Sumatera.

Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kabupaten Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain yaitu Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kabupaten Mempawah. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

1.1.7 Penggunaan Tanah

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha. Sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %.

Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya terdapat sekitar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan **Perda Nomor 8 Tahun 2016** sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT :

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi 3 (tiga) asisten dan 9 (sembilan) Biro yaitu:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, serta Biro Pengelolaan Aset;
- c. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) membawahi Biro Organisasi, Biro Umum, serta Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

B. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

C. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat



D. DINAS DAERAH PROVINSI :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
19. Dinas Perkebunan
20. Dinas Kehutanan
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Satuan Polisi Pamong Praja

E. BADAN DAERAH PROVINSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Badan Penghubung
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

F. PERANGKAT DAERAH DALAM KETENTUAN PERALIHAN

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. RSUD Dr. Soedarso
3. Rumah Sakit Jiwa Provinsi
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong



3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah per 31 Desember 2018 sebanyak 10.845 orang. Jumlah Sumber Daya Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat

NO	PEM PROV/KAB/KOTA	JUMLAH PNS/CPNS		
		2016	2017	2018
1.	PEM PROV KALIMANTAN BARAT	6078	11263	10845
2.	KOTA PONTIANAK	6593	5407	5060
3.	KOTA SINGKAWANG	4194	3565	3405
4.	KAB. BENGKAYANG	4611	4273	4138
5.	KAB. KUBU RAYA	6032	5641	5442
6.	KAB. MEMPAWAH	4634	4116	3919
7.	KAB. SAMBAS	7283	6571	6767
8.	KAB. LANDAK	5004	4479	4238
9.	KAB. SANGGAU	6017	5438	5178
10.	KAB. SEKADAU	3277	3012	2899
11.	KAB. SINTANG	6387	6038	5828
12.	KAB. MELAWI	3783	3597	3497
13.	KAB. KAPUAS HULU	5703	5275	5063
14.	KAB. KETAPANG	6965	6721	6465
15.	KAB. KAYONG UTARA	2459	2229	2177
JUMLAH		79.020	77.625	74921

4. Sumber Daya Keuangan



Lampiran I : Peraturan Daerah Kalimantan Barat

Nomor :

Tanggal :

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RANCANGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018					
No	Uraian	Jumlah(Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	5.308.157.622.087,00	5.319.255.507.127,00	11.097.885.040,00	0,21
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.791.581.091.087,00	1.791.581.091.087,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.519.724.639.000,00	1.519.724.639.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	39.330.768.500,00	39.330.768.500,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	74.923.253.587,00	74.923.253.587,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	157.602.430.000,00	157.602.430.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.507.095.169.000,00	3.507.095.169.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	227.986.682.000,00	227.986.682.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.724.402.496.000,00	1.724.402.496.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.554.705.991.000,00	1.554.705.991.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.481.362.000,00	20.579.247.040,00	11.097.885.040,00	117,05
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.231.362.000,00	2.231.362.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	11.097.885.040,00	11.097.885.040,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.308.157.622.087,00	5.319.255.507.127,00	11.097.885.040,00	0,21
2	BELANJA DAERAH	5.432.287.622.087,00	5.443.385.507.127,00	11.097.885.040,00	0,20
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.978.800.625.682,00	3.229.130.681.137,71	250.330.055.455,71	8,40
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	901.727.235.998,00	1.140.937.156.517,71	239.209.920.519,71	26,53
2.1.4	BELANJA HIBAH	1.331.658.918.000,00	1.331.658.918.000,00	0,00	0,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	737.307.247.300,00	750.502.977.420,00	13.195.730.120,00	1,79
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ,	1.707.224.384,00	2.979.319.200,00	1.272.094.816,00	74,51
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	1.652.310.000,00	(3.347.690.000,00)	(66,95)
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.453.486.996.405,00	2.214.254.825.989,29	(239.232.170.415,71)	(9,75)
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	135.058.493.142,00	163.776.720.254,00	28.718.227.112,00	21,26
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.532.920.721.889,00	1.295.844.637.639,29	(237.076.084.249,71)	(15,47)
2.2.3	BELANJA MODAL	785.507.781.374,00	754.633.468.096,00	(30.874.313.278,00)	(3,93)
	JUMLAH BELANJA	5.432.287.622.087,00	5.443.385.507.127,00	11.097.885.040,00	0,20
	SURPLUS(DEFISIT)	(124.130.000.000,00)	(124.130.000.000,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	290.000.000.000,00	290.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	290.000.000.000,00	290.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	290.000.000.000,00	290.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	124.130.000.000,00	124.130.000.000,00	0,00	0,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Pontianak, 22 Februari 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Lampiran I : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rancangan Ringkasan Perubahan APBD TA 2018



B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Pembangunan daerah yang dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, dalam proses pembangunan masih terdapat kendala dan hambatan sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat belum dapat terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Selain itu, proses pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, permasalahan utama pembangunan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
2. Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri terutama akibat terbatasnya energi;
3. Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan Negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
4. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada dibawah rata-rata nasional;
5. Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
6. Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf internasional sebagai prasyarat untuk masuknya investasi;
7. Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;
8. Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
9. Daya dukung Kota Pontianak dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan, pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan semakin padatnya lalu lintas kota;
10. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
11. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
12. Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kehutanan masyarakat; dan
13. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Upaya yang dilakukan dalam peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD 2019 antara lain :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang inklusif (menyeluruh) dan berkeadilan. Kebijakan ekonomi makro Kalimantan Barat sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (*pro growth, pro job, dan pro poor*).
2. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan. Mengarahkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, adalah dengan mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, tidak semata-mata untuk mengambil untung jangka pendek tetapi lebih kepada tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya terhadap potensi lahan, hutan dan hasil tambang.
3. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran, meningkatkan investasi, serta mendorong kegiatan hilirisasi khususnya produk Unggulan Nasional (CPO dan Bauksit) dan diversifikasi produk ekspor.

Prospek Perekonomian Daerah Kalimantan Barat tahun 2018 ditargetkan untuk tumbuh dalam kisaran angka 5,26-5,94 persen (*year on year*). Sementara inflasi Kalbar pada tahun 2018 bergerak pada level yang masih terkendali. Demikian juga ekonomi global negara maju saat ini menuju pada tahap pemulihan ekonomi (*recovery*) termasuk negara berkembang seperti Tiongkok.

Tingginya kinerja ekspor, sektor informasi dan komunikasi di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat serta perekonomian masyarakat yang terus membaik, ditandai dengan meningkatnya indeks tendensi konsumen menjadi salah satu faktor utama pendorong bagi peningkatan perekonomian daerah Kalbar pada tahun 2018. Dengan momentum pertumbuhan yang cukup baik ini, diharapkan prospek beberapa sektor usaha seperti makanan dan minuman, perhotelan, restoran, pertambangan dan perkebunan diprediksi lebih cerah di tahun 2019. Oleh karena itu target perekonomian Kalimantan Barat diproyeksi tumbuh sebesar 5,34-5,49 persen pada 2019 dan angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Berdasarkan dari potensi dan kondisi wilayah Kalimantan Barat baik dari aspek geografi, demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan serta isu aktual yang berkembang, seperti perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, maka guna menyatukan komitmen para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat perlu ditentukan arah, kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan periode lima tahunan kedua dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan didalam RPJMD ini. RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 telah dilakukan perubahan pada tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan indeks program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun.

Masing-masing komponen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut :



1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Motto Pembangunan

Motto pembangunan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah PERSATUAN DAN DEMOKRASI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT. Persatuan adalah keyakinan bahwa rakyat Kalbar terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang bhineka atau beranekaragam, yang sudah bersatu sebagai elemen dan disatukan dalam satu ikatan yang sama dan tunggal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Persatuan rakyat Kalimantan Barat dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang absolut, namun persatuan tersebut diimplementasikan secara sehat, dinamis, dan konstruktif atas dasar persamaan hak dan kewajiban semua rakyat. Jadi, motto ini bermakna bahwa dengan semangat persatuan yang dilandasi oleh sistem demokrasi yang sehat, dinamis dan konstruktif akan dicapai kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan Barat. Pada akhirnya, daerah dan rakyat yang sejahtera juga akan membawa persatuan dan kesejahteraan bagi Negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berikut misi RPJMD 2013-2018 :

- a. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
- c. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
- d. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
- e. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan



pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.

- f. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
- g. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- h. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
- i. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
- j. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

3.1 Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai berikut:



Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
1	Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan	1	Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
				2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		2	Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan	1	Angka Usia Harapan Hidup
				2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
				3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
				4	Prevalensi Balita Gizi Buruk
				5	Prevalensi HIV pada Usia 15-24 Tahun
		3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan	1	Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA
				2	Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan	1	Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan	1	Angka Rata – Rata Lama Sekolah
				2	Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C
3	Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam	1	Melestarikan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1	Luas Penurunan Kerusakan Hutan
				2	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)
4	Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi	1	Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1	Jumlah Populasi Ternak
				2	Peningkatan produksi tanaman perkebunan
				3	Peningkatan produksi perikanan (ton)hasil kelautan dan perikanan
				4	Angka Produksi Tanaman Pangan
				5	Angka Produksi Tanaman Hortikultura
5	Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai	1	Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah	1	Peningkatan Nilai Investasi
		2	Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	1	Rasio Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja
				2	Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi
6	Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan	1	Meningkatkan daya saing daerah	1	Nilai Ekspor
				2	Nilai Transaksi Perdagangan
				3	Neraca Perdagangan
				4	Angka Inflasi



	koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya	2	Memfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1 2	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Berkualitas
7	Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata di Wilayah Pedalaman, Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	1 2 3 4 5 6	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (baik+sedang) Rumah tangga Pengguna Air Bersih Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi Persentase Perumahan Sehat Persentase Rumah yang Layak Huni Persentase Rumah Tanga yang menggunakan Listrik (RUPTL PLN 2012-2012)

3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN			SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
1 Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
	2	Indeks Pertumbuhan Gender (IPG)	2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesenjangan Gender	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2 Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	1	Angka Usia Harapan Hidup	4	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	1	Angka Usia Harapan Hidup
	2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup			2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
	3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup			3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
	4	Prevalensi Balita Gizi Buruk			4	Prevalensi Balita Gizi Buruk
5	Prevalensi HIV pada Usia 15-24 Tahun	5			Prevalensi HIV pada Usia 15-24 Tahun	
3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan	1	Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA	5	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	1	Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C			1	Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018

4	Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan	1 2	Angka Rata – Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C			2 3	Angka Rata – Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C
5	Melestarikan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1 2	Luas Penurunan Kerusakan Hutan Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	6	Berkurangnya Kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000/tahun	1	Luas Penurunan Kerusakan Hutan
				7	Menurunnya Laju Kerusakan Lingkungan	2	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)
6	Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1 2 3 4 5	Jumlah Populasi Ternak Peningkatan produksi tanaman perkebunan Peningkatan produksi perikanan (ton)hasil kelautan dan perikanan Angka Produksi Tanaman Pangan Angka Produksi Tanaman Hortikultura	8	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	1	Jumlah Populasi Ternak
				9	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	2	Peningkatan produksi tanaman perkebunan
				10	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	3	Peningkatan produksi perikanan (ton)hasil kelautan dan perikanan
				11	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	4 5	Angka Produksi Tanaman Pangan Angka Produksi Tanaman Hortikultura
7	Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah	1	Peningkatan Nilai Investasi	12	Peraturan yang mendukung iklim investasi	1	Peningkatan Nilai Investasi
8	Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	1 2	Rasio Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	13	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1 2	Rasio Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi
9	Meningkatkan daya saing daerah	1 2 3 4	Nilai Ekspor Nilai Transaksi Perdagangan Neraca Perdagangan Angka Inflasi	14	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	1 2 3	Nilai Ekspor Neraca Perdagangan Angka Inflasi
10	Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1 2	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Berkualitas	15	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	1 2	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Berkualitas
11	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi	1 2 3	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (baik+sedang) Rumah tangga Pengguna Air Bersih Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi	16	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (baik+sedang)



kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	4 5 6	Persentase Perumahan Sehat Persentase Rumah yang Layak Huni Persentase Rumah Tanga yang menggunakan Listrik (RUPTL PLN 2012-2012)	17	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1 2 3 4 5	Rumah tangga Pengguna Air Bersih Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi Persentase Perumahan Sehat Persentase Rumah yang Layak Huni Persentase Rumah Tanga yang menggunakan Listrik (RUPTL PLN 2012-2012)
--	-------------	---	----	--	-----------------------	---

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018, ditetapkan juga Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68 61
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4) Angka usia harapan hidup 5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 7) Prevalensi balita gizi buruk 8) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	69,3 220 21 <5% <0,5%
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	9) Angka Putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA	 0,50 0,68 0,92
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	10) Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C 11) Angka rata-rata lama sekolah 12) AngkaPartisipasiMurni (APM) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/Paket B c. SMA/SMK/MA/Paket C	 113% 98% 74,95% 7,48 tahun 99,65% 72,40% 57,50%
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	13) Luas penurunan kerusakan Hutan	1.000 Ha
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	14) Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.665



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	15) Jumlah Populasi Ternak	49.201.951 ekor
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	16) Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	726.696,00 ton
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	17) Jumlah Produksi Perikanan	276.477,96 ton
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	18) Angka Produksi Pertanian	
		• Tanaman Pangan	2.010.540 ton
		a) Padi	1.696.000 ton
		b) Jagung	120.700 ton
		c) Kedelai	2.360 ton
		d) Kacang Tanah	1.080 ton
		e) Kacang Hijau	1.300 ton
		f) Ubi Kayu	177.400 ton
		g) Ubi Jalar	11.700 ton
		• Tanaman Hortikultura	297.450 ton
		a) Buah-Buahan	230.100 ton
		b) Sayur-Sayuran	56.800 ton
		c) Biofarmaka	10.550 ton
		d) Tanaman Hias	475.900 kg/tangkai/pohon
19) Nilai Tukar Petani	102,95		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	20) Peningkatan Nilai Investasi	19,50 T
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	21) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,08
		22) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	23) Nilai ekspor	2.220,32 juta US \$
		24) Neraca Perdagangan	450 US \$
		25) Angka Inflasi	4,5
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	26) Persentase Koperasi Aktif	90%
		27) Persentase Koperasi Berkualitas	23 %
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	28) Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	84,58%
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	29) Rumah tangga pengguna air bersih	54,69 %
		30) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,52 %
		31) Persentase Perumahan Sehat	47,73 %
		32) Persentase Rumah yang layak huni	87,11 %
		33) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	86,4 %



Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas, diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam APBD tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang merupakan komitmen kinerja antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang	1.532 orang	151,68
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68	n/a	n/a
		3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61	n/a	n/a
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4) Angka usia harapan hidup	69,3	n/a	n/a
		5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	220	95	156,8
		6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	21	7	166,67
		7) Prevalensi balita gizi buruk	<5%	3,83	123,4
		8) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	<0,5%	0,31	138
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	9) Angka Putus Sekolah			
		a. SD/MI	0,50	0,19	162
		b. SMP/MTs	0,68	0,49	127,94
		c. SMA/MA	0,92	0,62	148,38



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	10) Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		a. SD/MI/Paket A	113%	112,12	100,78
		b. SMP/MTs/Paket B	98%	91,89	93,77
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	74,95%	71,10	95,32
		11) Angka rata-rata lama sekolah	7,48 tahun	7,63 tahun	102
		12) AngkaPartisipasiMurni (APM)			
		a. SD/MI/Paket A	99,65%	99,68	100,03
		b. SMP/MTs/Paket B	72,40%	75,52	104,31
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 10.000 Ha/tahun	13) Luas penurunan kerusakan Hutan	1.000 Ha	985,05 Ha	98,50
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	14) Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.665	1.564	362,21
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	15) Jumlah Populasi Ternak	49.201.951 ekor	66.574.718 ekor	135,31
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	16) Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	726.696,00 ton	2.043.680,00	171,94
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	17) Jumlah Produksi Perikanan	276.477,96	248.698,22	89,95
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	18) Angka Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan	2.010.540 ton	1.954.572 ton	97,22
		a) Padi	1.696.000 ton	1.625.356 ton	95,83
		b) Jagung	120.700 ton	166.825 ton	138,21
		c) Kedelai	2.360 ton	1.260 ton	53,39
		d) Kacang Tanah	1.080 ton	852 ton	78,89
e) Kacang Hijau	1.300 ton	1.260 ton	96,92		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
		f) Ubi Kayu	177.400 ton	147.475 ton	83,13
		g) Ubi Jalar	11.700 ton	11.544 ton	98,67
		• Tanaman Hortikultura	297.450 ton	463.783 ton	155,92
		a) Buah-Buahan	230.100 ton	338.326 ton	147,03
		b) Sayur-Sayuran	56.800 ton	112.659 ton	198,34
		c) Biofarmaka	10.550 ton	12.798 ton	121,31
		d) Tanaman Hias	475.900 kg/tangkai/pohon	540.834 ton kg/tangkai/pohon	113,64
		19) Nilai Tukar Petani	102,95	93,91	91,22
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	20) Peningkatan Nilai Investasi	19,50 T	13,18 T	67,59
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	21) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,08	0,95	87,96
		22) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK	65 KK	18,56
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	23) Nilai ekspor	2.220,32 juta US \$	1.006,96 Juta US\$	45,35
		24) Neraca Perdagangan	450 US \$	543,89 Juta US\$	120,86
		25) Angka Inflasi	4,5	3,99%	112,78
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	26) Persentase Koperasi Aktif	90%	60,17 %	66,85
		27) Persentase Koperasi Berkualitas	23 %	21,72 %	94,43
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	28) Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	84,58%	49,71%	58,77
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	29) Rumah tangga pengguna air bersih	54,69 %	55,20 %	101
		30) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,52 %	48,38 %	102
		31) Persentase Perumahan Sehat	47,73 %	44,31 %	92,83
		32) Persentase Rumah yang layak huni	87,11 %	89,59 %	102,84
		33) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	86,4 %	87,22 %	101



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang	1.532 orang	151,68 %

Indikator Sasaran Strategis Pembangunan urusan sosial dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 digambarkan melalui Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 1.532 orang. Angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 yaitu sebanyak 1.010 orang. Hal ini disebabkan adanya Pemulangan pekerja sosial ketempat asal sebanyak 2.205 orang, yang meliputi Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI M KPO) Luar Kalbar sebanyak 1.350 orang yang pemulangannya ditangani langsung oleh Kementerian Sosial RI. Sedangkan yang berasal dari Kalimantan Barat mencapai 855 orang dan dibebankan pada APBD Kalimantan Barat.

• Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SasaranStrategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.192.552.250	3.972.326.036	94,75	151,68 %	56,93

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,75% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 151,68%, maka pada sasaran ini terdapat Cost Cutting Program efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 56,93 %.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditunjang oleh program pemberdayaan sosial, pemberdayaan fakir miskin, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial. Program prioritas yang berpengaruh langsung atau berdampak terhadap pencapaian target untuk PMKS yaitu pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan kegiatan pemulangan, pendampingan korban tindak kekerasan pekerja migrant internal. Sementara untuk program lainnya tetap terlaksana sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 – 2018 dan target RPJMD

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target RPJMD Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
1.	Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.467 orang	2.065 orang	1.532 orang	1.010 orang	151,68

Pada Tahun 2018 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ditargetkan sebanyak 1.010 orang dan terealisasi sebanyak 1.532 orang dengan capaian kinerja sebesar 151,68 %. Sementara pada tahun 2017 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar terealisasi sebanyak 2.065 orang dengan capaian kinerja sebesar 204,46 %. Untuk tahun 2016 jumlah PMKS yang dilayani dan mendapatkan bantuan sebanyak 1.467 atau 76,44 % dari jumlah PMKS yang ditargetkan untuk mendapatkan bantuan.

Jika dibandingkan Tahun 2017, maka realisasi terhadap PMKS Tahun 2018 lebih rendah. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan jumlah Pemulangan PMKS ke tempat asal, dan menurunnya pendampingan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama 3 Tahun terakhir telah melaksanakan pemulangan PMKS sebagai berikut :

- a. Pemulangan ke Daerah asal Tahun 2016 sebanyak 2.584 orang meliputi :
WNI M KPO Luar Kalbar : 1.617 orang
Kalbar : 967 orang
- b. Pemulangan ke Daerah asal Tahun 2017 sebanyak 2.790 orang meliputi :
WNI M KPO Luar Kalbar : 1.605 orang
Kalbar : 1.185 orang
- c. Pemulangan ke Daerah asal Tahun 2018 sebanyak 2.205 orang meliputi :
WNI M KPO Luar Kalbar : 1.350 orang
Kalbar : 855 orang



Data pemulangan WNI-M KPO 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa yang berasal dari luar provinsi Kalbar sebanyak 59% dan 41% berasal dari Kabupaten/Kota se Kalbar. Daerah asal WNI-M KPO terbesar dari luar Kalbar meliputi Provinsi Jawa Timur, Sulawesi, NTB, Jawa Barat, NTT, Jawa Tengah dan Sumatera. Sedangkan dari wilayah Kalbar yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Kota Pontianak, Mempawah, Kota Singkawang dan Landak.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melebihi target yang ditetapkan tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani PMKS serta dukungan dari Kementerian Sosial.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Penanganan PMKS yang diberikan lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya tenaga kerja ilegal asal Indonesia yang di deportasi ke daerah asal.

Pemenuhan hak para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih dirasa belum optimal terutama terkait dengan Pelayanan Rehabilitas Sosial yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masyarakat sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Perlunya membangun kerjasama dengan stakeholder terkait, sosialisasi kepada masyarakat umum serta instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai dalam mendukung Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68	n/a	n/a
		2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61	n/a	n/a
Capaian Kinerja Sasaran 2					

Realisasi capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 belum dapat ditampilkan. Hal ini disebabkan data tentang IPG dan IDG Tahun 2018 belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Metodologi penghitungan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami perubahan, dimana Interpretasi angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak lagi dibandingkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdiri sendiri. Semakin besar angka IPG dan mendekati nilai 100 (seratus), maka capaian Pembangunan Gender semakin baik. Nilai 100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG jauh dari nilai 100, maka terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. IPG metode baru merupakan perbandingan rasio capaian IPM perempuan terhadap rasio capaian IPM Laki-laki.

Sebagai indeks komposit, IPG dan IDG memiliki komponen-komponen pembentuk yang menentukan yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, sumbangan pendapatan yang disajikan menurut jenis kelamin.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	Keadilan dan Kesetaraan Gender	527.372.600	509.689.980	96,65	n/a	n/a

Realisasi anggaran Tahun 2018 sebesar 96,65%, sementara realisasi capaian kinerja belum dapat disajikan sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat ditampilkan.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program Keadilan dan Kesetaraan Gender menjadi program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat dianggap telah berhasil dengan indikator diberikannya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh Presiden RI melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Gubernur Kalimantan Barat. Penghargaan ini diberikan setiap 2 (dua) tahun dan pada Tahun 2018 yang lalu, Provinsi Kalimantan Barat menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 – 2018 dan target RPJMD

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,77	86,28	n/a	68	n/a
		2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,37	64,46	n/a	61	n/a

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) setiap tahunnya mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2016 mencapai 85,77 dan pada Tahun 2017 Realisasinya mencapai 86,28. Sedangkan untuk Tahun 2018 capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum dapat ditampilkan, masih menunggu hasil rilis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong kapabilitas perempuan di segala bidang salah satunya melalui produk-produk hukum yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi. Selain itu, meningkatkan kemampuan dasar seperti pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan perempuan melalui program keadilan dan kesetaraan gender, juga memperjuangkan peningkatan jumlah peran perempuan dalam pembangunan.

Capaian pemberdayaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki merupakan hal yang umum terjadi dimanapun. Namun demikian upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, walaupun masih dirasakan belum maksimal khususnya dibidang politik dan ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan tidak mempunyai daya saing secara finansial, perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas



perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu berperan serta dalam berbagai bidang pembangunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Permasalahan mendasar yang terjadi selama ini dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah peran dan partisipasi perempuan yang masih dianggap rendah, sehingga terjadi kesenjangan gender antara partisipasi laki-laki dan perempuan bagi usaha meningkatkan kesejahteraan perempuan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan terutama bidang ekonomi dan politik, serta sosial budaya.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender, antara lain :

- Kesenjangan gender di bidang politik ; jika keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi, baik di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga akan sulit melahirkan kebijakan yang pro perempuan dan anak serta kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan. Jumlah perempuan di lembaga legislatif yang sedikit berkorelasi dengan keterpinggiran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari, seperti tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum responsif gender bahkan banyak kebijakan yang cenderung kurang melindungi dan menguntungkan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi sehari-hari sebagai akibat dari sedikitnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan di legislatif.
- Kesenjangan gender di bidang ekonomi ; dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses kaum hawa terhadap sumberdaya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Meskipun penghasilan pekerja perempuan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, namun perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Hal ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses dan manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan, antara lain ditandai oleh rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
- Masih adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :
 - a. Faktor budaya dan stereotipe yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi mengingat pada akhirnya akan mengurus rumah tangga.
 - b. Faktor ekonomi masyarakat yang belum memadai, sehingga masyarakat di usia sekolah harus membantu mencari nafkah
 - c. Jarak sekolah dengan tempat tinggal masih terlalu jauh sehingga masyarakat berpendapat adanya rasa tidak aman apabila anak perempuan atau laki-laki pergi ke sekolah.



- Kesenjangan gender di bidang kesehatan; terutama kesehatan reproduksi. Bidang ini tampaknya juga belum mendapat perhatian secara optimal mengingat proses reproduksi ini sangat panjang, mengandung, memelihara kandungan, hingga pasca kelahiran, dengan harapan anak-anak nantinya menjadi anak yang unggul dan generasi yang andal untuk bangsa.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Kesetaraan Gender Bidang Politik :
 - Menginspirasi dan menggerakkan keinginan serta memperkuat semangat perempuan untuk menjadi pelaku aktif dalam dunia politik.
 - Meningkatkan kesadaran politik perempuan tentang politik berbangsa dan bernegara.
 - Mendorong perempuan untuk aktif di partai politik.
 - Memperluas wawasan perempuan terhadap sistem dan partai politik.
 - Mempersiapkan mental perempuan untuk terjun ke dunia politik.
 - Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam dunia politik.
- Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi :
 - Mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa.
 - Menciptakan kondisi, suasana, iklim yang memungkinkan potensi perempuan untuk berkembang.
 - Menciptakan kemandirian perempuan, artinya perempuan diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut kelangsungan hidupnya.
 - Meningkatkan keahlian perempuan berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap kreatif dan aspirasi, yang rendahnya hal tersebut mengakibatkan banyak perempuan hidup dalam kemiskinan dan termarginalkan.
 - Meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, seperti bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya.
 - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia perempuan sebagai pelaku Industri Rumah Tangga dalam berbagai bidang dan skala usaha ekonomi sehingga mampu menjadi subyek pembangunan.
 - Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pengembangan dan penguatan aktivitas ekonomi produktif.
 - Memperkuat peran/posisi tawar (bargaining position) kaum perempuan dalam mengakses informasi, teknologi, sumber daya ekonomi, permodalan, perbankan, pemasaran dan pasar.



- Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan :
 - Akses Fasilitas pendidikan yang sulit dicapai dilakukan dengan mendekatkan fasilitas pendidikan terutama pendidikan tingkat SMP dan SMA,
 - Menciptakan/membuat rute aman dari rumah menuju ke sekolah.
 - Mengadakan sosialisasi atau penyadaran akan pentingnya pendidikan yang terus menerus kepada warga masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
 - Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun.
 - Memberikan pendidikan gratis bagi perempuan yang buta huruf melalui pendidikan informal/sanggar belajar.
- Kesetaraan Gender Bidang Kesehatan :
 - Mendekatkan fasilitas layanan kesehatan melalui puskesmas keliling/puskemas pembantu di desa/di dusun.
 - Mengaktifkan kembali pokja-pokja yang terlibat di dalam program/kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya mengenai kesehatan reproduksi.
 - Memberikan penyuluhan kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi
 - Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menikahkan anak-anak yang belum cukup umur/dewasa untuk mencegah kematian ibu maupun bayi karena belum sempurnanya alat reproduksi atau belum siapnya mental pasangan muda untuk menjadi orang tua.
 - Meningkatkan keterlibatan/peran laki-laki dalam menurunkan angka kematian ibu melalui kegiatan sosialisasi/seminar.
 - Memberikan pelayanan kesehatan secara gratis melalui dana-dana pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pemerintah perlu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan upaya-upaya pengurangan kesenjangan gender dalam pembangunan.
- Pengembangan strategi-strategi yang tepat untuk menjawab persoalan gender dengan mengembangkan model dan mendokumentasikan *best practices* upaya-upaya mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka usia harapan hidup	69,3	n/a	n/a
		2) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	220	95	156,8
		3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	21	7	166,67
		4) Prevalensi balita gizi buruk	<5%	3.83	123,4
		5) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	<0,5%	0.31	138
Capaian Kinerja Sasaran 3					116,97

Usia Harapan Hidup/*Life Expectancy*

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan Usia Harapan Hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, dan pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperpanjang usia harapan hidupnya.

Usia Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai usia x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas (ukuran jumlah kematian umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup saat ini adalah rata-rata hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah, harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang terjadinya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat serta turut berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

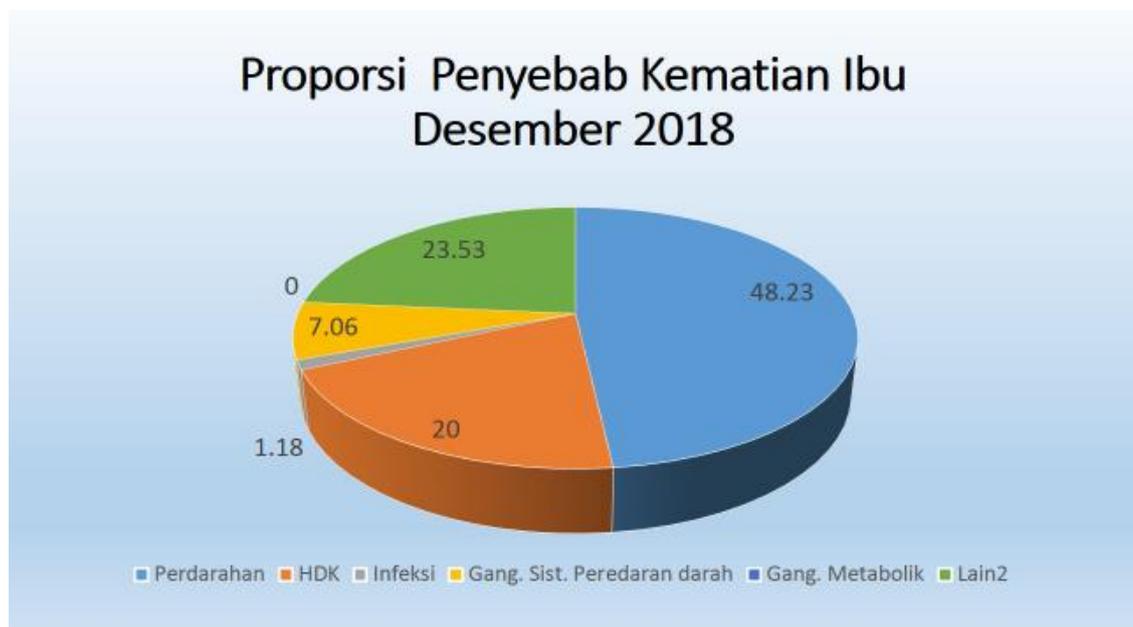
Data Usia Harapan Hidup Kalimantan Barat pada tahun 2018 masih belum dapat ditampilkan, karena disebabkan data tersebut belum di rilis oleh Badan Pusat Statistik.

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 Kelahiran Hidup.

Tahun 2018 angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jumlah kasus yang masuk dari kabupaten/kota berbanding jumlah Kelahiran Hidup sebesar 95 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini menunjukkan suatu perubahan yang lebih baik karena jauh dibawah target yang ditetapkan di tahun 2018 yakni 220 per 100.000 Kelahiran Hidup, sehingga melampaui target yaitu sebesar 156,8%.

Proporsi penyebab kematian ibu di provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa penyebab kematian ibu melahirkan yang terjadi di Kalimantan Barat Tahun 2018 dominan disebabkan karena kasus perdarahan sebanyak 41 kasus (48.23%), hipertensi dalam kehamilan sebanyak 16 kasus (20%), infeksi sebanyak 1 kasus (1.18%), gangguan sistem peredaran darah sebanyak 6 kasus (7.06%), gangguan metabolik sebanyak 0 kasus dan lain-lain sebanyak 22 kasus (23.53%).

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria dan empat terlalu yaitu terlalu muda < 20 tahun, terlalu tua > 35 tahun, terlalu dekat jaraknya ≤ 2 tahun dan terlalu banyak anaknya lebih dari 3 tahun.



Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif banyak namun belum tersebar secara merata diseluruh wilayah Kalimantan Barat, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, sarana prasarana masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial / Emergensi Komperhensif (RS PONEK) belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB.

Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang bagi peningkatan gizi ibu hamil, dan harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat segera bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar dari sisi penyebabnya, kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu pertama faktor **endogen** atau yang umum disebut dengan kematian neonatal yaitu kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang dapat diperoleh dari orangtuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan). Kedua; faktor **Eksogen** atau kematian post natal yaitu kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar.

Penyebab kematian pada kelompok perinatal umumnya disebabkan oleh *Intra Uterie Fetal Death* (IUFD) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Hal ini menunjukkan kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan kedepan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan serta menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi.

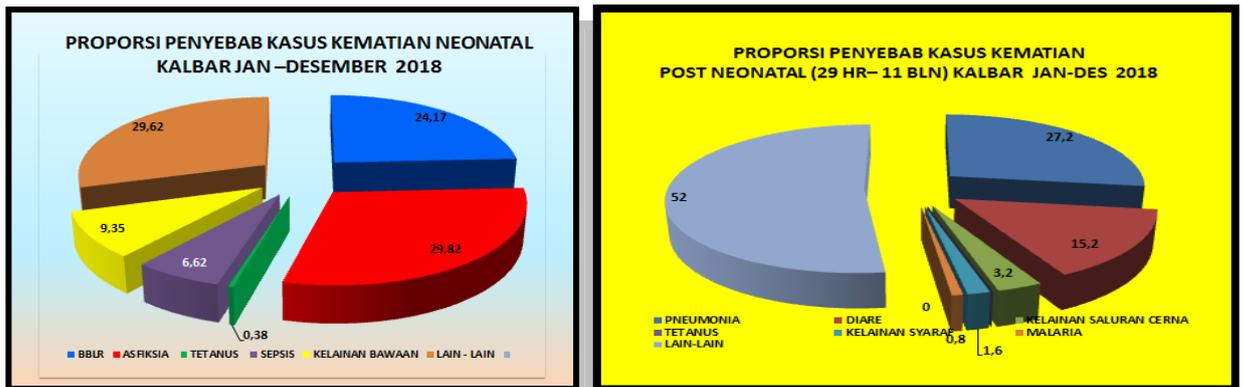
Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pneumonia dan diare. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dengan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yaitu mengarah pada program pelayanan kesehatan ibu hamil misalnya program pemberian pil besi (tablet Fe) dan suntikan anti tetanus. Sedangkan Angka Kematian Post Natal dan Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat digunaka untuk pengembangan program imunisasi serta program-program

pengecahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan terkait gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun.

Angka Kematian Bayi berdasarkan hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebesar 22,2 per 1.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2018 Angka Kematian Bayi (AKB) diprediksi sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup dari jumlah kematian bayi sebesar 637 kasus. Angka ini lebih rendah dari Angka Nasional yaitu 21.8 per 1.000 Kelahiran Hidup dan capaian tersebut sudah melampaui target SDGs yaitu 12 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Proporsi penyebab kematian bayi neonatal (0-28 hari) dan post neonatal di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

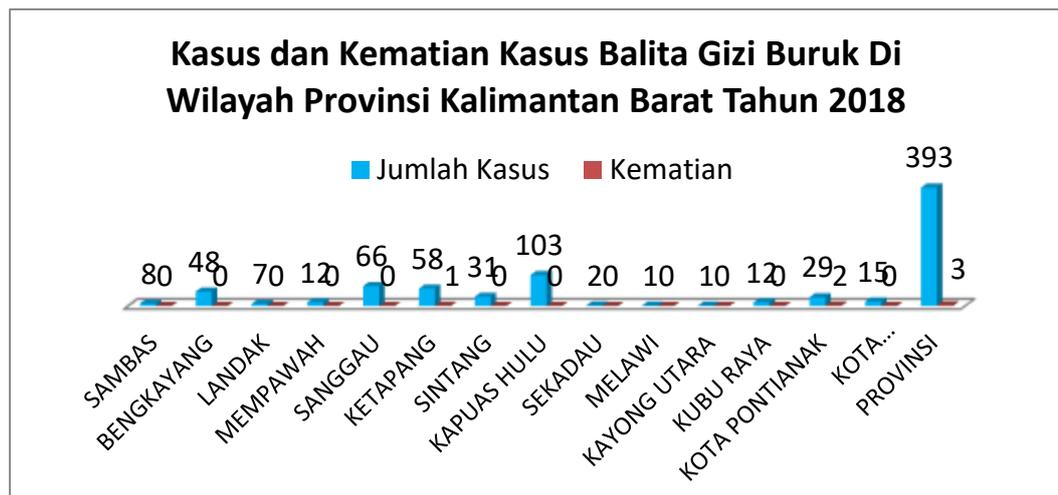


Sumber: Data Rutin Kesga Tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Asfiksia (29,82) masih menjadi masalah utama penyebab kematian neonatal (0-28 hari) kemudian diikuti dengan lain-lain (29,62), BBLR (24,17), Kelainan bawaan (9,35), sepsis (6,62) dan tetanus (0,38). Sedangkan masalah utama penyebab kematian neonatal (29hr-11 bulan) disebabkan oleh Pneumonia (27,2), Diare (15,2), Kelainan saluran cerna (3,2), kelainan syaraf (1,6) dan malaria (0,8).

Prevalensi Gizi buruk pada Balita

Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (3,83%) tidak melebihi target (< 5%). Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya adalah bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, wanita usia subur kurang Energi Kronik (KEK). Status gizi merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk menilai status indikator derajat kesehatan masyarakat. Gizi buruk adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umurnya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor. Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang tidak selalui diikuti dengan gejala sakit.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Kalimantan Barat adalah 393 kasus. Jumlah kasus tertinggi terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 103 kasus, Sanggau sebanyak 66 kasus dan Ketapang 58 kasus. Sedangkan Kabupaten dengan kasus gizi buruk terkecil yaitu Kabupaten Landak sebanyak 7 kasus dan Sambas 8 kasus.

Masalah gizi buruk kronis (*stunting*) yang dihadapi masyarakat saat ini semakin besar. Salah satu upaya penanganan untuk stunting yang telah dilakukan adalah pemantauan gizi pada daerah-daerah dengan jumlah stunting tinggi melalui pemetaan kembali daerah yang sudah baik, belum baik, dan mana yang butuh perhatian khusus. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir. Namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan menurunkan produktivitas. Stunting beresiko terjadi pada ibu hamil (bumil) yang mengalami anemia atau berkurangnya jumlah kandungan hemoglobin di dalam darah, karena stunting dipengaruhi sejak dalam kandungan, maka Dinas Kesehatan saat ini fokus pada seribu hari pertama kehidupan (HPK).

Pada Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat, Prevalensi Balita Gizi Buruk dapat ditekan sehingga capaian kerjanya melebihi dari yang ditetapkan yaitu sebesar 123,4%.

Capaian Indikator Prevalensi Kasus HIV pada Usia 15-24 tahun

Prevalensi kasus HIV pada usia 15-24 tahun di tahun 2018 ini ditargetkan <0,5% dan realisasi capaiannya 0,31%. Sehingga untuk capaian kerjanya mencapai 138%. Hal ini sejalan dengan Persentase penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV & AIDS yang mencapai 93,8% yang tentunya kedepan diharapkan mereka dapat meminimalisir resiko penularan terhadap orang lain. Prevalensi kasus pada usia 15-24 tahun sudah tercapai jika dibandingkan dengan target nasional 0,5% karena realisasi capaian dibawah target Nasional yakni 0,31% ini berarti kasus HIV pada usia tersebut di Kalimantan Barat masih relative kecil.



Usia 15-24 tahun merupakan usia remaja yang menjadi harapan bangsa kedepan, namun dalam kenyataannya paling banyak tertular HIV. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi melalui kerja sama lintas sektoral dan lintas program sudah menggalang dan melakukan upaya pencegahan seperti memperbanyak penyuluhan atau sosialisasi, promosi dengan penyebaran leaflet, buklet dan poster baik melalui unit-unit pelayanan kesehatan, outlate-outlate yang dibentuk, media masa, elektronik, televisi dan jejaring sosial kemasyarakatan lainnya. Adanya kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya dalam upaya menekan terjadinya infeksi baru, jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Tahun 2018 ini di 14 Kabupaten Kota yang ada di Kalbar, sebagian besar remaja usia 15-24 tahun sudah mengetahui tentang HIV, cara penularannya, cara pencegahannya dan kegiatan/perilaku apa saja yang tidak menyebabkan/mengurangi resiko penularan, karena di tahun-tahun sebelumnya masih banyak paradigma/pemahaman yang keliru dari masyarakat luas dengan menganggap penularan HIV itu begitu mudah, sehingga dengan serta merta terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Sebagai salah satu jenis penyakit IMS yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat, HIV merupakan kasus IMS yang saat ini paling banyak mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat luas karena dampaknya yang bersifat kronis dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa mematikan virusnya secara tuntas, dan pada kenyataannya sangat mempengaruhi keberlangsungan tatanan kehidupan kemasyarakatan. Saat ini Kalimantan Barat sudah membongkar penularan HIV dan AIDS sebagaimana diketahui bersama yang merupakan fenomena gunung es. Dewasa ini HIV dan AIDS telah menjadi epidemik yang menginfeksi ribuan penduduk Kalimantan Barat baik Pria, Wanita dan Anak-anak.

Penyebaran penyakit HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan, tetapi mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etnis, budaya, agama dan hukum, bahkan dampak secara nyata cepat atau lambat menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat	1.124.565.994	965.105.056	83%	116,97%	33,97

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 116,97%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 33,97, sehingga terjadi penghematan anggaran (*Cost Cutting Program*) sebesar Rp. 159.460.938,-.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya yang dilakukan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) diantaranya melalui program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas resiko tinggi (Making Pregnancy Safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran yang semuanya bertujuan untuk mengurangi kasus kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Upaya yang dilakukan berfokus pada intervensi jenis-jenis pelayanan esensial selama ini yang dinilai cost effective. Sementara itu, strategi yang diterapkan dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB masih menggunakan strategi Making Pregnancy Safer (MPS) dengan melakukan penajaman pada jenis kegiatan-kegiatan. Pelaksanaan program di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- 2) Supervisi dan Pendampingan Program jampersal;
- 3) Pencetakan lembar balik kesehatan reproduksi calon pengantin.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menggalang dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait untuk kesinambungan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Mulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat formal dalam Program Kesehatan Masyarakat seperti sosialisasi dan advokasi Program Kesehatan Masyarakat melalui berbagai pertemuan dan penyusunan rencana, hingga yang bersifat non formal. Upaya yang dilakukan sampai dengan tahun 2018 cukup memperlihatkan hasil yang diharapkan, namun alokasi anggaran untuk Program Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari APBD belum maksimal. Program Kesehatan Masyarakat lebih banyak mendapatkan dukungan dari anggaran Dana Dekonsentrasi (APBN).

Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menekan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB), Gizi Buruk dan mengurangi risiko menderita penyakit kronis/tidak menular dengan menekankan pemberian asupan makanan yang cukup mulai bayi berada di dalam kandungan ibu sampai bayi berusia 2 tahun (270 hari kehamilan dan 730 hari pertama setelah lahir). 1.000 HPK merupakan periode kritis pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh sehingga memerlukan asupan gizi yang baik.

Pada penguatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui program Nusantara Sehat (NS) berbasis tim yang menempatkan tim tenaga kesehatan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Kegiatan program gizi masyarakat yang dilakukan untuk mencapai kinerja adalah :

1. Promosi Gizi seimbang
 - Umum
 - Kelompok Khusus



2. Perbaiki Gizi remaja putri dan WUS
 - Pemberian Tablet Tambah darah pada remaja putri
 - Konseling gizi pada calon pengantin (Catin)
3. Surveilens Gizi
 - Pelaporan data gizi secara rutin
4. Perbaiki Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan
 - Pemberian PMT pada ibu hamil KEK
 - Pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil
 - Promosi dan konseling IMD dan ASI Eksklusif
 - Pemantauan pertumbuhan
 - PMBA
 - PMT Balita
 - Tatalaksana Gizi Buruk
 - Pemberian Suplemen Gizi

Perubahan paradigma kesehatan merupakan salah satu program Indonesia Sehat selain penguatan pelayanan kesehatan (yankes) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berupaya menekan peningkatan penyakit tidak menular. Perubahan paradigma kesehatan dimaksud adalah perubahan pola dari kuratif dan rehabilitatif ke arah promotif dan preventif.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 - 2018 dan target RPJMD

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target RPJMD Sasaran Strategis 3

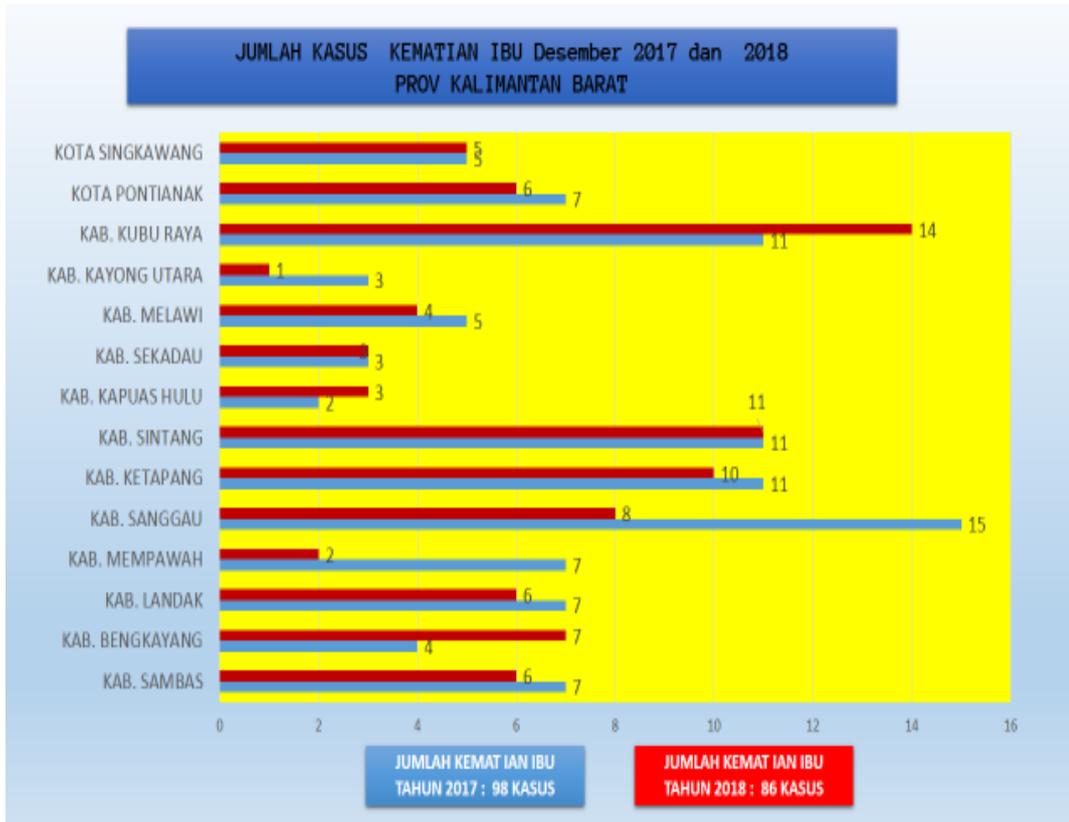
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
3.	Meningkatnya Derajat Kehidupan Masyarakat	1) Angka usia harapan hidup	69,90	69.92	-	69,3	n/a
		2) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	240	240	95	220	156,8
		3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	22,2	22,2	7	21	166,67
		4) Prevalensi balita gizi buruk	6,7%	6,5%	3.83%	6,5%	123,4
		5) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	0,21	0,22	0.31	0,21	138

Indikator kinerja sasaran pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial bidang kesehatan terdiri dari usia harapan hidup, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, dan pravelensi balita gizi buruk.

Dari Tabel di atas dapat dilihat terjadi penurunan dalam kurun waktu tiga tahun. Namun di tahun 2016 dan tahun 2017 Angka Kematian Ibu (240/100.000 Kelahiran Hidup) menggunakan hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2010. Sedangkan Angka Kematian Ibu di tahun 2018 mengacu pada kasus maternal yang terjadi pada tahun 2018 di Kalimantan Barat sebesar 95 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan nasional sebesar 305 per 100.000 Kelahiran Hidup (SUPAS, 2015).



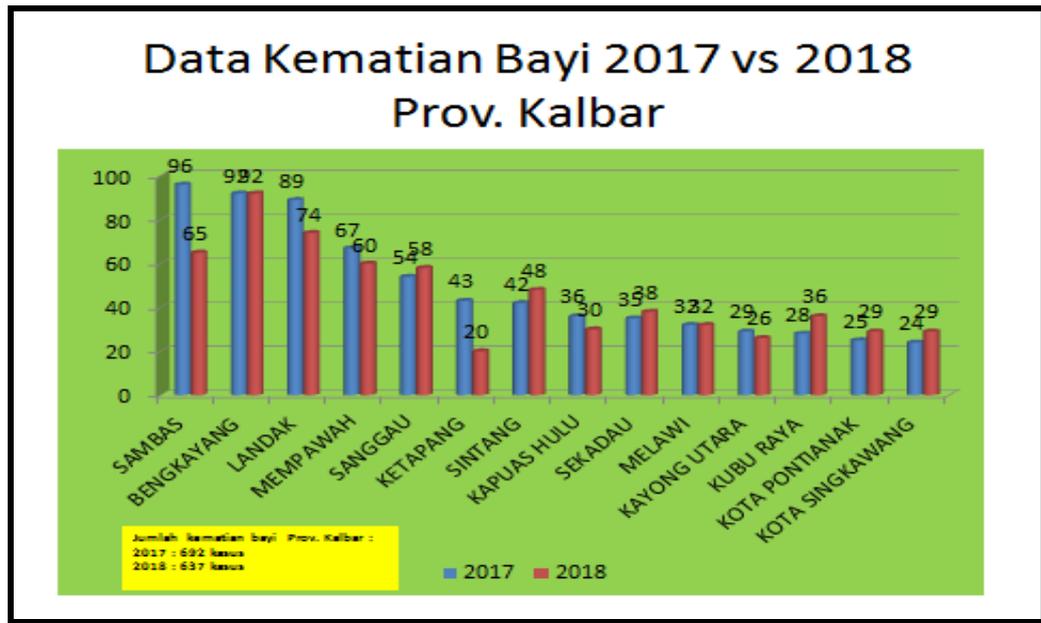
Pada gambar di bawah dapat dilihat kasus kematian di tahun 2018 yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Kubu Raya (14 kasus) dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara (1 kasus).



Berdasarkan gambar di atas, sebagian besar kabupaten/ kota mengalami penurunan kasus kematian ibu. Hal ini tentunya selaras dengan adanya peningkatan capaian indikator program kesehatan ibu.

Tahun 2016 dan tahun 2017 Angka Kematian Bayi (22.2/1000 Kelahiran Hidup) menggunakan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015. Sedangkan Angka Kematian Bayi di tahun 2018 mengacu pada kasus kematian bayi di Kalimantan Barat sebesar 7 per 1000 Kelahiran Hidup dari jumlah kematian bayi sebesar 637 kasus, sedangkan nasional sebesar 21.8 per 1000 Kelahiran Hidup (SUPAS, 2015).

Pada gambar di bawah dapat dilihat kasus kematian bayi di tahun 2018 yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Bengkayang (92 kasus) dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten ketapang (20 kasus), kemudian diikuti kabupaten Kayong Utara (26 kasus).



Sumber: Data Rutin Kesga Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat digambarkan kematian bayi di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan sebanyak 55 kasus dibandingkan tahun 2017. Hal ini tentunya selaras dengan adanya peningkatan capaian indikator program kesehatan anak. Namun di beberapa kabupaten//kota mengalami peningkatan kasus kematian bayi.

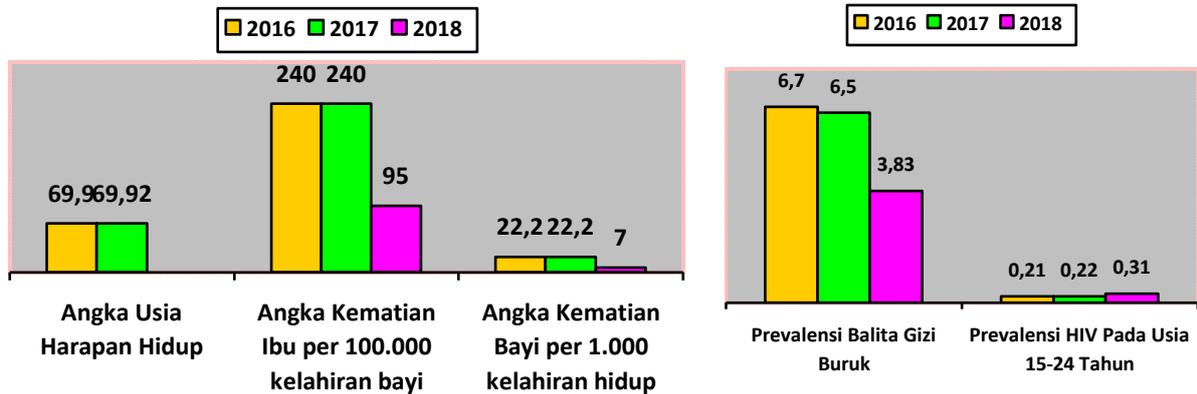
Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata – rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup Tahun 2017 meningkat 0,02 bila dibandingkan kondisi tahun 2016 mencapai 69,90. Sementara itu, angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil riskesdas Tahun 2016 dan Tahun 2017 menunjukkan angka 240 kasus. Sedangkan pada Tahun 2018 sangat menurun menjadi 95 kasus.

Indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2016 dan 2017 menunjukkan angka 22,2 yang berarti per 1000 kelahiran hidup terdapat 22,2 kasus kematian bayi. Sedangkan pada tahun 2018 menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2018 menurun menjadi 7 kasus kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Sedangkan prevalensi balita gizi buruk menunjukkan penurunan. Angka Prevalensi Gizi Buruk pada tahun 2016 berdasarkan RISKESDAS menunjukkan angka 6,7%, hasil PSG pada tahun 2017 angka prevalensi balita gizi buruk menjadi 6,5% sedangkan pada tahun 2018 mengalami perbaikan menjadi 3,83%.



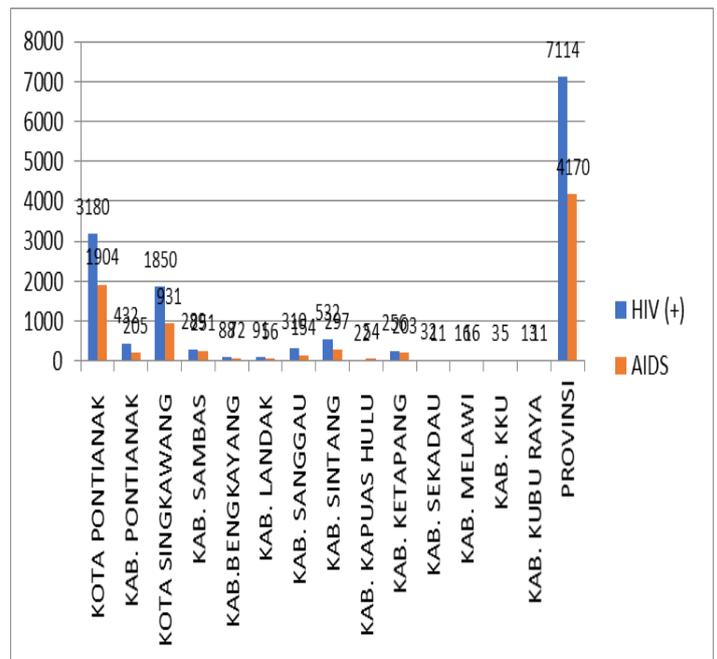
Gambar 3.2
Sasaran 3 : Meningkatkan Derajat Hidup Masyarakat



Untuk penanganan stunting dilakukan tidak hanya dengan memberikan makanan tambahan. Tapi juga dilakukan dengan faktor eksternal, misalnya perbaikan sanitasi, dan fasilitas air bersih.

Tabel 3.11
Distribusi Kasus HIV dan AIDS per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

KABUPATEN / KOTA	HIV (+)	AIDS
KOTA PONTIANAK	3180	1904
KAB. PONTIANAK	432	205
KOTA SINGKAWANG	1850	931
KAB. SAMBAS	289	251
KAB.BENGGAYANG	88	72
KAB. LANDAK	91	56
KAB. SANGGAU	310	154
KAB. SINTANG	532	297
KAB. KAPUAS HULU	22	54
KAB. KETAPANG	256	203
KAB. SEKADAU	32	11
KAB. MELAWI	16	16
KAB. KKU	3	5
KAB. KUBU RAYA	13	11
PROVINSI	7114	4170





c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan target Nasional

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan target Nasional Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	TARGET NASIONAL
3.	Meningkatnya Derajat Kehidupan Masyarakat	1) Angka usia harapan hidup		
		2) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	95	305
		3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	7	21.8
		4) Prevalensi balita gizi buruk	3.83%	-
		5) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	0.31%	0.5%

Dari Tabel di atas dapat dilihat Angka Kematian Bayi (AKB) di Kalimantan Barat jauh di bawah target nasional. Di Kalimantan Barat sebesar 7 per 1000 Kelahiran Hidup, sedangkan nasional sebesar 21.8 per 100.000 Kelahiran Hidup (SUPAS, 2015).

Prevalensi kasus HIV pada usia 15-24 tahun 2018 capaiannya sebesar 0.31%. Jika dibandingkan dengan target nasional angka ini sudah melebihi target (0.5%). Secara keseluruhan kasus HIV pada usia 15-24 tahun di Kalimantan Barat setiap tahunnya masih dibawah target Nasional yakni <0.5% artinya kasus HIV pada usia tersebut di Kalimantan Barat masih relatif kecil.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hambatan dan kendala dalam penurunan kematian ibu adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif banyak namun belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, Sarana prasarana masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga PONEK dan RS PONEK belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB.
- 2) Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan mikronutrien.
- 3) Faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi (AKB), menurut UNICEF (2001) menurunnya kualitas hidup anak pada usia 3 tahun pertama hidupnya adalah: gizi buruk, ibu sering sakit, status kesehatan buruk, kemiskinan, dan diskriminasi gender. Bayi dengan gizi buruk mempunyai resiko 2 kali meninggal dalam 12 bulan pertama hidupnya. Terkait AKB, satu faktor penting adalah umur ibu dibawah 20 tahun meningkatkan resiko kematian neonatal, serta usia ibu di atas 35 tahun meningkatkan resiko kematian perinatal.



Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Asuhan persalinan normal dengan paradigma baru yaitu dari sikap menunggu dan menangani komplikasi menjadi mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Penempatan bidan harus adil dan merata sehingga tidak ada kesenjangan penempatan bidan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam upaya tersebut harus bersifat non-diskriminatif dimana setiap ibu yang membutuhkan pertolongan bidan wajib memperoleh pelayanan tersebut. Selain itu, ketersediaan pelayanan kebidanan harus berkualitas, terjamin keamanannya, efektif dan sesuai serta pembiayaan pelayanan kesehatan harus terjangkau oleh ibu yang membutuhkannya. Dalam upaya tersebut, tenaga kesehatan yang melayani ibu hamil harus berkompeten, berintegritas, dan bersifat objektif serta bidan harus bekerjasama dengan tim yang berkompeten sehingga persalinan dapat dilakukan secara cepat dengan ketepatan yang tinggi (tidak mengalami kesalahan dalam melakukan persalinan). Jadi, pemerintah harus meningkatkan kuantitas dan kualitas dari tenaga kesehatan tersebut maupun tim yang akan membantu dalam persalinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- 2) Masih mahalnya pembiayaan pelayanan kebidanan bagi ibu di kalangan miskin dapat diatasi dengan adanya JAMPERSAL bagi ibu hamil. Selain itu Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dicegah dengan pemakaian alat kontrasepsi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyediakan alat kontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermanfaat dan bermutu dimana alat kontrasepsi tersebut tersedia secara merata dan terjangkau. Selain itu, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan tentang alat kontrasepsi dari produsen, distributor maupun pelaku pelayanan kesehatan.
- 3) Semua program yang diimplementasikan kepada ibu-ibu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan perilaku dari ibu-ibu. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak, dimana pemerintah berperan untuk membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi dan menyiapkan masyarakat dengan membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berpartisipasi dengan memberikan saran yang membangun untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).
- 4) Upaya yang dilakukan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) salah satunya melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan pendekatan/kunjungan rumah.



Sasaran Strategis 4

Terselenggaranya Manajemen Pendidikan yang Efektif dan Efisien

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	1) Angka Putus Sekolah			
		a. SD/MI	0,50	0,19	162
		b. SMP/MTs	0,68	0,49	127,94
		d. SMA/MA	0,92	0,62	148,38
Capaian Kinerja Sasaran 4					146,1%

Berdasarkan data tabel diatas, persentase Angka Putus Sekolah (APS) untuk jenjang SD/MI yang ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 0,50 % mengalami penurunan sesuai dengan realisasi tahun 2018 sebesar 0,19 %. Hal ini berdampak baik karena semakin kecilnya angka putus sekolah maka jumlah anak yang bersekolah di tingkat SD/MI semakin banyak sehingga kinerjanya mencapai 162 %. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs yang menurun dari target 0,68% dengan realisasi sebesar 0,49% sehingga kinerjanya mencapai 127,94 persen. Begitu juga dengan angka putus sekolah SMA/MA/SMK di provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,92 persen, sedangkan realisasinya sebesar 0,62 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 148,38 persen.

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan	Rp. 1.049.867.500	Rp. 965.834.900	92	146,1%	54,1

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 146,1%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 54,1, sehingga terjadi penghematan anggaran (*Cost Cutting Program*) sebesar Rp. 84.032.600,-.

- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai kinerjanya yaitu :

- Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev dalam rangka peningkatan Kualitas Pendidikan.
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan Monitoring pelaksanaan uji kompetensi guru
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Kegiatan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.



Dari ketiga program tersebut di atas, yang menjadi program prioritas dalam menunjang sasaran strategis ini yaitu Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan secara optimal. Selain itu, memberikan informasi mengenai kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Barat, guna mengetahui kendala-kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan program dan dapat segera diambil kebijakan sehingga permasalahan yang timbul dapat diatasi.

e. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2018 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
4.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	1) Angka Putus Sekolah					
		a. SD/MI	0,38	0,19	0,19	0,50	162
		b. SMP/MTs	0,63	0,36	0,49	0,68	127,94
		c. SMA/MA	1,01	0,31	0,62	0,92	87,62

Berdasarkan tabel di atas, realisasi angka putus sekolah jenjang SD/MI pada tahun 2016 sebesar 0,38 persen dan realisasi pada tahun 2017 sebesar 0,19. Begitu juga dengan tahun 2018 teralisasi sebesar 0,19 persen dan hal ini berarti mengalami peningkatan dengan menurunnya angka putus sekolah jenjang SD/MI. Untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah sebesar 0,63 dan tahun 2017 sebesar 0,36 persen, ini juga menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2018 angka putus sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen dari tahun 2017, menjadi 0,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan di tahun 2018. Sementara itu, untuk jenjang SMA/MA Angka Putus Sekolah pada tahun 2016 sebesar 1,01 persen mengalami penurunan 0,31 persen pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa Angka putus sekolah di jenjang SMA/MA mengalami perbaikan sebesar 0,7 persen. Namun pada tahun 2018 angka putus sekolah mengalami peningkatan. Jika dibandingkan Tahun 2017, Angka putus sekolah pada semua jenjang setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang positif apabila dibandingkan dengan target indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Banyak sekali faktor yang menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah, salah satunya disebabkan faktor kebutuhan ekonomi, jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal, serta kesadaran baik siswa itu sendiri maupun orang tua siswa mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, khususnya sampai pada



jenjang SMA/MA. Beberapa kasus memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penyebab putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Peran strategis yang dimiliki oleh pemerintah provinsi yaitu dengan mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota, termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek pendidikan.
- Persoalan putus sekolah merupakan persoalan yang kompleks, karena bukan hanya terkait dengan urusan pendidikan saja. Karena itu, diperlukan kajian dan pengembangan strategi yang efektif guna menjawab akar persoalan putus sekolah. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal, namun sangat menentukan karena menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Upaya pengembangan berbagai skema dukungan pendanaan pendidikan, seperti Pemberian bantuan pendidikan tepat sasaran, baik Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs maupun Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA/MA serta SMK, memberikan dampak bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni;
- Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja indikator Angka Putus Sekolah salah satunya melalui program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK dan meningkatkan program-program pendidikan non formal.
- Melaksanakan Program sekolah gratis bagi seluruh sekolah negeri yang ada di Kalimantan Barat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	1) Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		a. SD/MI/Paket A	113%	112,12	100,78
		b. SMP/MTs/Paket B	98%	91,89	93,77
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	74,95%	71,10	95,32
		2) Angka rata-rata lama sekolah	7,48 tahun	7,63 tahun	102
		3) Angka Partisipasi Murni (APM)			
		a. SD/MI/Paket A	99,65%	99,68	100,03
		b. SMP/MTs/Paket B	72,40%	75,52	104,31
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	57,50%	57,96	100,8
Capaian Kinerja Sasaran 5					99,57

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C menunjukkan peningkatan dan capaian kerjanya terpenuhi atau melebihi 100%. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI/Paket A juga mengalami peningkatan dengan capaiannya sebesar 100,78%. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan dari target sebesar 98 persen, hanya tercapai sebesar 91,89 persen. Untuk jenjang SMA/SMK//MA/Paket C target sebesar 74,95 persen dan terealisasi sebesar 71,10 persen. Sementara itu, untuk angka rata-rata lama sekolah yang ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 7,48 tahun, dapat direalisasikan sebesar 7,63 tahun sehingga capaian kerjanya sebesar 102 persen.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Rp.185.300.517.000	Rp. 183.377.570.690	98,96	99,57	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,96% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 99,57%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat diukur karena capaian kerjanya belum mencapai 100%. Namun



demikian pada sasaran ini terjadi penghematan anggaran (*Cost Cutting Program*) sebesar Rp1.922.946.310,-.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK dan lebih meningkatkan program pendidikan kesetaraan.

Meningkatnya APK dan APM di SD/MI/Paket A disebabkan adanya program pemerintah dalam mengentaskan buta aksara melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat dan pembangunan ruang kelas baru, serta pembangunan ruang perpustakaan untuk Sekolah Dasar. Peningkatan APM dan APK tersebut dipengaruhi juga oleh semakin banyaknya SMP/MTs yang memiliki perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan menerapkan kurikulum 2013.

b. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2018 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018**

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	1) Angka Partisipasi Kasar (APK)					
		a. SD/MI/Paket A	114,74	112,67	112,12	113	100,78
		b. SMP/MTs/Paket B	96,25	97,15	91,89	98	93,77
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	72,31	72,33	71,10	74,95	95,32
		2) Angka rata-rata lama sekolah	7,28	7,35	7,63	7,48	102
		2) Angka Partisipasi Murni (APM)					
		a. SD/MI/Paket A	99,26	99,66	99,68	99,65	100,03
		b. SMP/MTs/Paket B	71,88	75,04	75,52	72,40	104,31
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	55,60	57,88	57,96	57,50	100,8

Berdasarkan tabel di atas, realisasi APK jenjang SD/MI pada tahun 2016 sebesar 114,74 persen dan pada tahun 2017 sebesar 112,67 begitu juga dengan tahun 2018 terealisasi sebesar 112,12 persen. Hal ini berarti Angka Partisipasi Kasar mengalami peningkatan kinerja positif dengan menurunnya APK jenjang SD/MI. Sementara itu, untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, realisasi APK sebesar 96,25 persen, tahun 2017 sebesar 97,15 dan pada tahun 2018 realisasinya sebesar 91,89 persen, ini berarti APK SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan kinerja positif dengan menurunnya APK SMP/MTs/Paket B. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C realisasi APK pada tahun 2016 sebesar 72,31 persen, tahun 2017 terealisasi 72,33 persen dan tahun 2018 terealisasi sebesar 71,10 persen. Hal ini berarti mengalami peningkatan kinerja positif dengan menurunnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C.

Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan kinerja yang positif dengan capaian yang meningkat dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada tabel, dimana capaian APM SD/MI pada tahun 2016 sebesar 99,26 persen, tahun 2017 sebesar 99,66% dan tahun 2018 menjadi 99,68 persen. Capaian APM SMP/MTs yang pada tahun 2016 sebesar 71,88 persen, tahun 2017 sebesar 75,04 persen tahun 2018 75,52 persen,



meningkat menjadi 75,52 persen. Begitu juga dengan capaian APM SMA/SMK/MA yang pada tahun 2016 sebesar 55,60 persen, tahun 2017 57,88 persen dan 2017 sebesar 57,96 persen, meningkat menjadi 57,96 persen.

Capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian tahun 2016 yang pada saat itu sebesar 7,28 tahun, meningkat menjadi 7,63 tahun pada tahun 2018.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan target Nasional Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	Target Nasional
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	1) Angka Partisipasi Kasar (APK)		
		a. SD/MI/Paket A	112,12	105,9
		b. SMP/MTs/Paket B	91,89	102,1
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	71,10	86,9
		2) Angka rata-rata lama sekolah	7,63 tahun	8,10 tahun
		3) Angka Partisipasi Murni (APM)		
		a. SD/MI/Paket A	99,68	93
		b. SMP/MTs/Paket B	75,52	73
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	57,96	63,7

Berdasarkan tabel tersebut di atas, realisasi capaian APK jenjang SD/MI/Paket A masih lebih tinggi dari target nasional. Hal ini berarti masih banyaknya siswa pada jenjang SD/MI/Paket C yang berusia di bawah atau di atas usia sekolah jenjang tersebut (7-12 tahun). Di antara faktor penyebab masih tingginya APK SD/MI/Paket C ini adalah masih tingginya jumlah siswa yang mengulang, terutama kelas 1 dan 2 SD sebesar 11,08% dan 5,11%. Meskipun demikian, angka mengulang tersebut sudah lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk APM SD/MI/Paket A capaian realisasinya telah melampaui target nasional, ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah untuk jenjang SD/MI/Paket A di Kalimantan Barat sudah sangat baik.

Realisasi capaian APK SMP/MTs/Paket B tahun 2018 juga telah melampaui target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B semakin sesuai dengan usia sekolah yang seharusnya (13-15 tahun), dan didukung dengan angka mengulang yang tidak lebih dari 1%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B juga menunjukkan capaian yang memuaskan dengan melampaui target nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan untuk jenjang SMP sederajat di Kalimantan Barat sudah semakin baik.

Sementara itu, realisasi capaian APK SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2018 masih di bawah target nasional. Akan tetapi, capaian ini menunjukkan bahwa siswa yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C semakin sesuai dengan usia sekolah yang seharusnya (16-18 tahun), dan didukung dengan angka mengulang yang tidak lebih dari 1%. Capaian APM SMA/SMK/MA/Paket C juga masih di bawah target nasional. Namun, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan untuk jenjang SMA sederajat di Kalimantan Barat sudah semakin baik.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Secara umum, tidak terdapat penurunan kinerja jika dilihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Bahkan capaian kinerja bidang pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik. Hanya saja masih terdapat beberapa sasaran kinerja yang belum melampaui target nasional.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, khususnya dalam meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat di antaranya melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Upaya ini tidak hanya menjadi tugas Pemerintah semata, tetapi juga menjadi tugas seluruh elemen masyarakat. Selain itu, dengan adanya bantuan pendidikan seperti BOS, PIP, dan lainnya termasuk pada tahun 2019 telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pendidikan gratis bagi SMA/SMK guna mendukung peningkatan capaian sasaran kinerja yang ditargetkan. Dalam hal meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, upaya yang dilakukan adalah dengan penggalakan kembali pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A, Paket B, dan Paket C.



Sasaran Strategis 6

Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	1) Luas penurunan kerusakan Hutan	1.000 Hektar	985,05 Hektar	98,50%

Indikator urusan kehutanan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 digambarkan melalui Luas penurunan kerusakan hutan. Capaian luas penurunan kerusakan hutan pada tahun 2018 seluas 985,05 hektar, dalam hal ini belum melampaui target yang telah ditetapkan seluas 1.000 hektar.

Gangguan terhadap sumber daya hutan terus berlangsung baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia. Kerusakan hutan sebagai akibat dari kejadian kebakaran hutan, perambahan hutan, penebangan liar, dan lainnya merupakan salah satu bentuk gangguan dan ancaman terhadap kelestarian fungsi kawasan hutan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan tersebut cukup signifikan yang mencakup aspek ekologis seperti terganggunya ekosistem lingkungan dan penurunan fungsi kawasan hutan. Pada aspek ekonomi seperti menurunnya produktifitas kawasan hutan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, serta aspek sosial seperti terganggunya kepentingan umum dan kesehatan masyarakat luas.

Secara empiris kerusakan hutan di Kalimantan Barat hampir berlangsung di setiap tahun, oleh sebab itu untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi tersebut diperlukan langkah kongkrit dalam upaya pengendalian kerusakan hutan melalui peningkatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum dibidang kehutanan.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	26.154.710.049	9.897.205.822	37,84	98,50	n/a

Serapan anggaran yang hanya mencapai 37,84% dari Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Meskipun terdapat penambahan pagu anggaran pada tahun 2018 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-DR) melalui Perubahan DPA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang terbit pada akhir Tahun anggaran



(Bulan November 2018), namun dana tersebut sulit untuk direalisasikan secara maksimal akibat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program.

- b. Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH-DR) yang merupakan dana transfer dari Pusat harus mempedomani kepada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan), sehingga pemanfaatannya sangat terbatas dan tidak memberikan peluang adanya perluasan kegiatan.

Persentase realisasi anggaran pada sasaran strategis berkurangnya kawasan Hutan yang rusak dengan indikator kinerja menurunnya luas kerusakan hutan \pm 1.000 Ha hanya sebesar 37,84% dengan capaian kinerja sebesar 98,51%, maka pada sasaran ini tidak memiliki tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang cukup signifikan, karena realisasi capaian kinerja fisik tidak mencapai 100%. Namun demikian, pada sasaran strategis ini terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 16.257.504.227,-.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berkurangnya luas kerusakan hutan didukung oleh program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan meningkatnya pengendalian kerusakan hutan.

Salah satu instrumen penting yang diperlukan dalam membuat perencanaan pengendalian kerusakan hutan adalah ketersediaan data kerusakan hutan secara tepat dan akurat. Untuk memperoleh data kerusakan hutan tersebut, maka diperlukan uji petik lokasi kerusakan hutan dengan melakukan *ground check* lapangan guna memperoleh data primer.

- b. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018**

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target RPJMD Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 1.000 Ha/tahun	1) Luas penurunan kerusakan Hutan	490	1.160	985,05	1.000	98,50

Penurunan luas kerusakan hutan pada tahun 2018 masih menunjukkan hasil yang positif karena penurunan luas kerusakan hutan mencapai 985,05 ha hampir mendekati target yang ditetapkan seluas 1.000 hektar. Luas kerusakan hutan yang terjadi pada tahun 2018 sebagai akibat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan serta perambahan hutan dalam skala terbatas.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat seluas 1.160 hektar, maka luas penurunan kerusakan hutan pada tahun 2018 lebih kecil sekitar 174,95 hektar atau sekitar 15,08%. Namun jika dibandingkan dengan jumlah hotspot pada tahun 2018 terdapat sebanyak 1.564 titik api atau meningkat sebesar 143,99 % dari tahun 2017 yang tercatat sebanyak 641 titik api. Berikut data perkembangan jumlah data hotspot dalam tiga tahun terakhir.



Tabel 3.22 : Perkembangan Jumlah Data Hotspot Tiga Tahun Terakhir

NO	TAHUN	DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	JUMLAH
1.	2016	646	936	1.582
2.	2017	208	433	641
3.	2018	612	955	1.564

Dalam rangka pengendalian kerusakan hutan sebagai akibat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 2018 telah dibentuk posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk memantau segala perkembangan yang terjadi serta mendistribusikan data hotspot sebagai langkah pencegahan dini. Selain itu telah dilakukan patroli kebakaran hutan dan lahan secara intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Luasnya jangkauan wilayah pengawasan (*span of control*) dan terbatasnya sumber daya manusia yang berkualifikasi;
2. Upaya pengendalian kerusakan kawasan hutan masih belum sebanding dengan eskalasi gangguan keamanan hutan yang terjadi.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM kehutanan serta SDM masyarakat sekitar hutan dalam upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
2. Mengoptimalkan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan hutan;
3. Meningkatkan produktifitas lahan kritis telah ditempuh melalui upaya rehabilitasi lahan kritis atau penanaman kembali, pengembangan lokasi tanaman unggulan lokal, pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat, serta kegiatan perhutanan sosial melalui pembangunan hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Selain itu untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan telah dilakukan aksi penanaman serentak melalui penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan pencanangan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun. Upaya - upaya yang telah dilakukan ini secara signifikan berdampak terhadap penurunan kerusakan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran Strategis 7

Menurunnya laju kerusakan lingkungan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.665	1.564	362,21%

Jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari target sebesar 5.665 titik dan realisasinya sebesar 1.564 titik dengan capaian kinerja sebesar 362,21 %. Penurunan jumlah hotspot tersebut dikarenakan adanya pemadaman secara dini (*initial attack*) terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan jarak pendek. Menurunnya frekwensi kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui upaya pemadaman dengan meminimalisir intensitas kebakaran hutan dan asap di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Data hotspot hasil pemantauan berupa koordinat yang diolah dan di *overlay* dengan peta administrasi Kalimantan Barat, didapatkan titik hotspot untuk setiap kecamatan. Berdasarkan jumlah sebaran hotspot di Tahun 2018 tersebut, dibuatkan daftar rekapitulasi lokasi sebaran dengan jumlah hotspot di setiap Kabupaten/Kota terdata sebanyak 1.564 titik panas (*hotspot*) di wilayah Kalimantan Barat.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	Program Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kerusakan Hutan	21.279.287.859	9.311.803.222	76,96%	362,21%	285,25%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 76,96% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 362,21%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 285,25%. Dengan demikian, pada sasaran strategis ini dapat dilakukan penghematan anggaran (*cost cutting program*).

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang menunjang capaian kinerja pada sasaran ini yaitu Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Kegiatan pemantauan titik panas (*hotspot*) yang dilakukan melalui satelit TERRA/AQUA (LAPAN), NPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) melalui situs Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penurunan jumlah hotspot tersebut juga diakibatkan adanya peningkatan pengendalian dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pemantauan titik panas (*hotspot*) serta dilaksanakannya *Groundcheck* kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha



pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap lintas batas, serta terwujudnya komitmen bersama dalam aksi daerah penurunan titik panas sebesar 10% setiap tahun. Selain itu, menyediakan data, informasi, menetapkan daerah dan peta rawan kebakaran sebagai bahan untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran, dalam menunjang kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran tidak terkendali atau bahkan menjadi bencana. Selain itu, melakukan peningkatan penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak juga terhadap penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2018 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target RPJMD Sasaran Strategis 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	1525	766	1.564	5665	362,21

Penurunan jumlah hotspot pada tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebanyak 1.525 dan Tahun 2017 sebanyak 766. Selama 3 tahun terakhir capaian penurunan jumlah hotspot paling rendah yaitu pada tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD, maka penurunan jumlah hotspot dapat dikatakan sangat berhasil. Selama tahun 2018 terdeteksi titik api (hotspot) sebanyak 1.564 buah dengan penyebaran sebagai berikut :

Tabel 3.25 : Penyebaran Titik Api (Hotspot) Tahun 2018

NO	KABUPATEN	DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	JUMLAH
1	BENGKAYANG	12	56	68
2	KAPUAS HULU	25	71	96
3	KAYONG UTARA	22	15	37
4	KETAPANG	131	166	297
5	KUBU RAYA	29	104	133
6	LANDAK	32	94	126
7	MELAWI	88	29	117
8	MEMPAWAH	27	27	54
9	SAMBAS	41	25	66
10	SANGGAU	102	86	188
11	SEKADAU	14	79	93
12	SINTANG	89	175	264
13	KOTA PONTIANAK	-	21	21
14	KOTA SINGKAWANG	-	4	4
	JUMLAH	612	955	1.564



Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah hotspot yang paling banyak terdapat pada Kabupaten Ketapang dan jumlah hotspot yang paling sedikit terdapat di Kota Singkawang. Sedangkan jumlah hotspot yang terjadi yaitu berada di luar kawasan sebanyak 955 titik api dan dalam kawasan sebanyak 612 titik api (hotspot).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- ✓ Rendahnya kesadaran masyarakat Kalimantan Barat terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- ✓ Lamanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- ✓ Deteksi sebaran titik api masih rendah
- ✓ Luasnya jangkauan wilayah kerja (span of control) dan terbatasnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, serta ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat Kalimantan Barat terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta terdistribusikannya bahan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (leaflet, booklet, spanduk dan banner)
- ✓ Meningkatkan informasi dini dan antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- ✓ Melakukan deteksi dini sebaran titik api di lapangan dalam upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada 14 Kabupaten/Kota berdasarkan data dari pengindraan jarak jauh melalui satelite NOAA yang disampaikan oleh posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat
- ✓ Melakukan pemadaman secara dini (initial attack) terhadap kebakaran hutan dan lahan jarak pendek.
- ✓ Pembentukan posko penanggulangan kebakaran hutan dengan melibatkan instansi terkait.



Sasaran Strategis 8

Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular strategis

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sasaran Strategis 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	Jumlah Populasi Ternak	49.201.951 ekor	66.574.718 ekor	135,31

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Populasi Ternak:

Jumlah populasi sepuluh jenis ternak tahun 2018 ditargetkan sebesar 49.201.951 ekor dan dapat direalisasikan sebesar 66.574.718 ekor, atau capaian sebesar 135,31 %. Capaian kinerja terhadap populasi sepuluh jenis ternak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja untuk ternak sapi potong pada tahun 2018 sebesar 101,40% dari target sebanyak 171.165 ekor dengan realisasi sebanyak 173.566 ekor. Pencapaian target ini didukung oleh optimalisasi reproduksi sapi melalui inseminasi buatan.
- Capaian kinerja ternak sapi perah sebesar 130,91% dari target sebanyak 55 ekor dengan realisasi sebanyak 72 ekor. Realisasi ini lebih tinggi disebabkan peternakan sapi perah yang terpusat di Kabupaten Mempawah telah dikembangkan dengan pendekatan agribisnis (usaha sapi perah).
- Capaian kinerja ternak kerbau sebesar 67,32% dari target sebanyak 3.638 ekor dengan realisasi sebanyak 2.449 ekor. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan peternakan kerbau masih dikembangkan secara konvensional dengan skala usaha kecil dan bukan merupakan usaha pokok rumah tangga petani/peternak.
- Capaian kinerja ternak kambing sebesar 82,43% dari target sebanyak 195.929 ekor yang terealisasi sebanyak 161.514 ekor, belum tercapainya target ini disebabkan peternakan kambing masih dikembangkan secara konvensional (belum berbasis agribisnis) dan bukan merupakan usaha pokok rumah tangga petani/peternak.
- Capaian kinerja ternak Domba mencapai sebesar 372,34% dari target sebanyak 47 ekor dengan realisasi sebanyak 175 ekor. Komoditas ternak Domba bukan menjadi komoditas unggulan dan ditanamkan secara khusus oleh masyarakat atau pengusaha ternak di Kalimantan Barat.
- Capaian kinerja ternak Babi tahun ini sebesar 83,87%. Dari target sebanyak 648.697 ekor, realisasi hanya mencapai sebanyak 544.058 ekor. Rendahnya realisasi populasi ternak babi ini dipengaruhi tingginya pemotongan dan pengeluaran tidak tercatat.



Ternak babi merupakan ternak yang lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat karena budaya dan bukan untuk tujuan konsumsi, sehingga menyebabkan perdagangan dan pemotongan yang tidak tercatat masih sangat tinggi.

- Capaian kinerja ayam buras pada tahun 2018 sebesar 111,03% dari target sebanyak 5.529.784 ekor dengan realisasi mencapai sebanyak 6.139.850 ekor. Tingginya realisasi populasi ayam buras dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : 1) pemasukan ternak dari luar daerah; 2) tingginya minat masyarakat dalam pengembangan budidaya yang lebih sederhana dan murah, daya hidup tinggi, harga jual tinggi, dan budaya mengonsumsi ayam buras lebih baik dan aman jika dibandingkan mengonsumsi ayam ras pedaging.
- Capaian kinerja ternak ayam ras petelur tahun 2018 sebesar 51,64% dari target sebanyak 4.602.950 ekor, dan yang terealisasi sebanyak 2.376.995 ekor. Rendahnya realisasi populasi ternak ayam ras petelur disebabkan beberapa peternak di Kab. Ketapang, Kubu Raya, sekadau, Sintang, dan Kayong Utara tidak melanjutkan usaha ternak ayam petelur karena semakin meningkatnya biaya produksi.
- Capaian kinerja ternak ayam ras pedaging tahun 2018 ini sebesar 152,79% dengan realisasi sebanyak 56.570.468 ekor dari target sebanyak 37.024.816 ekor. Tingginya realisasi populasi ini disebabkan makin berkembangnya usaha ternak ayam ras pedaging baik kemitraan maupun mandiri.
- Capaian kinerja ternak itik pada tahun 2018 sebesar 59,09 %, dari target sebanyak 1.024.870 ekor, dengan realisasi sebanyak 605.571 ekor. Rendahnya realisasi populasi ternak itik disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
 - (1) usaha peternakan itik di Kabupaten Sekadau tidak dilanjutkan
 - (2) Itik hanya dikembangkan untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga, dan
 - (3) Beberapa kabupaten/kota telah mengeluarkan larangan beternak itik di kawasan pemukiman/perumahan.

Capaian Kinerja Produksi Ternak:

1. Capaian kinerja untuk produksi daging sapi potong pada tahun 2018 sebesar 68,19% dari target sebanyak 8.029 ton dengan realisasi 5.475 ton. Rendahnya realisasi ini disebabkan pemotongan total sapi juga mengalami penurunan sebanyak 37.723 ekor sapi. Sementara harga daging sapi yang terus mengalami peningkatan menjadi faktor penyebab menurunnya permintaan daging sapi potong. Sebagai kompensasi pemenuhan pangan asal hewan, konsumsi beralih ke produk hewan lainnya yang lebih terjangkau, seperti ayam, telur, kambing dan babi.
2. Capaian produksi daging kerbau menunjukkan realisasi yang tinggi, yaitu sebesar 130,71%, dari 56 ton yang ditargetkan, dengan realisasi produksi mencapai 73 ton. Tingginya realisasi pemotongan daging kerbau signifikan menurunkan populasi daging kerbau. Pemotongan total Kerbau pada tahun 2018 sebanyak 366 ekor, yaitu untuk kerbau betina yang tidak produktif serta peternak yang tidak memanfaatkan kerbau sebagai pendukung budidaya tanaman pangan.
3. Realisasi produksi daging kambing mencapai 162,41% dari target sebanyak 304 ton dengan realisasi sebanyak 494 ton. Peningkatan ini menunjukkan share konsumsi



pangan asal hewan berupa daging kambing yang mengalami trend peningkatan masyarakat, sebagai alternatif daging asal ternak ruminania yang lebih terjangkau.

4. Pencapaian realisasi produksi daging babi tahun 2018 hanya mencapai 37,53% dari yang ditargetkan sebanyak 30.771 ton dengan realisasi sebanyak 11.548 ton. Penurunan ini disebabkan tingginya pemotongan tidak tercatat di rumah tangga (non TPH).
5. Pencapaian produksi daging ayam buras cukup rendah yaitu sebesar 40,66%, dari yang ditargetkan sebanyak 9.604 ton, dengan realisasi produksi hanya mencapai sebanyak 3.905 ton. Hal ini disebabkan karena menurunnya permintaan untuk konsumsi daging ayam buras.
6. Pencapaian produksi daging ayam ras pedaging sangat tinggi yaitu mencapai 150,72%, dari target sebanyak 34.120 ton, dengan realisasi produksi mencapai 51.425 ton. Tingginya realisasi produksi daging ayam ras pedaging disebabkan beralihnya konsumsi dan permintaan daging ayam.
7. Realisasi produksi daging ayam petelur pada tahun 2018 hanya sebesar 64,65% dari target sebanyak 3.859 ton, dengan realisasi sebesar 2.495 ton. Hal ini disebabkan menurunnya populasi ayam ras petelur.
8. Produksi daging itik ditargetkan sebesar 576 ton, dengan realisasi sebanyak 295 ton atau pencapaian sebesar 51,22%. Ketersediaan daging itik tidak signifikan di Kalimantan Barat karena permintaan yang rendah, sehingga pemotongan juga sangat rendah yaitu sebanyak 235.679 ekor dan pemasukan untuk kegiatan perdagangan (kuliner) juga tidak begitu tinggi.

Capaian Kinerja Pendapatan dan Kesejahteraan Peternak:

Jumlah Pendapatan Peternak dari Sub Sektor Peternakan tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp20.000.000,- dengan realisasi mencapai Rp 22.993.237,- atau tingkat capaian sebesar 112,16%. Tingginya realisasi Jumlah Pendapatan Peternak dari Sub Sektor Peternakan di tahun 2018 didorong oleh peningkatan harga produk peternakan tahun 2018 dibandingkan peningkatan produksi peternakan di Kalimantan Barat. Hal ini berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Gambar 3.7 Pertumbuhan pendapatan peternak

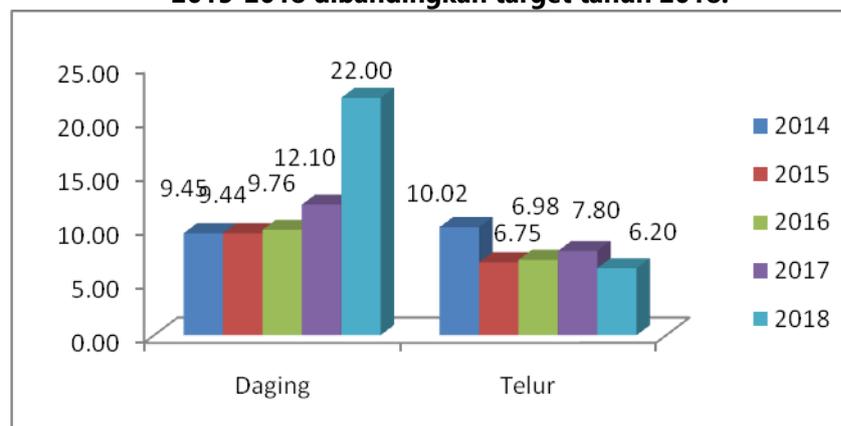


Capaian Kinerja Konsumsi Produk Peternakan:

Target konsumsi produksi peternakan di tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun 2018 relatif dapat dicapai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Konsumsi daging sapi tahun 2018 ditargetkan sebesar 14,829 kg/kapita/hari, dengan realisasi sebesar 10,555 kg/kapita/hari, maka capaian kinerja untuk konsumsi daging sapi sebesar 71,18%. Konsumsi daging sapi didorong dengan meningkatnya pengolahan hasil daging sapi dalam membantu keterjangkauan masyarakat untuk mengonsumsi pangan asal hewan (PAH). Beragamnya produk olahan daging sapi menjadi solusi untuk meningkatkan konsumsi daging sapi di masyarakat.
- 2) Konsumsi telur tahun 2018 ditargetkan sebesar 8,042 kg/kapita/tahun, dengan realisasi sebesar 6,2 gram/kapita/tahun, maka capaian kinerja untuk konsumsi telur sebesar 77,09%. Tidak tercapainya target konsumsi telur disebabkan oleh dua hal, yaitu 1) dari faktor suplai dimana penurunan populasi ayam ras petelur mempengaruhi suplai komoditas telur, 2) faktor permintaan, dimana permintaan telur di masyarakat mengalami penurunan karena meningkatnya harga telur. Peningkatan harga telur dipengaruhi oleh meningkatnya biaya input produksi, dimana 60% merupakan komponen input pakan yang diperoleh peternak dari luar daerah.

Gambar 3.8 Realisasi Konsumsi daging sapi dan telur tahun 2015-2018 dibandingkan target tahun 2018.



Capaian Kinerja Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis:

Pengendalian penyakit hewan Menular Strategis di Kalimantan Barat pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Penyakit Avian Influenza bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2018 atau pencapaian sebesar 100%.
- Penyakit Brucellosis bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2018 atau pencapaian sebesar 100%.
- Penyakit Hog Cholera bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2018 atau pencapaian sebesar 100%.
- Penyakit parasiter bebas kasus sesuai dengan target pembebasan di tahun 2018 atau pencapaian sebesar 100%.
- Penyakit Rabies terkendali sesuai dengan target pengendalian di tahun 2018 atau pencapaian sebesar 100%. Hanya penyebaran rabies untuk tahun 2017 terdapat di



Kabupaten Ketapang dengan 17 kasus. Tahun 2018 lokasi penyebaran penyakit rabies terdapat di 9 kabupaten yaitu: Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kubu Raya dan Kayong Utara, dengan jumlah kasus gigitan sebanyak 34 kasus, tetapi sampai dengan akhir tahun 2018, penyebarannya dapat dikendalikan.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	6.559.611.732	1.633.043.400	24,80		
		Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (TP APBN-Satker 139128)	4.068.675.000	3.952.739.225	97,10		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP-APBN- Satker 139132)	764.000.000	707.371.100	92,59		
Rata-Rata			11.392.286.732	6.293.153.725	55,24	135,31	80,07

Program yang menunjang sasaran strategis tersebut selain dibiayai melalui APBD, juga dibiayai melalui APBN-TP Kementerian Pertanian RI. Rata-rata realisasi anggaran sebesar 55,24%, dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 135,31%, maka diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 80,07% Hal ini disebabkan peningkatan populasi ternak pada tahun 2017-2018 sebesar 2,73% (1.767.694 ekor). Tiga sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan populasi ternak yaitu bersumber dari APBD dengan realisasi sebesar 24,80%, APBN-TP Kementerian Pertanian RI (Satker 139128) dengan realisasi sebesar 97,10% dan APBN-TP Kementerian Pertanian RI (Satker 139132) dengan realisasi sebesar 92,59%. Sumber pembiayaan dari APBD untuk Program peningkatan produksi dan produktivitas peternakan dapat dilakukan penghematan anggaran (*cost sutting program*) sebesar Rp. 5.099.133.007.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Capaian kinerja untuk populasi ternak sapi potong pada tahun 2018 sebesar 101,40% dari target sebanyak 171.165 ekor, dengan realisasi sebanyak 173.566 ekor. Realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target, disebabkan adanya kegiatan berupa pembinaan kepada petani/peternak. Kegiatan tersebut yaitu Pengembangan ternak didaerah pedesaan/perbatasan/pesisir/kepulauan; Pembinaan, penataan dan pengembangan penyebaran ternak; dan Peningkatan Produksi Peternakan. Populasi ternak sapi potong juga dipengaruhi oleh penambahan populasi ternak melalui kelahiran dan pemasukan ternak.
2. Capaian peningkatan populasi ternak sapi perah sebesar 130,91% dari target sebanyak 55 ekor, dengan realisasi sebanyak 72 ekor. Realisasi ini lebih tinggi disebabkan peternakan sapi perah yang terpusat di Kabupaten Mempawah telah dikembangkan dengan pendekatan agribisnis (usaha sapi Perah).



3. Populasi Kerbau pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 3.638 ekor, dengan realisasi sebanyak 2.449 ekor atau mencapai 67,32%. Belum tercapainya target ini disebabkan Kerbau belum dikembangkan sebagai komoditas utama di Kalimantan Barat, hanya dipergunakan untuk kegiatan budidaya pertanian khususnya mendukung pengolahan lahan tanaman pangan, dan penurunan populasi tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang.
4. Capaian peningkatan populasi ternak kambing sebesar 82,43% dari target sebanyak 195.929 ekor, dengan realisasi sebanyak 161.514 ekor. Guna mencapai peningkatan populasi ini, Pemerintah provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan ternak kambing di daerah pedesaan/ perbatasan/ pesisir/kepulauan, serta Peningkatan Ekonomi Kambing perdesaan berbasis kerakyatan berupa pengadaan kambing.
5. Capaian peningkatan populasi ternak Domba sebesar 372,34% dari target sebanyak 47 ekor dengan realisasi sebanyak 175 ekor. Komoditas ternak Domba walaupun bukan menjadi komoditas unggulan, dan tidak ditenakkan secara khusus oleh masyarakat atau pengusaha di Kalimantan Barat, namun realisasinya sangat tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya kelahiran ternak dan bukan pemasukan domba dari luar daerah.
6. Capaian peningkatan populasi ternak Babi tahun ini sebesar 83,87% dari target sebanyak 648.697 ekor, dengan realisasi sebanyak 544.058 ekor. Rendahnya realisasi populasi ternak babi ini dipengaruhi tingginya pemotongan dan pengeluaran tidak tercatat. Ternak babi merupakan ternak yang lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat karena budaya dan bukan untuk tujuan konsumsi, sehingga menyebabkan perdagangan dan pemotongan tak tercatat masih sangat tinggi.
7. Pencapaian populasi ayam buras pada tahun 2018 sebesar 111,03% dari yang ditargetkan sebanyak 5.529.784 ekor dengan realisasi sebanyak 6.139.850 ekor. Tingginya realisasi populasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: 1) pemasukan ternak dari luar daerah; 2) tingginya minat masyarakat untuk mengembangkannya yang disebabkan oleh perlakuan pengembangan budidaya yang lebih sederhana dan murah, daya hidup tinggi, harga jual tinggi, dan budaya mengonsumsi ayam buras lebih baik dan aman dibandingkan mengonsumsi ayam ras pedaging.
8. Capaian peningkatan populasi ternak ayam ras petelur tahun 2018 mencapai 51,64% dari target sebanyak 4.602.950 ekor, dengan realisasi sebanyak 2.376.995 ekor. Rendahnya realisasi populasi ternak ayam ras petelur disebabkan karena beberapa peternak di Kab. Ketapang, Kubu Raya, sekadau, Sintang, dan Kayong Utara tidak lagi melanjutkan usaha ternak ayam petelur disebabkan karena semakin meningkatnya biaya produksi.
9. Capaian peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging tahun 2018 ini sebesar 152,79% dengan realisasi sebanyak 56.570.468 ekor dari yang ditargetkan sebanyak 37.024.816 ekor. Tingginya realisasi populasi ini disebabkan makin berkembangnya usaha ternak ayam ras pedaging baik kemitraan maupun mandiri.. Dengan tingginya populasi ternak ayam ras pedaging ini menunjukkan bahwa Kalbar merupakan daerah yang potensial memproduksi ayam ras pedaging serta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daerah. Potensi untuk mengirim ayam ras pedaging ke luar Kalimantan Barat dapat direkomendasikan, jika perbandingan ketersediaan dan konsumsi daging ayam ras



melebihi 200%. Selain itu, kabupaten sentra yang mengembangkan peternakan ayam ras pedaging semakin meningkat.

10. Realisasi itik pada tahun 2018 mencapai 59,09 %, dari yang ditargetkan sebanyak 1.024.870 ekor populasi itik, dengan realisasi hanya sebanyak 605.571 ekor. Belum terpenuhinya target ini disebabkan sebagian besar ternak itik dikembangkan untuk tujuan konsumsi dengan budidaya ternak konvensional.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2018 dan Target Jangka Menengah

Tabel 3.28 Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018 Sasaran Strategis 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan ter kendalinya penyakit hewan menular	Jumlah Populasi Ternak	62.952.612 ekor	64.783.893 ekor	66.574.718 ekor	49.201.951 ekor	135,31

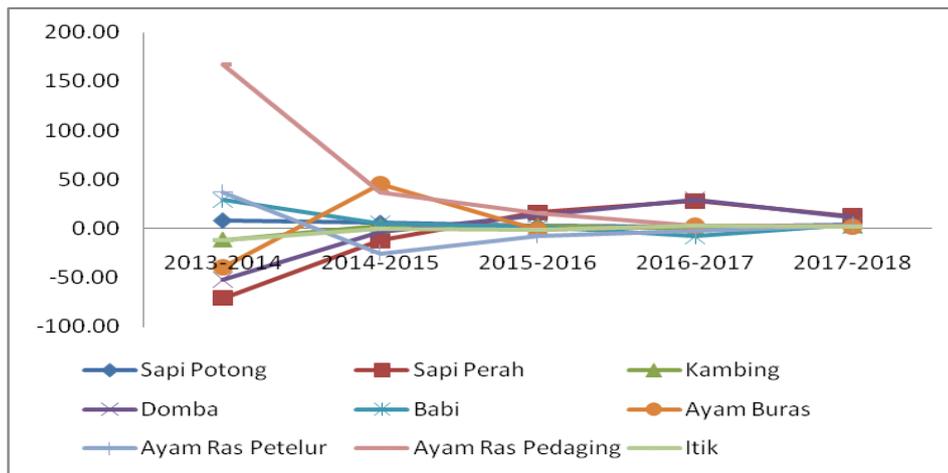
Sepanjang tahun 2013-2018 jumlah populasi ternak menunjukkan tren meningkat hampir pada semua jenis ternak kecuali sapi perah, kambing, dan itik. Penurunan terbesar ketiga jenis ternak tersebut pada tahun 2013-2014.

Tabel 3.29 Pertumbuhan Populasi ternak tahun 2014-2018

Jenis Ternak	Penigkatan/Pengurangan (Ekor)					Pertumbuhan/Penurunan (%)					
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Rata-Rata
Sapi Potong	11,172	8,642	4,095	3,201	6,252	7.97	5.71	2.56	1.95	3.74	4.38
Sapi Perah	-120	-6	7	14	8	-71.01	-12.24	16.28	28.00	12.50	-5.29
Kambing	-19,318	4,215	4,263	172	4,711	-11.54	2.85	2.80	0.11	3.00	-0.56
Domba	-118	-3	15	36	18	-51.98	-2.75	14.15	29.75	11.46	0.13
Babi	120,178	26,880	10,148	-44,506	17,850	29.06	5.04	1.81	-7.80	3.39	6.30
Ayam Buras	-2,714,092	1,851,539	-63,181	168,017	118,917	-40.04	45.55	-1.07	2.87	1.98	1.86
Ayam Ras Petelur	907,616	-857,520	-176,105	-50,359	77,673	36.66	-25.35	-6.97	-2.14	3.38	1.12
Ayam Ras Pedaging	20,996,667	12,469,398	7,297,574	1,732,662	1,528,176	167.36	37.17	15.86	3.25	2.78	45.28
Itik	-76,032	-1,568	-6,379	17,033	14,089	-11.55	-0.27	-1.10	2.97	2.38	-1.51

Untuk melihat perbandingan pertumbuhan ternak di Kalimantan Barat, dapat dilihat dari grafik pada Gambar berikut:

Gambar 3.9 Pertumbuhan Populasi ternak tahun 2013-2018



Dengan pola pertumbuhan/penurunan pencapaian target indikator di tahun 2015-2017 maka estimasi pencapaian target sasaran menunjukkan peluang tercapainya target yang ditetapkan.

1) Target Populasi ternak tahun 2018 dan peluang pencapaian target sebagai berikut:

- Populasi ternak sapi potong dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 3,13%, maka potensi penambahan populasi ternak sapi tahun 2018 sebanyak 175.494 ekor dengan target sebanyak 171.165 ekor, maka estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak sapi potong mencapai 102,53%.
- Populasi ternak sapi perah dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 10,14%, maka potensi penambahan populasi ternak sapi tahun 2018 sebanyak 57 ekor dengan target sebanyak 55 ekor, maka estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak sapi perah mencapai 104,13%.
- Populasi ternak kambing dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 9,76%, maka potensi penambahan populasi ternak tahun 2018 sebanyak 200.683 ekor dengan target sebanyak 195.929 ekor, maka estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak kambing mencapai 102,43%.
- Populasi ternak Domba dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 17,41%, maka potensi penambahan populasi ternak sebanyak 171 ekor dengan target sebanyak 47 ekor, maka estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak domba mencapai 364,71%.
- Populasi ternak Babi dengan tren rata-rata penurunan 2015-2017 sebesar 1,74%, maka populasi ternak babi sebanyak 531.120 ekor dengan target sebanyak 648.697 ekor, maka estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak babi mencapai 81,87 %. Jika pertumbuhan babi di tahun 2018 dapat dijaga pada level 20,01%, maka target populasi ternak babi dapat tercapai.
- Populasi ternak ayam buras dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 2,38%, maka populasi ternak ayam buras sebanyak 631.720 ekor, dengan target sebanyak 5.529.784 ekor, maka estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak ayam buras mencapai 114,68 %.



- Populasi ternak ayam ras petelur dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 0,27%, maka populasi ternak sebanyak ekor dengan target sebanyak 2.533.280 ekor, maka estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak ayam ras petelur mencapai 55,04 %.
- Populasi ternak ayam ras pedaging dengan tren rata-rata pertumbuhan 2015-2017 sebesar 11,43%, maka populasi ternak pada tahun 2018 sebanyak 61.217.314 ekor dan dengan target 37.024.816 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging mencapai 165,34%.
- Populasi ternak itik dengan tren rata-rata penurunan 2015-2017 sebesar 0,16%, maka populasi ternak pada tahun 2018 hanya sebesar 576.064 ekor dan dengan target 1.024.870 ekor, estimasi pencapaian peningkatan populasi ternak itik mencapai 56,21%.

Untuk melihat peluang atau kesenjangan target dengan potensi realisasi populasi ternak tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30 Potensi pencapaian target populasi ternak tahun 2018

Jenis Ternak	Peningkatan/ Pengurangan (Ekor)		Pertumbuhan/Penurunan (%)			Estimasi 2018 (ekor)	Target 2018 (Ekor)	Estimasi Capaian (%)
	2015-2016	2016-2017	2015-2016	2016-2017	Rata-Rata			
Sapi Potong	4.095	6.061	2,56	3,69	3,13	175.494	171.165	102,53
Sapi Perah	7	2	16,28	4,00	10,14	57	55	104,13
Kambing	4.263	26.202	2,80	16,73	9,76	200.683	195.929	102,43
Domba	15	25	14,15	20,66	17,41	171	47	364,71
Babi	10.148	-30.190	1,81	-5,29	-1,74	531.120	648.697	81,87
Ayam Buras	-63.181	341.286	-1,07	5,83	2,38	6.341.720	5.529.784	114,68
Ayam Ras Petelur	-176.105	176.686	-6,97	7,52	0,27	2.533.280	4.602.950	55,04
Ayam Ras Pedaging	8.809.589	1.629.765	19,80	3,06	11,43	61.217.314	37.024.816	165,34
Itik	-35.530	31.662	-6,12	5,81	-0,16	576.064	1.024.870	56,21

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini yakni :

1. Persaingan pemanfaatan lahan dengan aktivitas lainnya. Kebutuhan ketersediaan lahan untuk budidaya ternak ruminansia besar adalah sebesar 1 Ha/ekor.
2. Tidak tersedianya lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas. Sumber pakan ternak berasal dari rumput liar dan bukan rumput yang direkomendasikan sebagai pakan dengan konsentrat nutrisi yang sesuai dibutuhkan untuk perkembangan ternak.
3. Rendahnya kapasitas produksi peternak karena pola pengembangan ternak yang masih konvensional dan rendahnya skala usaha peternakan. Usaha peternakan belum berorientasi agribisnis dan dikembangkan hanya sebagai sampingan dengan kegiatan utama usaha rumah tangga petani lainnya seperti tanaman pangan dan perkebunan.
4. Rendahnya keterampilan budidaya peternakan sehingga sulit mendorong peningkatan populasi dan produksi. untuk sapi dan kerbau sebagian besar peternak



masih mengembangkan ternak dengan pola ekstensif dan semi intensif. Pola ternak tersebut menghambat percepatan peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan.

5. Keterbatasan SDM Teknis seperti Inseminator dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) dalam memantau kebuntingan dan kelahiran ternak. Kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) cukup membantu meningkatkan populasi dan produksi ternak, khususnya ruminansia (sapi/kerbau) melalui proses inseminasi.
6. Sebaran peternak yang sangat besar mempersulit jangkauan pelayanan dan pendampingan usaha peternakan masyarakat. Sedangkan SDM yang tersedia di kabupaten/kota sangat terbatas.
7. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan dan pendampingan bagi peningkatan populasi dan produksi ternak oleh masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada yakni:

1. Mendorong terbangunnya peternakan dalam satu kawasan. Pemetaan kawasan peternakan dengan memperhitungkan dukungan sarana prasarana (lahan HPT, Lahan Penggembalaan, Puskesmas, dll), ketersediaan SDM Teknis seperti penyuluh peternakan, inseminator, petugas PKB dan ATR, Lembaga Permodalan dan pasar.
2. Mendorong Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok ternak yang ada dan telah berkembang melalui pendampingan teknis, peningkatan wawasan dan keterampilan peternakan.
3. Mendorong peternak untuk meningkatkan akses permodalan dan akses informasi pasar sebagai *trigger* usaha ternak oleh masyarakat.
4. Meningkatkan target Introduksi Inseminasi Buatan yang didukung dengan berkembangnya budidaya sapi secara intensif dan semi intensif.
5. Mendorong pengembangan kawasan peternakan dengan cara mengintegrasikan dengan pertanian lainnya (integrasi sawit-sapi, Jagung-Sapi, dll), dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian dan konsentrasi populasi ternak dan peternak.



Sasaran Strategis 9

Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 9

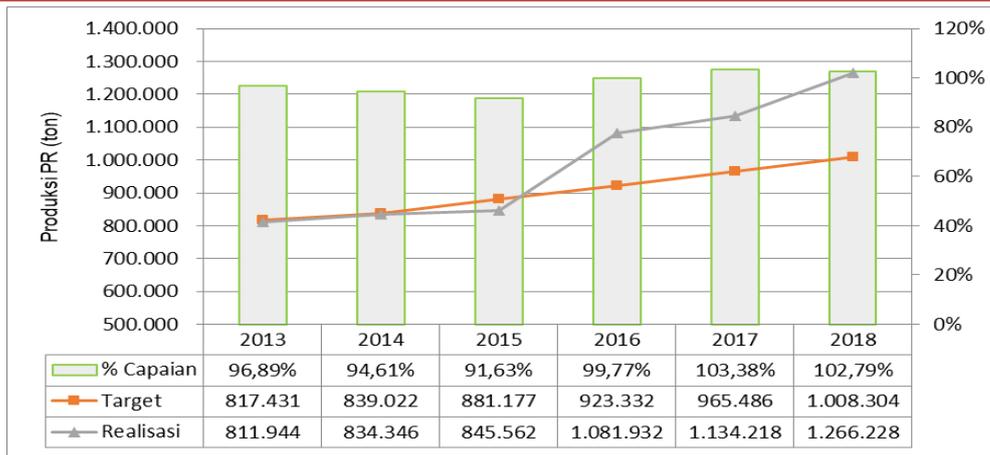
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	726.696,00 ton	2.043.680,00 ton	281

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja jumlah produksi perkebunan besar tahun 2018 adalah sebesar 281%, dari target sebesar 726.696 ton dengan realisasi sebesar 2.043.680 ton yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, sedangkan komoditas karet pada perkebunan besar memiliki capaian yang rendah. Hal ini disebabkan komoditas kelapa sawit masih menjadi primadona yang diminati investor, serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Sementara itu capaian kinerja jumlah produksi perkebunan rakyat tahun 2018 adalah sebesar 126%. Capaian yang sangat tinggi tersebut hampir disemua komoditas perkebunan, kecuali produksi kakao dan produktivitas kelapa sawit yang masuk dalam kategori tinggi. Prestasi ini didukung oleh beberapa faktor antara lain, semakin besarnya komposisi luas tanaman yang menghasilkan masuk dalam usia puncak produksi; peningkatan perawatan kebun; perbaikan penanganan panen dan pengolahan pasca panen.

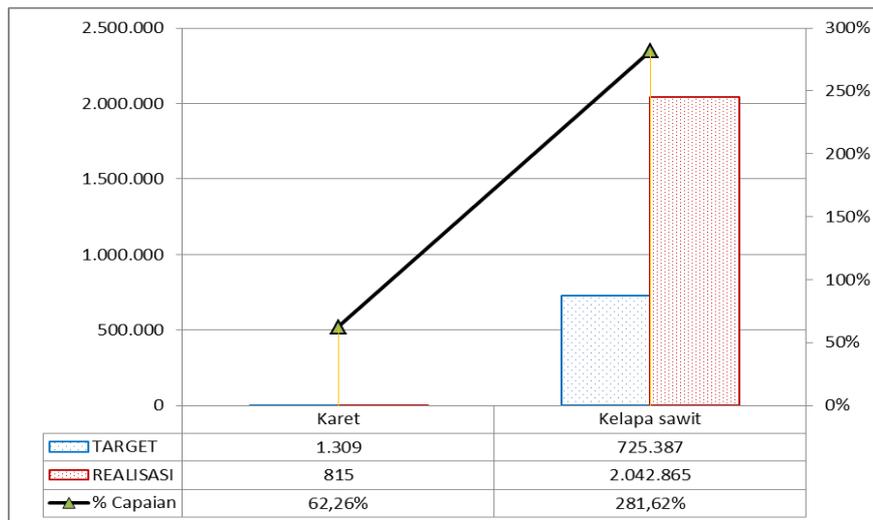
Realisasi produktivitas komoditas unggulan perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 secara keseluruhan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung adanya penambahan alat-alat pengolahan pada beberapa sentra produksi, penambahan luas areal produktif (tanaman menghasilkan) terutama kelapa sawit dan karet rakyat, peningkatan perawatan kebun, perbaikan penanganan panen dan pengolahan pasca panen, meningkatnya pemahaman petani dalam memelihara kebun dan meningkatnya penggunaan benih unggul oleh petani.

Realisasi produktivitas komoditas unggulan perkebunan besar untuk dua komoditi unggulan yaitu karet dan kelapa sawit, menunjukkan peningkatan terutama pada komoditi kelapa sawit. Hal ini didukung oleh meningkatnya realisasi luas tanam perusahaan perkebunan dan luasan areal yang memasuki usia produktif.

Akan tetapi produktivitas perkebunan secara keseluruhan masih berada di bawah standar produktivitas rata-rata nasional, yaitu sebesar 46,05% dan masuk dalam kategori sangat rendah. Dari lima komoditi unggulan yang capaian paling tinggi adalah produktivitas kelapa sebesar 71,75% masuk dalam kategori sedang.



Gambar 3.11. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produksi 5 Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat



Gambar 3.12. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Besar

Realisasi produktivitas yang diperoleh dari rasio antara jumlah produksi dengan luas tanaman menghasilkan pada tahun 2018 seluas 335.621 Ha, lebih tinggi dari target yang direncanakan yaitu seluas 311.386 Ha. Dari luas tersebut terdapat sekitar 20.000 Ha merupakan tanaman yang baru berproduksi dan produktivitasnya masih rendah. Hal ini sangat mempengaruhi nilai produktivitas, karena luasan digunakan sebagai pembagi. Faktor lain yang menjadi penyebab masih rendahnya produktivitas adalah kemampuan petani dalam melakukan pemeliharaan tanaman masih relatif rendah dan adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Karet berupa jamur akar putih.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat	11.447.199.589	10.663.580.929	93,15	281	208,52
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Besar	946.836.192	686.282.427	72,48		
Rata-Rata			12.394.035.781	11.349.863.356	82,81	281	198,19

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 72,48% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 281%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sebesar 208.52%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien dan terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 1.044.172.425,-.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan Besar" dengan indikator kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, diwujudkan melalui Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat (APBD) dengan berbagai kegiatan berupa : pengembangan luas areal komoditi unggulan, pengembangan SDM perkebunan, pengolahan pasca panen dan pemasaran produk perkebunan. Program Peningkatan Investasi Perkebunan, Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Produksi dan Produktivitas, serta dengan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kelas usaha perkebunan; berkurangnya kasus konflik perkebunan; mendorong peningkatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian/keberpihakan pelaku usaha dengan masyarakat sekitar.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target Jangka Menengah

Tabel 3.33 Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dengan target 2018 Sasaran Strategis 9

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan besar	Jumlah produksi perkebunan	1.271.497	1.464.246	2.043.680	726.696	281%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2018 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan dan memenuhi target kinerja daerah. Perkembangan produksi perkebunan besar selama periode 2013-2017 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 total produksi perkebunan besar yaitu sebesar 1.271.497 ton meningkat menjadi sebanyak 1.464.246 ton. Apabila dilihat dari target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, maka nilai



produksi perkebunan besar tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 726.696 ton.

Sedangkan perkembangan produksi perkebunan rakyat selama periode 2013-2018 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 total produksi perkebunan rakyat adalah sebesar 828.387 ton dan meningkat sebesar 36,92% menjadi 1.134.218 ton. Apabila dilihat dari target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, maka nilai produksi perkebunan rakyat tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 1.008.304 ton.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini yaitu sebagai berikut:

1. Lahan marjinal dengan tingkat kesuburan yang rendah masih dominan di Kalbar dan agroklimat utamanya frekuensi curah hujan maupun kelembaban yang tinggi sehingga berpengaruh negatif pada produksi komoditi tertentu
2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), kekeringan dan banjir, kebakaran menyebabkan stagnasi pertumbuhan atau kematian individu atau populasi tanaman masih belum teratasi
3. Terbatasnya tenaga teknis serta personil yang kompeten untuk melakukan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, pengawas benih, pengamat OPT, maupun pelayanan data statistik. Pada sisi lain petani juga terbatas dalam mengakses teknologi dan mengembangkan potensi sumberdayanya
4. Kinerja perkebunan besar yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagian masih rendah dimana realisasi penanaman masih rendah, pemenuhan kewajiban dan kepatuhan masih rendah, serta gangguan usaha dan konflik masih cukup tinggi
5. Keterbatasan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, kios saprodi) di sentra produksi perkebunan menghambat pengembangan produktivitas kebun

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembuatan masterplan pengembangan komoditi unggulan perkebunan di wilayah yang sesuai potensi dan klasifikasi kawasan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan serta mengantisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
3. Optimalisasi peran petugas penyuluh pertanian/perkebunan di lapangan serta membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk lebih fokus dalam upaya pengembangan SDM masyarakat/petani melalui berbagai upaya pemberdayaan yang terkoordinasi dan konsisten.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan program/kegiatan perkebunan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
5. Melakukan revitalisasi peran Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3 Provinsi/Kabupaten) dalam penyelesaian konflik perkebunan serta pengawasan kinerja



perusahaan perkebunan sesuai kewenangan masing-masing di tingkat pusat/provinsi/kabupaten, serta melakukan evaluasi dan penindakan bagi perusahaan perkebunan besar yang melalaikan kewajibannya.

6. Berperan aktif dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan mendorong peningkatan *corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian/keberpihakan pelaku usaha dengan masyarakat sekitar.
7. Membangun UPH baru di sentra produksi perkebunan yang potensial dan Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan infrastruktur pada sentra produksi perkebunan dan akses pendanaan bagi perkebunan rakyat.



Sasaran Strategis 10

Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 10

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	Jumlah Produksi Perikanan	276.477,96	248.698,22	89,95

Jumlah Produksi Perikanan terbagi menjadi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan Budidaya. Produksi perikanan sebagian besar berasal dari perikanan tangkap (laut dan perairan umum). Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi alam/ketergantungan alam (ketersediaan sumberdaya ikan, cuaca dan sebagainya) yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.

Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 mencapai 165.254,96 ton, atau sebesar 86,7 % dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 190.506,96 ton. Sedangkan volume produksi Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 83.227,39 ton atau 97,06 % dari target sebesar 85.971 ton. Dengan demikian jumlah produksi perikanan pada Tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 248.698,22 ton atau tercapai 89,95 % dari target yang ditetapkan sebesar 276.477,96 ton.

Belum tercapainya jumlah produksi perikanan pada Tahun 2018 disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum Tercapainya target ditahun 2018 untuk produksi perikanan Tangkap disebabkan antara lain adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/Permen-KP/2016 tentang tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan ALat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) sehingga mempengaruhi jumlah produksi perikanan. Hal ini disebabkan alat tangkap *trawl* mini atau lampara dasar yang kebanyakan di pergunakan oleh nelayan pesisir pantai tidak dapat beroperasi. Sedangkan penukaran alat penangkapan ikan pengganti yang ramah lingkungan belum terealisasi secara optimal. Sebagai alternatif solusi yang diberikan kepada nelayan yaitu dengan melakukan penggantian alat tangkap terlarang secara bertahap, mengingat penggantian memerlukan anggaran yang cukup besar. Transisi kepada alat/penggantian alat penangkap ikan ramah lingkungan dapat dilakukan secara baik dan dapat meminimalisir dampak permasalahan yang timbul di kalangan nelayan. Sebelum penggantian telah dilakukan sosialisasi, identifikasi calon penerima alat pengganti, pemilihan alat penangkap pengganti yang sesuai dengan keterampilan nelayan dalam menggunakan alat penangkapan ikan, kondisi dan karakteristik nelayan, sasaran ikan yang ditangkap, kondisi dan karakteristik lingkungan dan sebagainya. Solusi yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut berdampak terhadap



minimnya terjadi permasalahan di kalangan nelayan, sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam menyikapi ditetapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- 1.
2. Belum Tercapainya target ditahun 2018 untuk produksi perikanan budidaya disebabkan ;
 - Adanya gagal panen bagi pembudidaya disebabkan adanya hama penyakit ikan adanya perubahan kondisi air akibat cuaca yang tidak menentu (extrim) sehingga menyebabkan kondisi air tidak stabil sehingga banyak ikan yang mati bagi pembudidaya ikan yang menggunakan aliran sungai.
 - Masih kurangnya tenaga penyuluh perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat juga menyebabkan belum berkembangnya potensi budidaya perikanan padahal potensinya sangat besar khususnya untuk budidaya laut;
 - Kesadaran masyarakat untuk melakukan budidaya masih sangat kurang;
 - Ketersediaan lahan yang layak budidaya masih kurang;
 - Informasi pasar untuk masyarakat masih kurang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :

- Mengoptimalkan kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Hama Penyakit dan Residu di Kawasan Usaha Perikanan Budidaya
- Diperlukan percontohan kegiatan budidaya (demplot) untuk masyarakat;
- Diperlukan dukungan dari Pemerintah daerah untuk membantu penyediaan Bibit unggul tahan penyakit dan lahan layak budidaya;
- Pendampingan dan Sosialisasi Akses Pemasaran bagi Kelompok pembudidaya

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.35 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya	928.268.000	804.506.600	86,67	89,94	n/a
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	1.682.679.450	1.452.149.350	86,30		
		Program pengembangan dan peningkatan mutu dan nilai tambah serta optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.056.512.724	714.459.092	67,62		
		Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	515.478.500	488.388.129	94,74		
		Program Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	989.417.000	861.105.677	87,03		
		Rata-Rata	5.172.355.673,50	4.320.608.848,00	84,47		

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 84,47% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 89,95%, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dapat terukur karena capaian kinerja masih dibawah 100%. Namun demikian, pada sasaran ini terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 851.746.825,50.



- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian kinerja produksi Perikanan didukung oleh beberapa Program/kegiatan dan menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja pemerintah daerah adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan Tangkap. Adapun kegiatan yang secara rutin dilaksanakan pada dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti alat tangkap ramah lingkungan, mesin kapal perikanan, alat bantu penangkapan dan kapal perikanan, serta Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan. Sedangkan program/kegiatan perikanan budidaya seperti bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya, bantuan benih, pakan, dan percontohan budidaya perikanan laut yang secara langsung diberikan kepada kelompok masyarakat. Selain bantuan fisik juga di lakukan kegiatan non fisik yang tujuan akhirnya dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya seperti Pembenihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Pemantauan dan Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Pemantauan dan Pengendalian Hama Penyakit dan Residu di Kawasan Usaha Perikanan Budidaya.

Untuk menjamin kontinuitas produksi perikanan, maka dilakukan dengan mengendalikan sarana perikanan tangkap yang meliputi kapal perikanan, alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan dengan harapan produksi hasil tangkapan ikan akan meningkat. Langkah-langkah dilakukan antara lain : 1) memodernisasi perikanan tangkap dengan alat penangkap ikan yang modern dan alat bantu yang efektif dan efisien; 2) trip hari operasi penangkapan ikan yang lebih lama. Selain itu, untuk menjaga kontinuitas produksi perikanan (bahan baku) juga dilakukan dengan pengembangan usaha pembudidayaan ikan secara intensif maupun ekstensif meliputi budidaya ikan air tawar, payau dan laut.

Selain itu guna menjaga kontinuitas serta harga ikan agar tidak menurun pada saat musim ikan, maka perlu adanya sarana penyimpanan ikan/cold storage terutama di lokasi Pelabuhan Perikanan dan sentra-sentra nelayan. Pembangunan cold storage dilakukan secara bertahap, diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang strategis, namun pembangunan dan operasional cold storage ini memerlukan biaya yang cukup besar. Permasalahan utama pembangunan cold storage di sentra-sentra nelayan ini adalah minimnya ketersediaan listrik dengan kapasitas yang cukup memadai untuk mengoperasikan *cold storage*.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K pada bulan Januari 2019. Kedepan pengelolaan kelautan dan perikanan diarahkan berdasarkan dokumen RZWP3K yang telah disusun dalam Peraturan Daerah, agar pemanfaatan sumberdaya ikan tetap lestari dan berkelanjutan, maka pengendalian dan pengawasan akan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam makin ditingkatkan, sehingga pelaku usaha akan semakin tertib dalam pengelolaan sumberdaya alam.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 - 2018 dan target jangka menengah

Tabel 3.36 Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018 Sasaran Strategis 10

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2018
			2016	2017	2018	
10	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	Jumlah Produksi Perikanan	220.937,63 ton	240.294,37 ton	248.698,22 Ton	276.477,96 ton

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2016, dimana jumlah produksi perikanan sebesar 220.937,63 ton, maka di tahun 2017 meningkat sebesar 19.356,74 ton atau 8,05 % dari realisasi sebesar 240.294,37 ton . Di tahun 2018 meningkat sebesar 8.403,85 Ton atau 3,49 % dengan realisasi 248.698,22 ton. Namun jika dibandingkan dengan target Tahun 2018 yaitu sebesar 276.477,96 Ton, maka realisasi belum dapat tercapai sebesar 27.779,74 ton atau sebesar 11,17 % dari target. Hal ini disebabkan dampak dari ditetapkannya Permen KP No. 71/Permen-KP/2016. Namun jika di bandingkan dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 maka jumlah produksi perikanan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Volume produksi perikanan tangkap di tahun 2016 sebesar 185.229,36 Ton di tahun 2017 turun menjadi 162.367,22 Ton kemudian meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 165.254,96 Ton. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka masih belum tercapai. Volume Produksi perikanan tangkap sementara untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun 2018, yaitu sebanyak 190.506,96 ton. Namun demikian data ini bersifat sementara dan masih terus divalidasi Hal ini disebabkan pendataan statistik di pusatkan pada One Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini masih dalam tahap Validasi.

Volume produksi perikanan budidaya sebanyak 15.050,27 ton atau 24,04 % naik menjadi 77.663,86 ton pada Tahun 2017. Kemudian Tahun 2018 Volume produksi budidaya mengalami kenaikan sebesar 83.443,26 ton. Namun jika di bandingkan dengan target jangka menengah masih belum mencapai sesuai target yang ditetapkan. Produksi budidaya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan disebabkan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya ikan yang baik dan banyaknya paket bantuan sarana produksi (benih dan pakan) yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Kabupaten / Kota.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini yakni :

- Permasalahan bidang perikanan tangkap antara lain ; Rata-rata pendapatan nelayan Kalbar masih rendah, Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah, Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas, BBM mahal



dan ketersediaannya tidak merata untuk nelayan pergi melaut, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas serta Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah

- Permasalahan bidang Perikanan Budidaya antara lain; Pendapatan Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah, ketergantungan pada pakan ikan asal pabrikan yang harganya masih mahal ,Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas, Pencemaran dan wabah hama penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya, Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia, Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
- Permasalahan Bidang Pengolahan dan Pemasaran antara lain ; Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk perikanan, Rendahnya kualitas olahan hasil kelautan dan perikanan, Kurangnya diversifikasi olahan hasil kelautan dan perikanan,Banyaknya pengolah yang belum menerapkan sistem jaminan mutu,
- Permasalahan bidang Pesisir dan Pulau-pulau kecil antara lain ; Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun), Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan laut, Tingginya laju abrasi di wilayah pesisir, Fasilitas sarana dan Prasarana untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terbatas, Penataan ruang untuk pengembangan usaha ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal
- Permasalahan bidang Pengawasan antara lain ; Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih marak, Masih terbatasnya SDM Petugas dan sarana prasarana Pengawasan, Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan tindak kejahatan pada sektor kelautan dan perikanan belum optimal

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada yakni:

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui Pembiayaan premi asuransi nelayan, pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, pemberdayaan usaha perikanan tangkap , pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Provinsi serta Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon.
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB), Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut, pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal, peningkatan sarana dan prasarana perbenihan, penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya serta Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui: pengembangan Broodstock Center, pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif



3. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higienis
4. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir serta peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.



Sasaran Strategis 11

Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 11

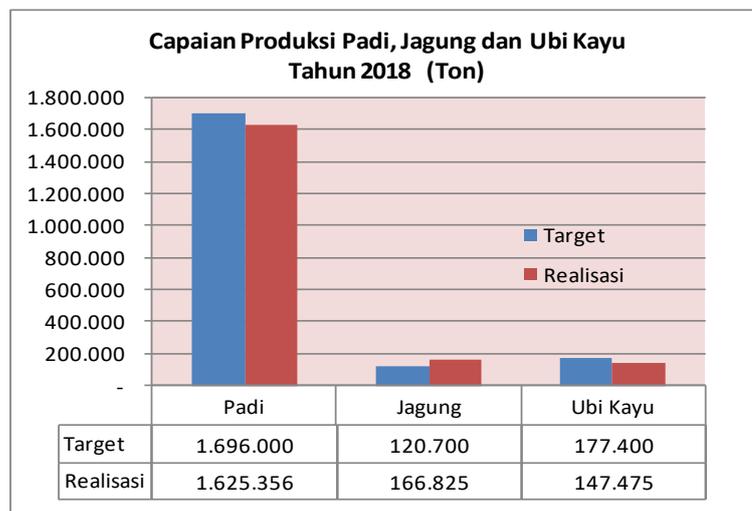
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1) Jumlah Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan			
		a) Padi	2.010.540 ton	1.954.572 ton	97,22
		b) Jagung	1.696.000 ton	1.625.356 ton	95,83
		c) Kedelai	120.700 ton	166.825 ton	138,21
		d) Kacang Tanah	2.360 ton	1.260 ton	53,39
		e) Kacang Hijau	1.080 ton	852 ton	78,89
		f) Ubi Kayu	1.300 ton	1.260 ton	96,92
		g) Ubi Jalar	177.400 ton	147.475 ton	83,13
		• Tanaman Hortikultura	11.700 ton	11.544 ton	98,67
		a) Buah-Buahan	297.450 ton	463.783 ton	155,92
		b) Sayur-Sayuran	230.100 ton	338.326 ton	147,03
		c) Biofarmaka	56.800 ton	112.659 ton	198,34
		d) Tanaman Hias	10.550 ton	12.798 ton	121,31
		2) Nilai Tukar Petani	102,95	93,91	91,22
CAPAIAN KINERJA					114,8%

Capaian Produksi Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja tanaman pangan berdasarkan Angka Ramalan I Tahun 2018 (ARAM I) sebesar 97,22% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk tanaman hortikultura (khususnya buah-buahan, sayuran, dan biofarmaka), berdasarkan Angka Sementara, kinerjanya telah mencapai sebesar 155,92%.

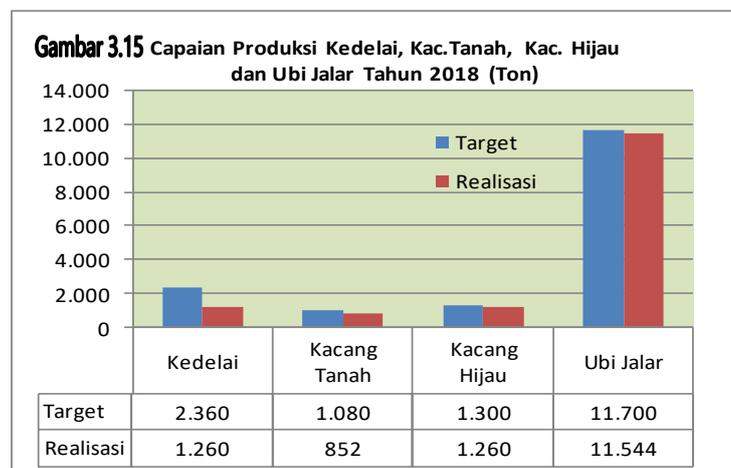
a. Capaian produksi padi, jagung, dan ubi kayu

Guna memudahkan dalam membaca data produksi disajikan diagram batang yang meliputi angka produksi padi, jagung, dan ubi kayu dalam satu diagram, karena perbedaan nilai (kisaran) angka produksi tidak terlalu besar, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:





- Tingkat capaian produksi padi dengan target 1.696.000 Ton GKG, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.625.356 ton GKG atau 95,83% dari target. Pencapaian produksi di pengaruhi oleh Luas panen dan Produktivitas padi itu sendiri, yang sepanjang tahun 2018 berdasarkan angka ramalan (ARAM) I tahun 2018 untuk luas tanam padi melebihi target sebesar 4,71 % dan luas panen melebihi target sebesar 7,92 %, meskipun untuk produktivitas masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian produksi padi menurut ARAM I 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh Luas tanam dan Panen Padi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan terkait produksi padi, mampu mengefisienkan sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya anggaran, sumberdaya aparatur dan non aparatur di lapangan, serta sumberdaya lahan sebagai salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi tercapainya produksi padi. Pada masa yang akan datang, masih sangat terbuka peluang untuk dapat meningkatkan kinerja produksi padi.
 - Tingkat capaian produksi jagung dengan target 120.700 ton pipilan kering, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 166.825 ton pipilan kering, atau 138,21%. Produksi jagung melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan terkait produksi jagung, mampu mengefisienkan sumberdaya yang tersedia termasuk sumberdaya anggaran.
 - Tingkat capaian produksi ubi kayu dengan target 177.400 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 147.475 ton atau 83,13%. Tidak tercapainya target produksi ubi kayu disebabkan kurangnya dukungan dan intervensi kegiatan dalam pengembangan komoditi ini. Sebagian besar pertanaman merupakan swadaya petani. Capaian sebesar 83,13% menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak mencapai target.
- b. Capaian produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan, ubi jalar
Demikian pula komoditi kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar disajikan dalam satu diagram karena perbedaan nilai (kisaran) angka produksi tidak terlalu besar, sebagaimana tercantum pada gambar 3 berikut:

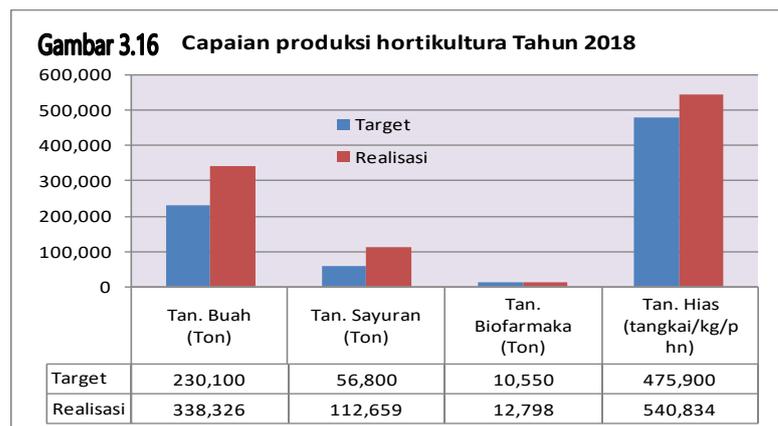




- Tingkat capaian produksi kedelai dengan target 2.360 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.260 ton atau 53,38%. Capaian produksi yang masih jauh dari target yang ditetapkan disebabkan secara spesifik dan karakter tanaman ini cukup sulit dalam pengelolaan di wilayah beriklim tropik seperti Kalimantan Barat. Disamping itu kebijakan terkait kedelai dari mulai pengalokasian, seperti target lokasi, calon petani serta penyaluran sarana dan prasarana sering terlambat sehingga pertanaman kedelai di lapangan tidak dapat terlaksana tepat waktu.
- Tingkat capaian produksi kacang tanah dengan target 1.080 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 852 ton atau 78,88%. Belum tercapainya target produksi kacang tanah disebabkan dukungan dan intervensi aspek anggaran untuk kegiatan pengembangan komoditi ini sangat minim sekali. Selain itu, penyediaan sarana produksi seperti benih sangat terbatas, areal pengembangan hanya spot-spot tertentu dan belum dikembangkan secara luas, sebagian besar pertanaman merupakan swadaya petani.
- Tingkat capaian produksi kacang hijau dengan target 1.300 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.260 ton atau 96,92%. Produksi kacang hijau hampir mencapai target yang ditentukan, hal ini tidak terlepas dari membaiknya harga kacang hijau yang mampu menggerakkan petani untuk pengembangan kacang hijau secara swadaya. Namun untuk masa yang akan datang perlu dukungan teknologi budidaya serta dukungan sarana dan prasaran agar mampu meningkatkan produktivitas dan produksi secara nyata.
- Tingkat capaian produksi ubi jalar dengan target 11.700 ton, berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 11.544 ton atau 98,67%. Capaian produksi ubi jalar hampir 100% meskipun tidak terdapat dukungan anggaran dan intervensi kegiatan terkait pengembangan komoditi ini. Sebagian besar pertanaman merupakan swadaya petani.

Capaian kinerja produksi tanaman hortikultura tahun 2018 berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) telah melebihi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, untuk tanaman buah-buahan, sayuran dan biofarmaka capaian kinerja rata-rata mencapai 155,92% dibandingkan target yang ditetapkan. Capaian produksi yang paling tinggi yaitu komoditi tanaman sayuran (198,34%) dari target.

Berikut disajikan data capaian produksi hortikultura tahun 2018.





- Tingkat capaian produksi buah-buahan dengan target 230.100 ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2018 terealisasi sebesar 338.326 ton atau 147,03% dari target.
- Tingkat capaian produksi sayur-sayuran dengan target 56.800 ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2018 terealisasi sebesar 112.659 ton atau sebesar 198,34%. Capaian melebihi target disebabkan adanya program dan kegiatan khusus terutama tanaman cabe dan bawang melalui UPSUS BABE (Program APBN) yang mampu meningkatkan luas tanam dan panen tanaman sayur-sayuran.
- Tingkat capaian produksi Tanaman Biofarmaka dengan target 10.550 Ton, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2018 terealisasi sebesar 12.798 Ton atau sekitar 121,31%.
- Tingkat capaian produksi Tanaman Hias dengan target 475.900 tangkai/kg/phn, berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2018 terealisasi sebanyak 540.834 tangkai/kg/phn atau 113,64%.
- Secara umum capaian produksi hortikultura rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian produksi hortikultura dipengaruhi oleh luas lahan dan jumlah pohon yang menghasilkan/panen, dimana produksi tanaman hortikultura sangat tergantung pada musim serta teknik budidaya.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator *proxy* untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dan menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. **Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.**

NTP berfluktuasi setiap bulannya. Penurunan NTP umumnya terjadi pada saat panen tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman bahan makanan) maupun tanaman perkebunan rakyat, tetapi naik kembali pada waktu sesudahnya. Meskipun demikian fluktuasi harga komoditas konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal (BPPBM) juga mempengaruhi tinggi rendahnya NTP.

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga, dilihat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2019 Kalimantan Barat sebesar 93,91 poin turun 0,79 persen dibanding NTP bulan Desember 2018 yaitu 94,66 poin. Hal ini disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani turun 0,11 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani naik 0,68 persen.



- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.38 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	86.954.961,225	84.335.282.075	96,99	114,8	17,94
		Program Pengembangan Usaha Agribisnis	899.709.900	853.096.460	94,82		
		Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	6.543.790,150	6.248.313.400	95,48		
		Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian .	2.267.489.174	2.198.480.049	96,96		
		Rata-Rata			96,86		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,32% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 96,66%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kerjanya belum mencapai 100%. Namun demikian, pada sasaran ini terjadi penghematan anggaran (cost cutting program) sebesar Rp. 5.047.719.920,-.

- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja produksi tanaman pangan didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada bidang teknis diantaranya (1) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian (sarana budidaya); (2) Pengembangan kawasan tanaman prioritas (padi dan jagung) ; (3) Pengembangan kawasan tanaman umbi-umbian; (4) Pengembangan Produksi Tanaman Kacang-kacangan ; (5) Pengembangan pasca panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan; (6) Perluasan areal tanam dan pengelolaan lahan; (7) Pengelolaan air irigasi pertanian ; (8) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan Alsintan; (9) Pengelolaan, penyediaan dan pengawasan alsintan, Pupus. Sedangkan kegiatan non fisik terkait sumberdaya manusia pertanian (petani dan petugas) melalui peningkatan kemampuan petani mulai dari segi budidaya pra-panen maupun pascapanen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dilaksanakan melalui penyediaan dan penyaluran bantuan pupuk dan pestisida untuk 14 Kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan petani dan ketersediaan penganggaran.

Dukungan kegiatan Pengembangan kawasan tanaman padi dan jagung untuk peningkatan produksi dilaksanakan melalui demonstrasi penerapan teknologi budidaya, bantuan sarana produksi baik benih, pupuk dan pestisida serta dikawal oleh Penyuluh pertanian. Kegiatan ini merupakan salah satu media pembelajaran bagi petani untuk dapat mempelajari dan mengadopsi teknik-teknik budidaya yang baik dan benar.

Keberhasilan capaian kinerja tanaman pangan juga didukung dengan bergabungnya tenaga-tenaga penyuluh dalam upaya peningkatan produksi. Pada tahun 2018 jumlah penyuluh sebanyak 1.690 orang. Jumlah kelembagaan BP3K sebanyak 145 unit ,Jumlah kelompok tani sebanyak 17.138 . Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh sangat



penting dilakukan agar ke depan lebih mampu berperan dalam pencapaian kinerja terutama peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Keberhasilan capaian kinerja produksi tanaman hortikultura dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya pengembangan kawasan hortikultura sebagai upaya bertambahnya luas tanam buah-buahan seluas 50 ha. Komoditi yang dikembangkan antara lain jeruk sebanyak 2000 btg di Kabupaten Bengkayang, Lengkek sebanyak 2000 btg di Kabupaten Bengkayang, durian di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang, lengkek di Kabupaten Kubu Raya dan jengkol sebanyak 2640 btg di Kabupaten Sambas. Selain pengembangan luas tanam, juga disalurkan bantuan pupuk ke Kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Sambas dalam upaya perbaikan kondisi tanaman dan peningkatan produktivitas kebun yang sudah menghasilkan sehingga produksi buah-buahan dapat meningkat.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dan 2018 dan target jangka menengah

Tabel 3.39 Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018 Sasaran Strategis 11

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET RPJMD 2018
			2016	2017	2018	
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1) Jumlah Produksi Pertanian				
		• Tanaman Pangan				
		a) Padi	1.467.657 ton	1.397.953 ton	1.625.356 ton	1.696.000 ton
		b) Jagung	109.473 ton	151.550 ton	166.825 ton	120.700 ton
		c) Kedelai	2.146 ton	451 ton	1.260 ton	2360 ton
		d) Kacang Tanah	978 ton	654 ton	852 ton	1.080 ton
		e) Kacang Hijau	1.445 ton	1.368 ton	1.260 ton	1.300 ton
		f) Ubi Kayu	160.904 ton	138.469 ton	147.475 ton	177.400 ton
		g) Ubi Jalar	10.578 ton	10.308 ton	11.544 ton	11.700 ton
		• Tanaman Hortikultura				
		a) Buah-Buahan	221.160 ton	331.692 ton	338.326 ton	230.100 ton
		b) Sayur-Sayuran	51.522 ton	109.427 ton	112.659 ton	56.800 ton
		c) Biofarmaka	10.142 ton	12.524 ton	12.798 ton	10.550 ton
		d) Tanaman Hias	457.422 kg/tangkai/pohon	273.986 kg/tangkai/pohon	540.834	475.900 kg/tangkai/pohon
		2) Nilai Tukar Petani	95,58	97,89	93,91	102,95

Kenaikan produksi padi tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya luas tanam dan luas panen, meskipun produktivitas padi masih cenderung rendah. Produktivitas padi dari tahun 2015-2018 cenderung terus menurun. Salah satu penyebabnya adalah penerapan teknologi budidaya terutama pemupukan belum dilaksanakan sesuai anjuran. Selain itu produktivitas lahan juga dipengaruhi oleh penggunaan varietas yang unggul dan bermutu serta adanya pengaruh iklim. Penggunaan benih padi varietas unggul di Kalimantan Barat pada tahun 2018 baru mencapai 81,60%, sisanya sebesar 19,40% masih menggunakan benih lokal.

Selanjutnya komoditas jagung, capaian produksi tahun 2018 cenderung naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula untuk peningkatan produksi jagung selaras dengan kenaikan luas panen dan produktivitas yang didukung melalui bantuan sarana dan prasarana budidaya (benih, pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian (corn seller) baik bersumber dana dari APBN maupun APBD.



Untuk komoditas kedelai, capaian produksi kedelai tahun 2018 (ARAM I) cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan angka tetap (ATAP) 2016 (-41,30%), namun jika dibandingkan dengan produksi kedelai Tahun 2017 capaian tahun 2018 naik sebesar 179,20% dari produksi 451 ton (tahun 2017) menjadi 1.260 ton (Tahun 2018). Keberhasilan kinerja produksi kedelai tahun 2018 (ARAM I), sejalan dengan adanya peningkatan luas panen dan produktivitas. Kondisi tahun 2017 merupakan kondisi produksi kedelai pada titik terendah baik produksi, produktivitas maupun luas panen. Penyebab utama dari kondisi ini diantaranya sentra produksi kedelai di Kalbar masih terbatas pada kabupaten Sambas dan penanaman masih terbatas hanya pada bulan Januari – Maret. Pada tahun 2017 dukungan APBN, pengembangan kedelai seluas 500 ha di 5 kabupaten, namun pelaksanaan sudah di akhir tahun sehingga fasilitasi peningkatan produksi kedelai biasanya menjadi terkendala. Sehingga menjadi carryover produksi yang akan diproduksi tahun 2018. Pengembangan kedelai di wilayah non sentra relative dalam skala kecil dan terkendala pada pemasaran hasil. Selain itu terkait masalah harga yang menurut petani kurang menguntungkan, bahkan sebagian petani di Kabupaten Sambas ada yang beralih ke komoditi kacang hijau selain itu penyebab tidak tercapai target produksi disebabkan pula karena kedelai sering dipanen muda karena memberikan nilai jual yang lebih tinggi.

Selanjutnya kinerja produksi Kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar tahun 2018 (ARAM I), cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016, produksi tahun 2018 masih lebih rendah, cenderung menurun. Sedangkan kinerja produksi kacang hijau tahun 2018 (ARAM I) cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Produksi tanaman kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau cenderung fluktuatif karena sangat minim bahkan tidak ada intervensi khusus dari program/kegiatan serta anggaran untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut. Sebagian besar merupakan tanaman swadaya petani tanpa ada bantuan dan minim pembinaan dari pemerintah.

Berdasarkan Angka Sementara tahun 2018, capaian kinerja produksi tanaman hortikultura (Buah-buahan, Sayuran, dan Biofarmaka), naik rata-rata sebesar 2,24% jika dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, capaian 2018 turun (-6.50%), namun jika dibandingkan tahun 2016, rata-rata capaian kinerja tahun 2018 naik signifikan sebesar 63,98%. Peningkatan kinerja produksi hortikultura (buah, sayuran dan biofarmaka) tahun 2018 dipengaruhi adanya peningkatan luas panen dan kebun buah yang lebih produktif. Peningkatan luas tanam dan luas panen komoditas sayuran serta biofarmaka didukung anggaran dari APBN melalui UPSUS Babe (Bawang dan cabe). Selain itu, pengaruh iklim juga sangat berpengaruh terhadap produksi hortikultura karena cuaca berkaitan erat dengan proses pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman hortikultura termasuk ketersebiaan air.

Selanjutnya untuk komoditas tanaman hias, angka sementara tahun 2018 menunjukkan kinerja produksi lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2016 (18,24%) dan tahun 2017 (naik 97,39%). Komoditas tanaman hias sangat dipengaruhi oleh selera konsumen yang mengikuti trend sehingga produksinya fluktuatif tergantung permintaan pasar. Komoditas hortikultura terutama tanaman hias lebih dominan dihasilkan oleh hobbies dan agribis serta pegiat secara swadaya sehingga sedikit sekali intervensi dari program/kegiatan



pemerintah. Namun justru stakeholder tanaman hias lebih berkembang dan banyak diminati karena nilai estetika yang makin beraneka ragam seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di berbagai bidang dalam mendukung berkembangnya agribisnis florikultura (tanaman hias).

Tabel 3.40
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2013-2018

Uraian	Indeks				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP)	98.92	98.70	97.34	94.40	95,42
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	104.64	103.31	103.04	101.09	100,76
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	92.83	93.38	91.46	97.89	94,44
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	95.07	95.49	95.38	93.95	94,26
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	98.65	100.01	102.59	102.03	104,92
NTP	96.63	96.73	95.58	96.67	93,91

Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2019

- NTP Tanaman Padi dan Palawija (NTPP) tahun 2018 sebesar 95,42 poin, naik 1,02 poin dibanding 2017.
- NTP Hortikultura (NTPH) tahun 2018 sebesar 100,76 poin, turun 0,33 poin jika dibanding 2017.
- NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 2018 sebesar 94,44 poin turun 3,45 persen dibanding tahun 2017.
- NTP Peternakan (NTPT) Januari 2019 sebesar 95,33 poin, sama dengan bulan Desember 2018.
- NTP Perikanan (NTPN) Januari 2019 108,22 poin, naik 1,23 persen dibanding Desember 2018.
- NTP Perikanan Tangkap Januari 2019 113,47 poin, naik 2,55 persen dibanding Desember 2018.
- NTP Perikanan Budidaya Januari 2019 100,30 poin, turun 0,94 persen dibanding Desember 2018.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target dan kinerja secara nasional

Tabel 3.41 Perbandingan kinerja tahun 2018 dengan target nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL	REALISASI (ARAM I)	%
12.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1) Jumlah Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan	2.709.073	1.954.572	72,15
		a) Padi	1.620.000	1.625.356	100,33
		b) Jagung	353.000	166.825	47,26
		c) Kedelai	1.900	1.260	66,31
		d) Kacang Tanah	4.633	852	18,39
		e) Kacang Hijau	3.231	1.260	38,99
		f) Ubi Kayu	693.982	147.475	21,25
		g) Ubi Jalar	32.326	11.544	35,71
		2) Nilai Tukar Petani	103,33	93,91	90,88

Berdasarkan tabel di atas, Capaian kinerja produksi tanaman pangan rata-rata produksi mencapai 72,15%. Capaian kinerja produksi padi melampaui target nasional sebesar 100,33%. Sedangkan capaian produksi komoditas lainnya sangat jauh dibawah target nasional yaitu rata-rata di bawah 50%, hanya komoditi kedelai yang capaian produksinya mampu mencapai 66,31% dari target nasional. Sementara itu untuk komoditas tanaman hortikultura secara



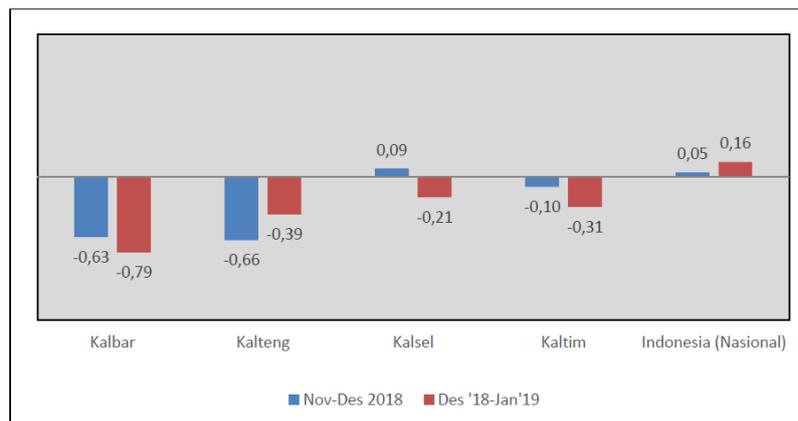
nasional tidak memberikan target secara detail pada tiap provinsi. Target nasional untuk tanaman hortikultura dibuat dalam bentuk global tiap komoditi sehingga capaian kinerja produksi tanaman hortikultura 2018 tidak bisa dibandingkan dengan target nasional.

Apabila dibandingkan Nilai Tukar Petani (NTP) antar provinsi di Pulau Kalimantan dari empat provinsi dan NTP Nasional yang dilaporkan pada bulan Januari Provinsi Kalimantan Barat turun 0,79 persen, NTP Kalimantan Tengah turun 0,39 persen, NTP Kalimantan Selatan turun 0,21 persen, dan NTP Kalimantan Timur turun 0,31 persen, Sedangkan NTP Indonesia (Nasional) naik 0,16 persen. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Perbandingan Nilai Tukar (NTP) November-Desember 2018 dan Desember-Januari 2019
Di Pulau Kalimantan dan Nasional
(2012 = 100)

NO	URAIAN	N T P			Perubahan (%)	
		November 2018	Desember 2018	Januari 2019	November-Desember 2018	Desember 2018- Januari 2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Kalimantan Barat	95,26	94,66	93,91	-0,63	-0,79
2	Kalimantan Tengah	95,65	95,02	94,64	-0,66	-0,39
3	Kalimantan Selatan	95,33	95,43	95,22	0,09	-0,21
4	Kalimantan Timur	94,57	94,48	94,18	-0,10	-0,31
5	Nasional	103,12	103,16	103,33	0,05	0,16

Persentase Perubahan NTP November-Desember 2018 dan Desember 2018-Januari 2019
di Empat Provinsi di Pulau Kalimantan dan NTP Indonesia



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sumberdaya Lahan

- Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. Dari potensi lahan sawah di Kalbar seluas 529.762 Ha (SP lahan 2017) yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman padi baru seluas 368.728 Ha (69,60%), dan masih terdapat sawah seluas 141.935 Ha (26,79%) yang belum dimanfaatkan.



- Dari luas areal tanam padi 368.728 Ha, yang ditanami 2 kali setahun baru mencapai 136.473 Ha (37.01%).
- Ancaman konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun alih fungsi dari sawah ke non pangan.

2. Infrastruktur Pengairan dan Alsintan (Alat mesin pertanian)

- Keterbatasan infrastruktur seperti Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jalan usaha tani (JUT), saluran drainase dan pintu air. Infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi optimal sehingga menyebabkan indeks penanaman rendah dan sebagian besar sawah hanya ditanam 1x setahun.
- Masih kurangnya ketersediaan alsintan seperti hand tracktor maupun alsintan pasca panen berupa power thresher, dryer, corn seller maupun Rice Milling Unit (RMU). Ketersediaan alat mesin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Keterbatasan alat mesin pasca panen seperti power thresher menyebabkan petani harus antri dalam melaksanakan panen, terkadang terlambat sehingga kualitas produksi yang dihasilkan menurun. Alat mesin pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil tanaman yang berpengaruh pada harga jual produk.

3. Penerapan Teknologi Usaha Tani

- Transfer teknologi budidaya ke petani belum berjalan optimal, sehingga sistem budidaya sebagian masih konvensional.
- Sebagian besar petani masih belum menerapkan sistem pemupukan berimbang baik jenis maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat.
- Penggunaan benih lokal masih tinggi (>20%), ketersediaan benih lokal masih sangat terbatas.
- Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) sehingga luas serangan OPT masih cukup tinggi (>4% per tahun)

4. Mentalitas dan Kelembagaan Petani

- Sebagian besar petani padi masih bersifat subsisten (swasembada), berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
- Ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah
- Minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin berkurang karena tersedianya alternatif kerja di sektor lain

5. Organisasi Tani

- Kelompok tani didominasi kelas pemula (77,56%)
- Pemberdayaan alsintan melalui pola Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) masih belum optimal.
- Kapasitas poktan dan gapoktan belum optimal

6. Kebijakan

- Kebijakan revisi anggaran juga berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan
- Pelaksanaan administrasi kegiatan yang terkendala, seperti proses pelelangan, pengadaan barang dan jasa serta bantuan sosial (banpem) baik berupa transfer



barang maupun transfer uang menyebabkan distribusi sarana produksi menjadi terlambat sampai ke petani penerima. Adanya kasus tidak mempunyai pihak ke-3 dalam penyediaan dan distribusi benih maupun pupuk sangat berpengaruh pada rencana tanam dan kegiatan budidaya petani sehingga pencapaian produksi juga menjadi terhambat.

7. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- Tingkat kehilangan hasil (losses) relatif masih tinggi akibat masih kurangnya ketersediaan alat mesin pasca panen.
- Masih rendahnya kualitas SDM petani dalam penganekaragaman hasil melalui pengolahan hasil.
- Belum jelasnya Value chain berbagai komoditas strategis sehingga perkembangan agribisnis lambat.
- Kegiatan pemasaran sebagian besar masih dilakukan secara perorangan, tidak melalui kelompok atau badan usaha.
- Agroindustri yang ada di Kalbar sebagian besar masih bersifat home industri sehingga sangat diperlukan investor untuk pengembangan dalam skala luas.
- Terjadinya inefisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang sehingga cenderung merugikan petani.
- Teknologi pengolahan pascapanen belum berkembang/belum tersedia terutama komoditas hortikultura

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Analisis :

1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

- Optimalisasi potensi lahan sawah melalui identifikasi lokasi lahan-lahan yang berpotensi dilaksanakan tanam 2 kali setahun, sehingga dapat meningkatkan luas tanam dan luas panen diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya.
- Penyediaan benih unggul dengan pola subsidi benih maupun penanaman padi varietas unggul secara swadaya.

2. Infrastruktur dan Alsintan

- Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.
- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan usaha tani tahun 2018 sepanjang 80,8 km di 14 kab/kota.
- Pada tahun 2018 upaya mengoptimalkan potensi lahan sawah dilakukan melalui kegiatan pengelolaan air di tingkat usaha tani, diantaranya berupa pembangunan embung (12 unit), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jaringan irigasi sepanjang lebih dari 18 km.



- Penyediaan alsintan berupa handtracktor dan cultivator baik melalui dana APBN maupun APBD, serta meningkatkan pemberdayaan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di kelompok tani melalui Pelatihan.
- Pengembangan alat mesin pasca panen yang diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi dan jagung berupa power thresher, corn seller, dryer dan Rice Milling Unit (RMU).

3. Penerapan Teknologi Usaha Tani

- Pengembangan kawasan padi, jagung dan aneka kacang/umbi melalui dana APBD berupa bantuan sarana produksi pupuk, pestisida dan pembenah tanah, dan lain-lain pada 14 kabupaten/kota.
- Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui penerapan teknologi usaha tani padi sub optimal, padi gogo, padi inbrida, padi khusus, dan mina padi seluas 160.095 ha melalui dana APBN.
- Sosialisasi penggunaan benih bermutu varietas unggul melalui demplot (demplot benih unggul) serta penyediaan benih unggul dengan pola subsidi benih.
- Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-I).

4. Mentalitas dan Kelembagaan petani

- Peningkatan kapasitas poktan/gapoktan melalui diklat pertanian agar poktan kuat, mandiri dan berkembang.
- Pelatihan agribisnis dalam merubah paradigma petani dari subsisten ke agribisnis serta mengubah mindset agar tidak tergantung pada bantuan pemerintah.
- Pembinaan yang intensif terhadap kelompok-kelompok UPJA yang telah dibentuk agar dapat meningkatkan kemampuan / kinerja kelompok dalam pendayagunaan dan pengembangan alsintan.
- Memberikan apresiasi melalui penghargaan poktan berprestasi.

5. Kebijakan

- Usulan kebijakan harga yang berpihak pada petani.
- Penyusunan perencanaan dan aturan pelaksanaan program yang fleksible dalam meminimalisir kendala – kendala dalam pelaksanaan program.

6. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- Penyediaan alat mesin pasca panen berupa power thresher (padi) corn seller (jagung) untuk mengurangi kehilangan hasil (losses) saat perontokkan.
- Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang intensif bagi petani agar terampil dalam penguasaan teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani melalui produk olahan.
- Melakukan kegiatan pemasaran melalui kelompok/ suatu badan usaha, sehingga pemasaran tidak hanya bersifat domestik tetapi memiliki akses ke luar daerah.
- Memfasilitasi pertemuan petani dengan pengusaha/stake holders sehingga terjalin kemitraan yang saling menguntungkan terutama dalam penyediaan modal usaha maupun pemasaran hasil.



Sasaran Strategis 12

Peraturan yang mendukung iklim investasi

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peningkatan Nilai Investasi	19,50 T	13,18 T	67,59%

Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perekonomian daerah sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan investasi melalui regulasi, diantaranya kemudahan serta efisiensi waktu dalam mengajukan perijinan tanpa menghilangkan dan melanggar aturan yang berlaku. Apabila melihat dari target indikator dalam RPJMD Perubahan Tahun 2013-2018, maka Peningkatan Nilai Investasi belum mencapai target yang ditetapkan.

Nilai realisasi investasi Kalimantan Barat pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 13,18 Triliun dengan komposisi PMDN sebesar Rp 6,59 Triliun dan PMA sebesar Rp. 6,59 Triliun, dan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 29.674 orang. Nilai realisasi dan serapan tenaga kerja tahun 2018 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.43 : REALISASI PROYEK PMDN / PMA MENURUT KAB / KOTA DI KALIMANTAN BARAT PERIODE JANUARI - DESEMBER 2018

NO.	KABUPATEN/KOTA	PMA				PMDN			
		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US\$.Ribu)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (Rp. Juta)	TENAGA KERJA	
				INDONESIA	ASING			INDONESIA	ASING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kota Pontianak	53	28.985,90	231	2	33	278.660,90	775	-
2	Kota Singkawang	-	-	-	-	12	13.639,50	15	-
3	Kabupaten Landak	62	16.778,90	1.185	5	38	1.189.330,80	260	-
4	Kabupaten Bengkayang	6	21.678,10	925	366	16	135.866,00	886	-
5	Kabupaten Mempawah	35	24.169,10	325	14	46	352.009,60	350	3
6	Kabupaten Sambas	23	1.772,90	11	-	12	355.494,30	1	-
7	Kabupaten Sanggau	61	13.731,60	78	-	39	602.454,00	1.966	-
8	Kabupaten Sintang	48	4.291,70	1.047	4	47	688.509,70	670	-
9	Kabupaten Kapuas Hulu	1	-	-	-	87	469.317,70	4.723	-
10	Kabupaten Ketapang	284	375.356,70	10.604	12	71	693.985,80	1.284	-
11	Kabupaten Sekadau	19	1.594,40	-	-	16	798.986,00	645	-
12	Kabupaten Melawi	24	279,80	-	-	6	29.687,90	743	-
13	Kabupaten Kayong Utara	6	2,60	-	-	-	-	-	-
14	Kabupaten Kubu Raya	31	3.296,90	429	5	172	983.441,90	2.110	-
JUMLAH		653	491.938,60	14.835	408	595	6.591.384,10	14.428	3

PMA/PMDN-Kab/kota
Kurs PMA = Rp. 13.400



- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.44 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Pengelolaan Investasi	1.974.561.970	1.935.346.005	98,01	67,59	-

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,01% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 67,59%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya belum tercapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut yaitu melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, Kegiatan Rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN, Kegiatan Pemantauan Investasi Perizinan dan Non Perizinan.

Mengacu kepada kewenangan yang dimiliki provinsi di bidang penanaman modal, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemantauan perizinan dan non perizinan, pemantauan pelaksanaan penanaman modal, dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal di 14 Kabupaten/Kota dengan beberapa langkah antara lain :
 - 1) Peningkatan program pendampingan bagi perusahaan terkait pengisian LKPM dan pemberian surat peringatan bagi perusahaan yang lalai dalam kewajibannya melaporkan LKPM
 - 2) Peningkatan frekuensi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai penanam modal
 - 3) Pemberian surat pemberitahuan kepada perusahaan tertentu tentang Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang telah habis masa berlakunya
 - 4) Melaksanakan Berita Acara Pengawasan (BAP) terhadap proyek-proyek penanaman modal
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Perizinan PMDN yang diterbitkan oleh Provinsi Kalbar melalui SPIISE pada tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) izin, dengan nilai rencana investasi sebanyak 15 proyek sebesar Rp 2,29 Triliun.
 - 2) Jumlah perizinan PMA pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh BKPM RI melalui SPIISE PTSP Pusat adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) izin, dengan nilai rencana investasi sebanyak 30 proyek sebesar US\$ 488,7 Juta.
 - 3) Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Barat
Realisasi Investasi didasarkan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib disampaikan semua investor yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal dari Pemerintah. LKPM itu sendiri merupakan sumber informasi atas tahapan kegiatan nyata yang dilakukan oleh perusahaan/investor



dalam merealisasikan rencana investasinya baik dalam bentuk administratif (berbagai jenis perizinan) maupun dalam bentuk fisik (pengadaan lahan, gedung, mesin dan peralatan) sampai perusahaan tersebut siap melakukan produksi komersial. Sampai dengan Desember tahun 2018, LKPM yang telah masuk adalah sebanyak 1.248 laporan proyek dengan nilai realisasi investasi Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp. 13,18 Triliun dengan pembagian PMDN sebesar Rp 6,59 Triliun dan PMA sebesar Rp. 6,59 Triliun, dan dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 29.674 orang.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 - 2018 dan target 2018

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peningkatan Nilai Investasi	17,78 T	19,96 T	13.18 T	19,50 T	67,59

Realisasi investasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp 19,96 Triliun dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar Rp 13,18 Triliun sehingga terjadi penurunan realisasi investasi sebesar 33,97%. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana capaian realisasi investasi sebesar Rp 17,78 T, terjadi penurunan sebesar 25,87%.

Dengan capaian tersebut maka nilai kumulatif PMDN dan PMA sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46 : REALISASI KUMULATIF PERKEMBANGAN PMDN dan PMA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 – 2018

NO	TAHUN	REALISASI INVESTASI	
		PMDN	PMA
		(RP Triliun)	(\$US Juta)
1	2013	17,26	2.697,82
2	2014	25,23	3.663
3	2015	31,37	4.998,72
4	2016	40,38	5.629.44
5	2017	52,76	6.197,88
6	2018	59,35	6.689,82

Keterangan : Data sampai dengan Desember 2018 DPMPTSP Prov. Kalbar

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan Target Nasional

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan Target Nasional Sasaran Strategis 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	TARGET NASIONAL
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peningkatan Nilai Investasi	13,18 T	18,8 T

Realisasi kinerja tahun 2018 dengan indikator peningkatan nilai investasi belum mencapai target yang ditetapkan oleh BKPM RI, sebesar Rp. 18,8 Triliun. Sedangkan capaian realisasi investasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar Rp 13,18 T atau 67,59%.



d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Iklim Investasi di Kalbar belum sepenuhnya mendukung hilirisasi industri antara lain disebabkan oleh faktor infrastruktur wilayah dan ketersediaan energi listrik;
2. Fluktuasi nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global; terjadinya negatif neraca perdagangan; perang dagang Amerika Serikat antara R.R Tiongkok dan Negara lain sehingga menyebabkan investor bersifat "wait and see" dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan;
3. Transisi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengalami kendala seperti:
 - a) Pelaku usaha masih beradaptasi dengan aplikasi *Online Single Submission* (OSS);
 - b) Pemerintah Daerah masih menyiapkan infrastruktur (sistem informasi/aplikasi) pendukung pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS);
 - c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur yang melaksanakan tugas di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
4. Sektor pendukung utama dalam realisasi investasi di Kalimantan Barat adalah sektor perkebunan kelapa sawit, yang pada kenyataannya telah dilakukan moratorium oleh Pemerintah sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Proyek-proyek Strategis Nasional di wilayah Kalimantan Barat yaitu Kawasan Industri Ketapang di Kabupaten Ketapang, Kawasan Industri Mandor di Kabupaten Landak, Kawasan Ekonomi Khusus Pelabuhan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah dan Kawasan Ekonomi Khusus Smelter di Kabupaten Ketapang secara bertahap sudah mulai dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tambahan realisasi investasi tidak terlalu besar pada tahun 2018.
6. Tambahan realisasi investasi oleh pelaku usaha sangat tergantung pada faktor seperti:
 - a) Pemilik modal yang sering kali mengalami perubahan pemegang saham sehingga mengakibatkan tidak lancarnya permodalan untuk kegiatan suatu proyek
 - b) Ketersediaan Tenaga kerja lokal yang tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai rencana penggunaan tenaga kerja
 - c) Permasalahan Lahan yaitu adanya tumpang tindih lahan perusahaan dengan areal penggunaan lainnya seperti Hutan Lindung, Pemukiman dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
7. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online ke DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP Kabupaten/Kota;
8. Terjadinya kesenjangan antar minat investasi dengan realisasi.



9. Pembagian Kewenangan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga cukup sulit pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim investasi di Kalbar melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara dan ketersediaan energi listrik
2. Mendorong proyek-proyek investasi memiliki perizinan investasi melalui OSS serta melakukan konsultasi dan pendampingan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) terhadap para pelaku usaha
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data dengan perangkat daerah di Kabupaten/ Kota terkait dengan laporan PMDN yang perizinannya dikeluarkan oleh masing-masing daerah
4. Melakukan kajian terkait data potensi investasi daerah di luar sektor perkebunan yang bisa ditawarkan kepada investor
5. Meningkatkan frekuensi pemantauan, pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan khususnya terkait dengan penyusunan LKPM dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai penanam modal
6. Mengintensifkan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, sehingga realisasi proyek atas izin prinsip yang telah dikeluarkan dapat lebih ditingkatkan
7. Perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) agar diberikan sanksi yang lebih tegas dan jelas (salah satunya melalui publikasi daftar perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Media Nasional)
8. Mengintensifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung di lapangan terkait dengan penyusunan LKPM.



Sasaran Strategis 13

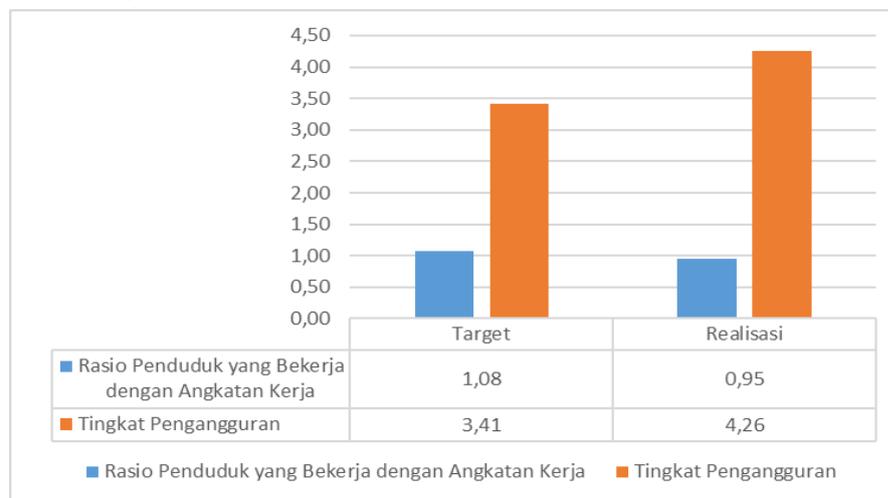
Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,08	0,95	87,96%
		2) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK	65 KK	18,57%
Capaian Kinerja					53,27%

Pada sasaran strategis tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



- 1) Target rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja sebesar 1,08, dengan realisasi sebesar 0,95 (capaian 87,96 persen). Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2018 sebanyak 2.346.881 orang dan jika dibandingkan dengan Agustus 2017, penduduk yang bekerja naik sebanyak 43.683 orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja Tahun 2018 sebanyak 2.451.000 orang dan jika dibandingkan dengan Agustus 2017, angkatan kerja naik sebanyak 41.000 orang.

Pada bulan Agustus 2018 penyerapan tenaga kerja di sektor Pertanian sebesar 50,86 persen (1.195.545 orang), sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi sebesar 16,27 persen (378.009 orang). Sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 13,16 persen (309.596 orang). Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang tertinggi adalah Kabupaten Sanggau sebesar 13,57 persen (162.201 orang) dan Kabupaten Sintang sebesar 12,02 persen (145.808 orang).

Sementara penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi terbesar masih di daerah perkotaan yaitu Kota Pontianak sebesar 24,57 persen (92.889 orang) dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 10,91 persen (37.1941.4643 orang). Sebaliknya yang terendah penyerapannya adalah Kabupaten Kayong Utara dan Sekadau hanya sebesar 1,81 persen (6.836 orang) dan 1,92 persen (7.243 orang). Untuk sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan penyerapan terbesar terdapat di



Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya masing-masing sebesar 20,07 persen (68.341 orang) dan 11,35 persen (35.137 orang). Sebaliknya yang terendah penyerapannya adalah Kabupaten Kayong Utara dan Sekadau hanya sebesar 2,18 persen (6.741 orang) dan 2,53 (7.838 orang).

- 2) Target jumlah kualitas permukiman dan calon transmigrasi sebesar 350 KK, tercapai sebanyak 65 KK (capaiannya sebesar 18,57 persen).

Capaian kinerja permukiman dan calon transmigrasi pada Tahun 2018 hanya sebesar 65 KK atau 18,57%. Hal ini disebabkan oleh:

1. Pembagian alokasi penempatan transmigrasi ditentukan oleh Direktorat Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) sesuai hasil penjaringan program.
2. Pencadangan kawasan/lahan permukiman transmigrasi diusulkan oleh Kabupaten masih banyak bermasalah atau belum clear and clean.

Program tranmigrasi diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan Pemerintah Provinsi hanya memfasilitasi usulan ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Cq. Direktorat Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans).

Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2018 yang terealisasi sebanyak 65 Kepala Keluarga/207 jiwa, sebagai berikut :

1. Lokasi Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) Sebanyak 25 KK/101 jiwa.
2. Lokas UPT Tanjung Satai SP. 2 Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara sebanyak 40 KK/106 jiwa terdiri dari Transmigran Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 12 Kepala Keluarga, Transmigran Penduduk Asal (TPA) sebanyak 28 Kepala Keluarga (Jawa Tengah 10 Kepala Keluarga, Jawa Barat 5 Kepala Keluarga, Yogyakarta 8 Kepala Keluarga dan Jawa Timur 5 Kepala Keluarga).
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang menjadi binaan PKP2Trans melalui Provinsi sebanyak 9 (sembilan) Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang berada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.49 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.567.794.430	1.424.480.594	90,85	53,27%	
		Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja	292.042.650	225.770.433	77,31		
		Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	291.147.124	241.712.148	83,02		
Rata – Rata					83,79	53,27	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83,79 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 53,27%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi



penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Namun pada sasaran strategis ini terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 259.021.029,-.

Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang terampil hingga dapat bekerja pada sektor formal dan informal guna mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki 7 (tujuh) lembaga pelatihan yang didukung oleh 49 instruktur pelatihan kerja dan 3 instruktur produktivitas. Diharapkan melalui berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi dapat mencetak ribuan tenaga kerja terampil dan ahli yang bekerja diperusahaan dan penciptaan wirausaha baru.

Selain itu untuk membantu penyerapan lulusan oleh Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat menyediakan layanan Kios "3 in 1" yaitu bentuk pelayanan dalam mengakses lowongan pekerjaan secara online yang dapat dimanfaatkan oleh lulusan maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Dari sisi personil, masyarakat pencari kerja dan perusahaan dapat menggunakan peran para pejabat fungsional yaitu pengantar kerja selaku fasilitator dalam pemenuhan lowongan pekerjaan. Kemudian dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian informasi pelatihan, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, serta terlaksananya sinergisitas program kerja antara dunia industri, dunia usaha dan lembaga pelatihan kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, dan guna penyiapan tenaga kerja yang kompeten, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 702/DISNAKERTRANS/2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Industri Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- 1. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi**

Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) penempatan transmigrasi dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antar daerah pengirim dan penerima transmigrasi. Namun dalam pelaksanaannya sampai akhir bulan Desember 2018 tidak tercapai kesepakatan dikarenakan landasan hukum antar daerah pengirim transmigrasi berbeda. Pemerintah Provinsi Jateng, Jabar, Jatim dan DIY mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah. Sementara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempedomani PP Nomor 50 Tahun 2007 yang telah di ubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

- 2. Monitoring dan Konsultasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran**

Kegiatan monitoring dan konsultasi pendaftaran dan seleksi calon transmigran dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sintang sebagai upaya penyeleksian calon transmigran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil seleksi calon transmigran sesuai dengan harapan dan dapat menjalankan program transmigrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

- 3. Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi**

Paska penempatan transmigran perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap warga transmigran yang telah ditempatkan sebagai upaya untuk

mengetahui perkembangan warga transmigran dan hasil evaluasi akan menjadi bahan kelanjutan program transmigransi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 - 2018 dan target jangka menengah

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	1) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	0,96	0,96	0,95	1,08	87,96
		2) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	371	170	65 KK	350	18,57



1. Indikator Rasio Penduduk Bekerja dengan angkatan kerja ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 1,08 dan tercapai 0,95. Kondisi ini sama dengan kondisi pada Tahun 2016 dan 2017. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 1,08, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 87,96 persen.
2. Indikator Jumlah kualitas permukiman dan calon transmigran pada tahun 2018 ditargetkan 350 KK dan tercapai 65 KK. Sedangkan di tahun 2017 capaiannya 170 KK, dan tahun 2016 capaiannya sebesar 371 KK. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2018 sebesar 350 KK, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 18,57 persen.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya mutu dan Kompetensi SDM
Sistem pendidikan belum link and match (masih output oriented belum job oriented) . Selain itu minimnya pendidikan/keterampilan kewirausahaan bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja.



2. Masih enggan nya pengusaha untuk membayar upah pekerja sesuai aturan (terkait hak-hak pekerja), hal tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan petugas pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan.
3. Areal pencadangan permukiman transmigrasi masih banyak bermasalah atau belum clean dan clear dan ada juga beberapa usulan kawasan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) syaratnya belum lengkap, sehingga target akhir renstra tahun 2018 tidak tercapai.
4. Masih banyak lahan transmigrasi yang belum bersertifikat disebabkan faktor tumpang tindih lahan dengan HGU perkebunan sawit, sengketa tapal batas desa, lahan transmigran masuk dalam kawasan hutan produksi dan lahan transmigran diambil kembali oleh penduduk setempat.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK), untuk memperkuat UPT pelatihan kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi, dimana tahun 2018 baru terdapat 5 LPK yang sudah terakreditasi. Selain itu dilakukan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja secara online untuk mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja dipasar kerja. Website dapat diakses oleh pencari kerja serta dunia industri maupun institusi yang membutuhkan.
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kunjungan-kunjungan ke perusahaan dalam rangka pemeriksaan, pengujian dan pembinaan ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten/Kota, selain itu juga dapat bekerjasama dengan Kabupaten, Dirjen PKP2Trans dan Dirjen PKT dalam rangka penyelesaian areal pencadangan transmigrasi (clean dan clear) dan kelengkapan administrasi untuk pengusulan/permohonan penetapan kawasan transmigrasi sehingga pada saat penempatan tidak terjadi permasalahan lahan pekerangan dan lahan usaha.

Sasaran Strategis 14

Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	1) Nilai ekspor	2.220,32 juta US \$	1.006,96 Juta US\$	45,35%
		2) Neraca Perdagangan	450 US \$	543,89 Juta US\$	120,86%
		3) Angka Inflasi	4,5	3,99%	112,78%
Capaian Kinerja					93%

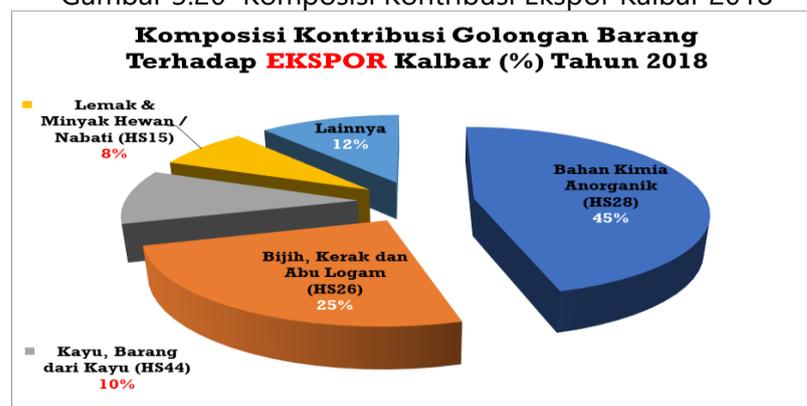
NILAI EKSPOR

Peningkatan kinerja ekspor pada Tahun 2018 secara langsung berdampak pada pencapaian seluruh target yang telah ditetapkan. Hal tersebut didukung oleh kontribusi instansi vertikal lainnya yang memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kinerja ekspor Kalbar. Selain itu, investasi yang masuk ke Kalbar turut memberikan hasil yang positif dalam struktur ekspor Kalbar pada Tahun 2018.

Pencapaian Indikator ini melalui kontribusi golongan barang Bahan Kimia Anorganik (HS28) serta Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26), dimana kedua golongan barang tersebut memberikan kontribusi sebanyak 45,45% dan 25,18% dari total ekspor Kalbar. Adanya Peraturan tentang diperbolehkannya kembali ekspor bahan baku juga memberikan dampak yang cukup signifikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ekspor Kalbar.

Berdasarkan hasil liaison KPw BI Provinsi Kalimantan Barat kepada berbagai perusahaan produsen karet olahan di Kalimantan Barat, diperoleh informasi bahwa penurunan produksi disebabkan oleh sulitnya memperoleh pasokan karet mentah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Usia sebagian tanaman karet di Kalimantan Barat sudah cukup tua sehingga mempengaruhi produktivitas karet. Hal ini mendorong sebagian petani mencampur hasil sadapan karet di luar spesifikasi untuk memperbesar volume produksi.

Gambar 3.20 Komposisi Kontribusi Ekspor Kalbar 2018



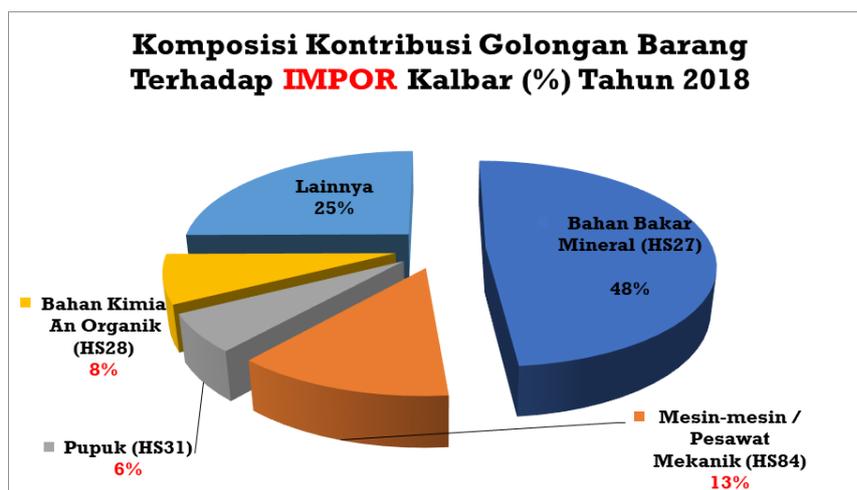
Sumber : BPS Kalbar, 2019. (Data Diolah)

NERACA PERDAGANGAN

Sektor perdagangan saat ini memberikan peranan yang penting dalam perekonomian daerah dengan menggeser peranan industri. Namun demikian secara umum perdagangan Kalbar dihadapkan berbagai masalah seperti Ekspor masih didominasi oleh produk-produk hulu seperti komoditi karet, bauksit dan hasil tambang lainnya serta kayu. Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura. Permasalahan penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas juga memberikan dampak negatif terhadap perdagangan dalam negeri seperti masuknya bahan pangan ilegal dari negara tetangga ke Kalbar dan industri dalam negeri (keluarnya bokar ke negara tetangga).

Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu kecenderungan menurunnya impor Kalbar tidak selamanya baik. **Persepsi yang berkembang saat ini adalah menurunnya impor akan menandakan baiknya perdagangan suatu daerah.** Hal ini hanya berlaku apabila mayoritas impor merupakan barang konsumsi. Sedangkan di Kalbar, penurunan impor dapat diartikan bahwa terdapat permasalahan pada dunia investasi. Hal tersebut disebabkan oleh struktur impor Kalbar selain pada bahan bakar mineral adalah Permesinan (HS 84) yang menandakan masuknya investasi di Kalbar yang akan meningkatkan nilai ekspor kedepannya. Pada Tahun 2018 realisasi neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 543,89 Juta US\$ dari yang ditargetkan sebesar 450 US \$ sehingga capaian kinerja sebesar 120,86 %. Komposisi kontribusi impor Tahun 2018 tergambar sebagai berikut :

Gambar 3.20 Komposisi Kontribusi Impor Kalbar 2018



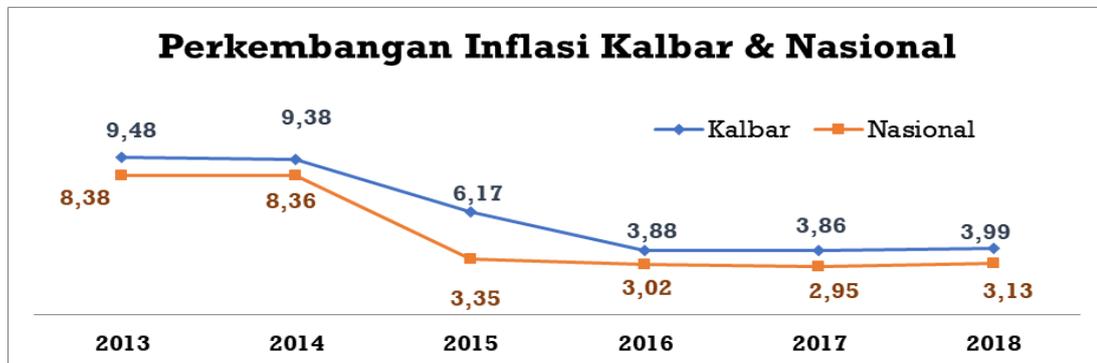
Sumber : BPS Kalbar, 2019. (Data Diolah)

INFLASI (c-to-c)

Secara umum, nilai inflasi Kalbar menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa inflasi Kalbar selalu berada diatas inflasi nasional. Hal ini menandakan Kalbar merupakan salah satu penyumbang yang besar tingkat Inflasi Nasional selama Tahun 2018.

Pencapaian angka inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,99% dan cukup jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,5%. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 112,78% dan membuktikan bahwa pengendalian inflasi pada tahun 2018 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak baik pusat dan daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Gambar 3.24 Perkembangan Inflasi Kalbar & Nasional 2013 s/d 2018



Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

Terkendalnya inflasi selama Tahun 2018 dipengaruhi juga tidak adanya kenaikan tarif listrik sepanjang 2018. Sementara itu, terjadinya beberapa kali kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi relatif kecil memberikan dampak terhadap inflasi, namun terbatas. Di sisi lain, tekanan harga pada kelompok bahan makanan di Kalimantan Barat cukup tinggi, terutama pada awal tahun dan pertengahan tahun seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terkait HBKN dan liburan sekolah. Namun tekanan terhadap inflasi pada kelompok bahan makanan tahun 2018 relatif masih dapat dikendalikan sehingga menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pencapaian inflasi Kalimantan Barat secara keseluruhan.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.52 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen	840.846.050	720.887.300	85,73	93%	n/a
		Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor	2.408.694.192	2.287.177.038	94,96		
Rata-Rata					90,35	93%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90,35% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 93%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat diukur karena capaian kerjanya belum mencapai 100%. Namun demikian pada sasaran strategis ini terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 241.475.904,-.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

INFLASI :

Keberhasilan dalam pencapaian berbagai indikator ini merupakan bentuk partisipasi yang tinggi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kab/Kota. Dengan stabilnya harga jual barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar dimasyarakat, menyebabkan inflasi kelompok bahan makanan pada Tahun 2018 dapat dikendalikan dengan baik serta jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Dapat ditekannya angka inflasi membawa dampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

NILAI EKSPOR, NERACA PERDAGANGAN :

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kontribusi pada golongan barang Bahan Kimia Anorganik (HS28) serta Biji, Kerak dan Abu Logam (HS26) dimana kedua golongan barang tersebut memberikan kontribusi sebanyak 45,45% dan 25,18% dari total ekspor Kalbar. Adanya Peraturan tentang diperbolehkannya kembali ekspor bahan baku juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan ekspor Kalbar.

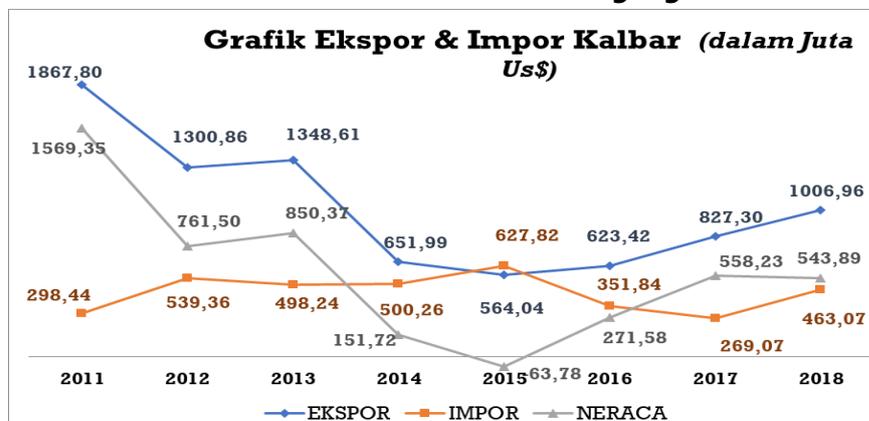
b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 - 2018 dan target jangka menengah

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 14

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	1) Nilai ekspor	623,42	827,3	1.006,96	2.220,32	37,26
		2) Neraca Perdagangan	271,58	558,23	543,89	450	124,05
		3) Angka Inflasi	3,88	3,86	3,99	4,5	85,78

Sebagai perbandingan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, ekspor tertinggi Kalbar terjadi pada tahun 2011 dengan nilai sebesar US\$ 1.867,8 Juta.

Gambar 3.25 Grafik Eksim & Neraca Perdagangan 2011-2018



Sumber : BPS Kalbar, 2019. (Data Diolah)



Berdasarkan grafik diatas, terlihat jelas terdapat penurunan nilai ekspor terutama pada tahun 2014 dimana penurunan kinerja ekspor daerah apabila dibandingkan tahun 2013 mencapai -US\$ 696,62 Juta (-51,65%). Hal tersebut merupakan dampak dari diberlakukannya pelarangan ekspor bahan tambang mentah berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Selain hal tersebut, penurunan signifikan terjadi pada golongan barang Karet dan Barang dari Karet (HS40) dimana pada tahun 2011 kontribusi golongan barang tersebut terhadap ekspor Kalbar mencapai US\$ 965,56 Juta. Kondisi tersebut sangat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi pada saat ini dimana hanya mencapai US\$ 51,19 Juta atau merosot hingga - US\$ 914,37 Juta (-94,7%).

Sejak Tahun 2015 hingga 2018 neraca perdagangan menunjukkan peningkatan kinerja ekspor secara bertahap. Masuknya investasi pengolahan sumber daya mineral pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan adanya peningkatan terhadap golongan barang Bahan Kimia Anorganik (HS28) dimana kondisi pada tahun 2015 berkontribusi sebesar US\$ 9,64 juta, meningkat sangat signifikan menjadi US\$ 430,19 Juta. Hal tersebut merupakan hal positif dan perlu ditingkatkan sehingga kedepannya ekspor Kalbar tidak mengandalkan pada ekspor bahan baku saja.

Pelarangan bahan tambang yang diberlakukan sejak Tahun 2014 memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekspor Kalbar. Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya hilirisasi di Kalbar sehingga mayoritas barang ekspor Kalbar saat ini masih merupakan bahan mentah dan belum berupa produk. Kecenderungan tersebut menyebabkan ditetapkannya PP No. 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat juga melakukan penjualan keluar negeri dalam jumlah tertentu. Permen ESDM No 5/2017 menjelaskan salah satunya tentang Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan keluar negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal berlakunya permen ESDM no. 5/2017 setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan Permendag No.1/2017 yang menjelaskan bahwa Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian, Verifikasi di pelabuhan muat dan/atau, Persetujuan ekspor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari kementerian ESDM, masa Berlaku ekspor produk pertambangan hasil pengolahan (lampiran II) diperpanjang s/d 11 Januari 2022. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut diatas, Ekspor Kalbar mulai kembali bergairah yang ditunjukkan trend positif Tahun 2017.

Pada Tahun 2018, ekspor Kalbar kembali meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada golongan barang Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) dengan peningkatan lebih dari 381% dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2017. Sedangkan nilai ekspor tertinggi masih diisi oleh Bahan Kimia Anorganik (HS28) dengan nilai US\$ 457,69 Juta. Penurunan terbesar terdapat pada golongan barang Karet dan Barang dari Karet (HS40) dimana terjadi penurunan sebesar 73% apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Berdasarkan hasil liaison KPw BI Provinsi Kalimantan Barat pada berbagai perusahaan produsen karet olahan di Kalimantan Barat, diperoleh informasi bahwa penurunan produksi disebabkan oleh sulitnya memperoleh pasokan karet mentah dengan spesifikasi yang sesuai



dengan kebutuhan industri. Usia sebagian tanaman karet di Kalimantan Barat sudah cukup tua sehingga mempengaruhi produktivitas karet. Hal ini mendorong sebagian petani mencampur hasil sadapan karet di luar spesifikasi untuk memperbesar volume produksi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INFLASI :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian strategis ini yaitu jauhnya jarak tempuh antar Kabupaten sehingga menyebabkan tidak seluruh Kabupaten dapat terjangkau terutama pada saat hari besar keagamaan. Namun kerjasama yang baik serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dapat mengendalikan inflasi kelompok bahan makanan di masing-masing daerah.

NILAI EKSPOR, NERACA PERDAGANGAN :

Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis ini yaitu tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Dibutuhkan dukungan seluruh instansi terkait dalam mengatasi permasalahan sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INFLASI :

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan inflasi diantaranya mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pendanaan kepada Pemerintah Pusat sehingga dapat menjangkau seluruh daerah. Selain itu diharapkan diterapkannya pelaporan harga setiap hari pada masing-masing daerah agar seluruh kendala yang ditemukan dapat segera diatasi.

NILAI EKSPOR, NERACA PERDAGANGAN :

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan nilai ekspor di neraca perdagangan diantaranya melaksanakan koordinasi dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Kalbar. Dengan adanya forum tersebut diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Selanjutnya juga diperlukannya perluasan pangsa pasar komoditi ekspor serta membangun marketing point di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat pemasaran produk-produk Kalbar dan Nasional di PLBN Aruk dan Entikong.



Sasaran Strategis 15

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	1) Persentase Koperasi Aktif	90%	60,17 %	66,85%
		2) Persentase Koperasi Berkualitas	23 %	21,72 %	94,43%
CAPAIAN KINERJA					80,64%

1. Target Prosentase Koperasi Aktif 2018 adalah 90 %, sementara realisasi tahun 2018 sebesar 60,17 % atau sebanyak 2.836 unit koperasi. Belum tercapainya target dikarenakan koperasi yang dibubarkan sebanyak 1.621 unit belum semuanya dapat dihapuskan dalam data keragaan koperasi. Dari jumlah koperasi 1.621 unit terdapat sebanyak 797 koperasi yang sudah diumumkan dalam lembaran berita Negara, sedangkan sebanyak 824 koperasi belum diumumkan dalam lembaran berita Negara karena sedang dalam proses penyelesaian oleh tim penyelesaian Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Target Prosentase Koperasi Berkualitas tahun 2018 sebesar 23 %, sementara realisasi tahun 2018 sebesar 21,72 % atau sebanyak 591 unit. Belum tercapainya realisasi ini karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman gerakan koperasi untuk melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT), karena yang menjadi salah satu tolak ukur utama koperasi berkualitas yaitu pelaksanaan RAT, selain peningkatan volume usaha dan pertambahan aset.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.55 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Koperasi	5.872.193.850	5.771.223.399	98,28		n/a
RATA-RATA					98,28%	80,64%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,28% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 80,64%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%. Namun demikian, pada sasaran strategis ini terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 100.970.451,-.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu **Program Peningkatan Kualitas Koperasi** yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, untuk kegiatan Dinas sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dan UPT sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, dimana program kegiatan yang sudah dirancang tersebut diharapkan mampu dan dapat mencapai target persentase koperasi aktif dan persentase koperasi berkualitas sehingga menjadikan volume usaha dan anggota koperasi semakin berkembang dan bertambah dan mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, bimtek, workshop perkoperasian kepada gerakan koperasi dan kader-kader koperasi dan masyarakat umumnya baik dilaksanakan di provinsi maupun kabupaten kota.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 - 2018 dan target 2018

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	1) Persentase Koperasi Aktif	68,88 %	68,54 %	60,17 %	90 %	66,85%
		2) Persentase Koperasi Berkualitas	13,44 %	17,46 %	21,72 %	23 %	94,43%

1. Realisasi Prosentase Koperasi Aktif 2016 adalah 68,88 %, sementara realisasi tahun 2017 sebesar 68,54 %, mengalami penurunan 0,34 %, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 60,17 %, dan menurun sebesar 8,37 %.
2. Realisasi Prosentase Koperasi Berkualitas tahun 2016 sebesar 13,44 %, sementara realisasi tahun 2017 sebesar 17,46 %, meningkat 4,02 %, sementara realisasi tahun 2018 sebesar 21,72 %, dan meningkat 4,26 %.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Analisis peningkatan :

Peningkatan kinerja koperasi, khususnya koperasi berkualitas dipengaruhi oleh pembinaan, pengawasan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus, terfokus dan sesuai kebutuhan.

Analisis penurunan :

Tidak tercapainya target/ penurunan persentase koperasi aktif dari sisi kuantitas tidak terlepas dari implementasi pelaksanaan program reformasi total koperasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Dampak dari pelaksanaan reformasi total koperasi adalah menurunnya jumlah koperasi secara kuantitas, akan tetapi pembinaan koperasi



akan semakin efisiensi, efektif, fokus kepada koperasi aktif dan koperasi baru serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital.

Hambatan yang dihadapi :

- Kurangnya sinergitas dan dukungan dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM kabupaten/kota.
- Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan pembinaan koperasi dan UMKM belum dapat maksimal.
- Masih rendahnya partisipasi koperasi yang melaksanakan RAT sebagai kewajiban yang diatur dalam undang-undang

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinergitas program kegiatan untuk pencapaian target pembangunan KUMKM melalui pelaksanaan program kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan memberikan masukan kepada kepala daerah kabupaten kota untuk lebih memberikan dukungan bagi kabupaten kota yang menangani UMKM.
- Penambahan tenaga pengawas koperasi dengan memberikan penyuluhan dan motivasi bagi ASN untuk tertarik menjadi fungsional pengawas koperasi sehingga permasalahan yang ada pada koperasi cepat diketahui dan ditindaklanjuti penyelesaian.
- Melakukan pemetaan dan pendataan Koperasi dan UMKM kabupaten/kota sebagai bahan perencanaan penganggaran agar pelaksanaan program kegiatan tepat sasaran dan terfokus.
- Menggiring atau mengarahkan pelaku UMKM terutama usaha mikro agar mau mendaftarkan usahanya sehingga mudah dalam melakukan pendataan.
- Memberikan pemahaman kepada para pelaku koperasi dan UMKM akan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada instansi yang melakukan pembinaan.



Sasaran Strategis 16

Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	83,08%	49,71%	58,77

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi. Capaian kinerja jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik+sedang) untuk Tahun 2018 sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh perubahan status jalan dari Provinsi ke Nasional, dan dari jalan Kabupaten ke Provinsi berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 505/DINAS-PU/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat.

Perubahan status jalan dari Provinsi ke Nasional, dan dari jalan Kabupaten ke Provinsi dapat dirinci sebagai berikut:

- Jalan Provinsi yang alih status menjadi jalan Nasional dalam keadaan Mantap adalah 270.93 Km (17,65% dari total jalan Provinsi). Jalan Provinsi yang alih status menjadi jalan Nasional dalam keadaan Rusak adalah sepanjang 67.05 Km (4.37% dari total jalan Provinsi).

No	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	KONDISI MANTAP (Km)	KONDISI RUSAK RINGAN - RUSAK BERAT (Km)
1	Bengkayang - Sanggau Ledo	58.58	4.50	51.58	7.00
2	Sanggau Ledo - Seluas	31.00	4.50	27.00	4.00
3	Seluas - Batas Serawak	16.08	4.50	14.08	2.00
4	Ketapang - Siduk	61.00	4.50	59.75	1.25
5	Siduk - Sungai Kelik	61.00	4.50	35.26	25.74
6	Sungai Kelik - Nanga Tayap	24.00	6.00	4.80	19.20
7	Anjungan - Karang	37.88	4.50	34.88	3.00
8	Karang - Simpang Tiga	32.04	4.50	27.54	4.50
9	Simpang Tiga - Bengkayang	16.40	4.50	16.04	0.36
	Total Panjang	337.98		270.93	67.05

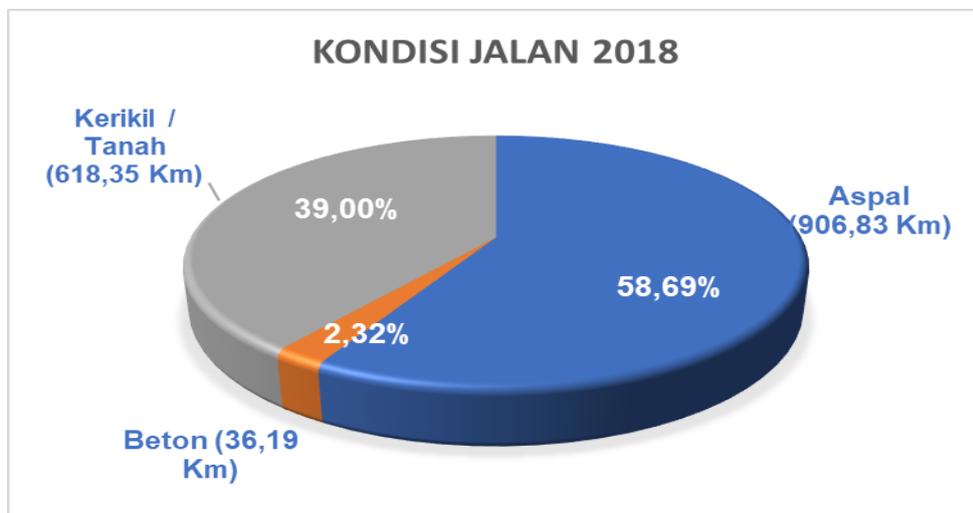


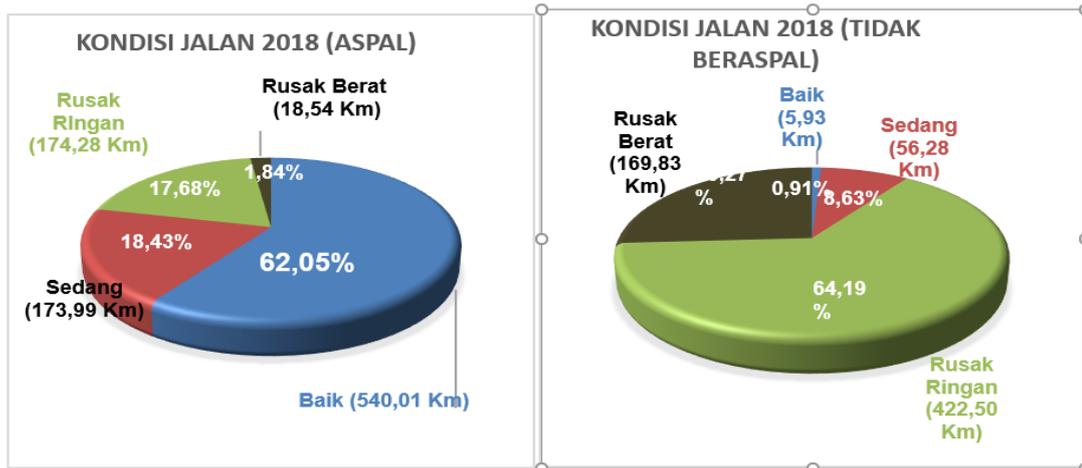
- Jalan Kabupaten yang alih status menjadi jalan provinsi dalam keadaan Mantap hanya sepanjang 39.05 Km (2.54% dari total jalan Provinsi). Jalan Kabupaten yang alih status menjadi jalan provinsi dalam keadaan Rusak adalah sepanjang 276.89 Km (18.04% dari total jalan Provinsi).

No	Nomor Ruas	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	KONDISI MANTAP (Km)	KONDISI RUSAK RINGAN - RUSAK BERAT (Km)
1	009	Bengkayang - Jangkak (Batas Kabupaten Landak)	40.00	4.50	10.00	30.00
2	010	Jangkak (Batas Kabupaten Landak) - Serimbu	42.10	4.50	2.00	40.10
3	015 1	Simpang Pak Mayam - Nahaya	32.89	8.00	9.25	23.64
4	015 2	Nahaya - Simpang Amboyo Selatan	20.95	4.50	3.00	17.95
5	025	Sintang - Semubuk	58.70	4.20	1.80	56.90
6	040	Semitau - Suhaid	10.30	4,50	4.00	6.30
7	051	Simpang Sei Gantang - Teluk Batu	75.00	4.1 - 5,2	6.00	69.00
8	052	Teluk Batu - Simpang Jemayas	36.00	4.30	3.00	33.00
Total Panjang			315.94		39.05	276.89

- Panjang jalan Provinsi yang masih tanah sepanjang 460.72 Km dari total panjang Jalan Provinsi sepanjang 1534.75 Km.

No	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (km)	Keterangan
1	Kembayan - Balai Sebut	52.85	19 km tanah/kerikil, 28 km rusak
2	Balai Sebut - Balai Sepuak	55.00	54 km tanah/kerikil, 21 km rusak
3	Balai Sepuak - Semubuk	45.00	45 km tanah/kerikil, semua ruas rusak
4	Sintang - Semubuk	58.70	19 km tanah/kerikil, 28 km rusak
5	Kota Baru - Nanga Sokan	17.00	13 km tanah/kerikil
6	Nanga Mau - Tebidah	30.90	18 km tanah/kerikil, 21 km rusak
7	Tebidah - Bunyau	37.00	37 km tanah/kerikil, 29 km rusak
8	Bunyau - Serawai	30.17	30 km tanah/kerikil, 24 km rusak
9	Semitau - Suhaid	10.30	2 km tanah/kerikil, 2 km rusak
10	Tumbang Titi - Tanjung	32.00	28 km tanah/kerikil, 28 km rusak
11	Tanjung - Marau	21.80	16 km tanah/kerikil, 11 km rusak
12	Marau - Air Upas	21.00	21 km tanah/kerikil, 21 km rusak
13	Air Upas - Manis Mata	49.00	49 km tanah/kerikil, 3,5 km rusak
TOTAL PANJANG		460.72	





Pada tahun 2018 sasaran strategis ini dengan indikator Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap (baik dan sedang) dapat direalisasikan sebesar 49,71%, sementara target yang ditetapkan sebesar 83,08% dengan capaian kinerja 58,77%. Hampir setiap tahun anggaran peningkatan jalan belum bisa memenuhi kebutuhan teknis penanganan jalan sehingga hanya beberapa ruas jalan yang dapat ditingkatkan atau dipelihara. Pada tahun anggaran 2018 dari sebanyak 73 Ruas jalan, hanya 13 ruas jalan yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan, kegiatan ini belum bisa meningkatkan persentase jalan mantap karena hanya di prioritaskan untuk kelancaran arus lalu lintas.

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.58 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Penyelenggaraan Jalan	251.412.438.940	241.830.913.290	95,66	58,77%	n/a

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 241.830.913.290 atau mencapai 95,66% dengan capaian kinerja sebesar 58,77%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum dapat diukur karena belum mencapai 100%. Namun demikian, pada sasaran strategis ini terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 9.581.525.650.

Pada tahun anggaran 2018 penggunaan dana dapat terealisasi sebesar 95,66%, namun kondisi jalan belum bisa ditingkatkan kondisinya dikarenakan penggunaan dana hanya diprioritas pada penanganan jalan pada ruas jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap atau kritis, agar ruas jalan tersebut tetap dapat berfungsi melayani lalu lintas dan kondisi jalan setiap saat tidak mengalami penurunan.



• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor bina marga dengan didukung UPJJ yang tersebar di lima wilayah Kalimantan Barat terjadi peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 50,02 % dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 - 2018 dan target 2018

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	80,38	83,54	49,71	84,58%	58,77

Pada tahun Anggaran 2017 jumlah ruas yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan hanya 15 paket atau 15 ruas jalan, dengan pormasi sama seperti tahun anggaran 2016. Pada tahun Anggaran 2018 jumlah ruas yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan hanya 13 paket atau 13 ruas jalan. Berdasarkan hasil survey kondisi jalan bahwa tingkat kerusakan Ruas jalan yang telah mendapatkan peningkatan atau pemeliharaan makin bertambah berat, dan ruas yang di kerjakan pada Tahun 2016-2018 masih pola peningkatan pada ruas jalan beraspal sehingga tidak menaikkan kinerja jalan mantap.

Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2017 sepanjang 1.534,76 km, dengan kondisi mantap 69,38% (1.064,76 km) dan kondisi tidak mantap 30,62% (470,00 km). Sedangkan Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2016 sepanjang 1.562,30 km, dengan kondisi mantap 80,38% (1.255 km) dan kondisi tidak mantap 19,62 % (307,30 km). Bila melihat data kondisi jalan tersebut maka tahun 2017 kondisi jalan mantap justru mengalami penurunan sebesar 11,00%, dari target tahun 2017 sebesar 83,08% dan realisasi 69,38%. Hal disebabkan karena adanya pengalihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi tersebut diperlukan peningkatan anggaran serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang melebihi tonase kapasitas jalan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Survey kondisi jalan selama ini dilakukan secara visual, belum menggambarkan kondisi yang akurat, sesuai dengan SPM bidang jalan. Diharapkan melakukan survey International Roughness Index (IRI) menggunakan alat yang dapat menilai kondisi jalan dengan akurasi tinggi.



- Analisis berkurangnya anggaran bagi peningkatan dan pemeliharaan jalan sehingga tidak semua ruas jalan yang rusak bisa dilakukan pemeliharaan.
- Sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 keatas, mengakibatkan beberapa upaya secara terus menerus (kontinu) agar kondisi ruas jalan, dalam kondisi mantap sehingga jalan tetap memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jalan.
- Sebagian besar ruas-ruas jalan provinsi sudah melampaui umur rencana dan penanganan terbatas pada pemeliharaan. Sementara keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk mencapainya kebutuhan jalan provinsi.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Membuat skala prioritas penanganan pada ruas jalan yang rusak dengan peningkatan atau pemeliharaan
- Menyediakan anggaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana tersedia bagi penanganan jalan.
- Sejak tahun 2015 secara bertahap telah ditangani dengan program peningkatan dan pemeliharaan berkala, namun sebagian besar masih ditangani dengan program pemeliharaan rutin.



Sasaran Strategis 17

Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1) Rumah tangga pengguna air bersih	54,69 %	55,20 %	101
		2) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,52 %	48,38 %	102
		3) Persentase Perumahan Sehat	47,73 %	44,31 %	88,87
		4) Persentase Rumah yang layak huni	87,11 %	83,28 %	95,60
		5) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	86,4 %	87,22 %	101
Capaian Kinerja					97,69%

Pada tahun 2018 indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih ditargetkan sebesar 54,69%, kemudian dapat direalisasikan sebesar 55,20%. Angka tersebut telah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yaitu sebesar 54,69%. Untuk indikator Rumah Tangga Bersanitasi ditargetkan sebesar 47,52 %, kemudian dapat realisasikan sebesar 48,38%, dengan capaian sebesar 102%. Sementara capaian indikator prosentase perumahan sehat tahun 2018 sebesar 44,31 % dan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yaitu sebesar 47,73 %.

Capaian indikator rumah layak huni tahun 2018 sebesar 83,28%, belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 87,11%. Untuk mengukur tingkat ketersediaan energi listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik dengan menggunakan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Kalimantan Barat pada tahun 2018 mencapai 87, 22% melampaui target yang ditetapkan yaitu 86,4 % dengan capaian kinerja sebesar 101%. Indikator ini tercapai karena adanya pembangunan Energi Baru Terbarukan untuk daerah terisolir, program Indonesia Terang oleh Pemerintah Pusat melalui Lampu Tenaga Surya Hemat Energi, Subsidi listrik tepat sasaran, dan pembangunan/perluasan jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero).



• **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.61 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Rp 8.903.233.600,00	Rp 6.797.894.400,00	76,35	97,69%	n/a
		2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Rp 27.610.766.500,00	Rp 24.748.129.200,00	89,63		
		3. Peningkatan dan Pengembangan Perumahan	Rp. 494.698.506,00	Rp. 443.240.664,00	89,6		
		4. Peningkatan dan Penataan PSU Kawasan Perumahan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 86.947.000,00	86,9		
		5. Pengendalian Ketenagalistrikan	Rp. 72.002.500,00	Rp. 59.366.860,00	82,45		
		6. Pengembangan dan pengelolaan energi	Rp. 16.911.816.781,50	Rp. 15.900.047.563,00	94,02		
Rata-Rata					86,49	97,69%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 84,98% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,69%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar n/a. Namun demikian pada sasaran strategis ini terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 4.967.976.500,-.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang indikator rumah tangga pengguna air bersih antara lain yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum / air bersih Panjang di Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sintang.

Selain itu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rumah tangga bersanitasi antara lain yaitu di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak. Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) terbangun di Kabupaten Melawi 2 unit.

Pada sasaran ini, Program/kegiatan yang sangat menunjang yaitu Program Rumah tangga yang Pengguna Air Bersih, Rumah Tangga yang bersanitasi, Program Peningkatan dan Pengembangan perumahan serta Program Pengendalian Ketenagalistrikan. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mencapai sasaran program pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.



Pencapaian Indikator Kinerja rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021) didukung oleh Program Pengendalian Ketenagalistrikan melalui kegiatan Pengawasan Ketechnikan, Lingkungan dan Standarisasi Ketenagalistrikan sehingga berdampak terhadap rasio elektrifikasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta didukung oleh Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi melalui kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai upaya untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target Akhir Jangka Menengah

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018 dan target 2018 Sasaran Strategis 17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2018	Tingkat Kemajuan
			2016	2017	2018		
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih	1) Rumah tangga pengguna air bersih	54,61	54,67	55,20	54,69	101
		2) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,29	47,36	48,38	47,52	102
		3) Persentase Perumahan Sehat	17,03	44,31	44,31	47,73	92,83
		4) Persentase Rumah yang layak huni	90,56	89,59	83,82	87,11	102,84
		5) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	78,20%	82,21%	87,22%	86,4%	101

Pada tahun 2018 indikator rumah tangga pengguna air bersih mencapai 55,20 %, dibandingkan pada tahun 2017 dengan capaian 54,67 %, maka tingkat kemajuannya adalah 101 %. Sedangkan pada tahun tahun 2016 dimana realisasinya adalah 54,67 % dengan selisih kenaikan hanya sebesar 0,06%.

Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2016 mencapai 47,29 %, pada tahun 2017 meningkat menjadi 47,36% mengalami kenaikan sebesar 0,07%, dibanding dengan pencapaian tahun 2018 yaitu sebesar 48,38% mengalami kenaikan 1,02 %.

Realisasi Persentase Perumahan Sehat Tahun 2018 sama dengan realisasi tahun 2017 dikarenakan tidak ada kegiatan fisik, hanya memfasilitasi dan pembinaan kepada pemda, asosisasi dan pengembang rumah subsidi.

Rasio Elektrifikasi Kalimantan Barat pada tahun 2016 masih cukup rendah, dimana masih terdapat beberapa kabupaten seperti Landak dan Sekadau yang capaian rasio elektrifikasinya masih jauh dibawah rata-rata rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat yaitu 49,8 % dan 49,48 % dan untuk tahun 2017 mencapai 52,31% dan 53,25 %. Peningkatan Rasio Elektrifikasi ini terjadi karena terdapatnya pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan di daerah yang terisolir dan tertinggal serta jauh dari jaringan listrik PLN, program sambungan listrik murah dan gratis. Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membangun 10 (sepuluh) unit pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang bersumber dari APBD dan DAK energi skala kecil.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Dalam mendukung indikator kinerja utama dibidang cipta karya, sebagian kewenangan berada pada pemerintah kabupaten kota. Dalam melaksanakan perannya, pemerintah provinsi melakukan *sharing* kegiatan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki, sehingga diperlukan dukungan anggaran dari pusat.
- Peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan strategi keterpaduan program kegiatan air bersih dan sanitasi secara berkelanjutan.
- Belum tersedianya data yang akurat mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di 14 Kab/Kota sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan maupun dalam pengambilan kebijakan.
- Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik masih telah mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi terdapat beberapa kendala yaitu luasnya cakupan wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata. Penduduk yang belum menikmati listrik kebanyakan di daerah terpencil. Kabupaten yang daerahnya belum teraliri oleh listrik yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak.
- Kurangnya SDM dan anggaran untuk melakukan survey potensi energy di daerah terpencil dan melakukan inventarisasi rumah tangga belum berlistrik.
- Secara Nasional capaian persentase rumah tangga berlistrik ini belum maksimal, disebabkan masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau infrastruktur listrik karena kondisi letak dan geografisnya yang sulit dijangkau (*remote area*), sehingga membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama dalam melistriki wilayah tersebut serta pola sebaran penduduk disuatu wilayah yang berpencar/berkelompok kecil.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya kesinambungan/keterpaduan terhadap program kegiatan dalam mencapai target output, outcome dan impact terhadap sasaran program rumah tangga air bersih dan rumah tangga sanitasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Perlu adanya kerjasama dan koordinasi intensif antara pemprov dan pemda kab/kota dalam menyusun rancangan strategis dengan melakukan sinkronisasi program dan *sharing* kegiatan, serta perlu adanya keterpaduan infrastruktur permukiman bidang cipta karya.
- Perlunya dilaksanakan pendataan yang maksimal dan komprehensif mengenai data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 14 Kab/Kota se Kalbar.
- Perlu adanya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) baik RP3KP Prov maupun Kab/Kota se Kalbar.
- Perlu adanya peran serta lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD dan swasta dalam usaha penyediaan energi listrik untuk wilayah tertinggal dan terisolir, baik itu dengan metode offgrid melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan dengan pembiayaan



APBD/APBN, investasi swasta, pengembangan kerjasama CSR swasta yang memiliki pembangkit listrik sendiri dengan PT. PLN (Persero) dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk wilayah disekitarnya yang belum dilistriki.

- Melakukan survei potensi energi di daerah terpencil untuk penyediaan energi listrik dan menginventarisasi rumah tangga belum berlistrik bagi seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Barat.
- Pengawasan terhadap pemanfaatan energi listrik di Kalimantan Barat dalam rangka konservasi energi listrik untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan energi listrik.

KINERJA LAINNYA

Sebagai apresiasi atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerima beberapa penghargaan dari Pemerintah maupun dari Organisasi/LSM tingkat Nasional, yaitu :

1. Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat sebagai TPID terbaik Tingkat Provinsi se-Kalimantan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018.
2. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas dukungannya dalam Deklarasi dan Pengelolaan Berkelanjutan Cagar Biosfer pada Tahun 2018 pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara.
3. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan Presiden RI melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kategori Madya pada Tahun 2018. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai apresiasi bagi kementerian/lembaga, Pemprov dan kabupaten/kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara *online* mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA).
4. Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat telah 5 (lima) kali berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan Predikat "B".



B. REALISASI ANGGARAN

Nilai efisiensi anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat:

TAHUN	NILAI EFISIENSI (Pagu Belanja Langsung - Realisasi Belanja Langsung)	TOTAL APBD NON GAJI (Pagu Belanja Langsung)	PERSENTASE (Nilai Efisiensi/ Pagu Belanja Langsung x 100%)	JUMLAH PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIFOKUSKAN	TOTAL PROGRAM KEGIATAN
	(Rp)	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6
2017	479.341.253.745	2.635.407.775.713	18,19	- Program : 206 - Kegiatan : 1856	- Program : 279 - Kegiatan : 4865
2018	240.008.039.435	2.214.254.825.989	10,84	- Program : 188 - Kegiatan : 2076	- Program : 307 - Kegiatan : 5549

Data per 8 Maret 2019

Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan anggaran belanja langsung sesuai sasaran strategis dalam APBD Tahun 2018 sebesar **Rp 2.453.486.996.405,00** dan terjadi perubahan anggaran menjadi **Rp 2.214.254.825.989,00** dengan realisasi sebesar **Rp 1.974.246.786.554,33**. Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Pemprov kalbar pada umumnya meningkat, dan jika dilihat dari realisasi anggaran strategis, maka terdapat **efisiensi anggaran sebesar Rp. 240.008.039.435,00**.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai target yang sangat baik yaitu Opini BPK berupa **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Sedangkan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, saat ini masih dalam proses pemeriksaan BPK dan baru dapat diumumkan sekitar bulan Juni atau Juli 2019 dengan target yang sama yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2013-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja menggambarkan bahwa manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program. Selain itu Laporan Kinerja juga menjadi ukuran penilaian kualitas kinerja pelayanan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2018 sebagian besar dapat terpenuhi dan terealisasi. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan melalui Dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:



SASARAN

TERDIRI DARI 2
INDIKATOR

Dengan capaian n/a

TERDIRI DARI 3
INDIKATOR

Dengan capaian 125,85%

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 98,50%

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 135,31%

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 89,94%

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 67,59%

TERDIRI DARI 3
INDIKATOR

Dengan capaian 93%

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 58,77%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 151,68%

TERDIRI DARI 5
INDIKATOR

Dengan capaian 116,97%

TERDIRI DARI 7
INDIKATOR

Dengan capaian 99,57%

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 362,21%

TERDIRI DARI 1
INDIKATOR

Dengan capaian 281%

TERDIRI DARI 12
INDIKATOR

Dengan capaian 114,8%

TERDIRI DARI 2
INDIKATOR

Dengan capaian 53,27%

TERDIRI DARI 2
INDIKATOR

Dengan capaian 80,64%

TERDIRI DARI 5
INDIKATOR

Dengan capaian 103,64%



Beberapa capaian keberhasilan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2018 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tercapainya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada Tahun 2018 sebanyak 1.532 orang dan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.010 orang.
2. Meningkatnya kinerja Derajat Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2018 sehingga mencapai 116,97%
3. Sasaran strategis Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien dengan capaian kinerjanya mencapai 125,85% yang terdiri dari Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 162%, Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 127,94% dan Angka Putus Sekolah SMA/MA sebesar 87,62%.
4. Sasaran strategis menurunnya laju kerusakan lingkungan mencapai 362,21% dengan indikator Penurunan jumlah Hotspot kebakaran hutan dan lahan yang ditargetkan sebesar 5.665 dan mencapai 1.562.
5. Sasaran strategis meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular capaian kinerjanya sebesar 135,31% dengan indikator jumlah populasi ternak.
6. Sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan dengan capaian kinerjanya mencapai 281%.
7. Sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu mencapai 114,8%.
8. Sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya sebesar 103.64%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik. Namun di sisi lain masih terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja, masih belum tercapai secara optimal. Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:



1. Hasil evaluasi capaian kinerja ini akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj.
2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja perangkat daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan, khususnya dalam peningkatan Pembangunan Manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar siap pakai.
3. Konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan dalam rangka membuka daerah-daerah terisolir, perbatasan dan daerah tertinggal serta mendukung peningkatan produktivitas di berbagai sektor pembangunan termasuk upaya peningkatan ekspor-impor dan investasi di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Melanjutkan dan meningkatkan program-program dan kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi sektor riil terhadap sektor-sektor strategis yaitu; pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, dan pengembangan sektor perkoperasian/Credit Union dan pelaku usaha kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.
5. Secara terus-menerus melakukan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan, dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, manajemen pemerintahan, sistem AKIP dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terlayani dan diberdayakannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	1.010 orang	1.532 orang	151,68
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68	n/a	n/a
		3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61	n/a	n/a
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4) Angka usia harapan hidup	69,3	n/a	n/a
		5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	220	95	156,8
		6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	21	7	166,67
		7) Prevalensi balita gizi buruk	<5%	3.83	123,4
		8) Prevalensi HIV pada Usia 15-24 tahun	<0,5%	0.31	138
4.	Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien	9) Angka Putus Sekolah			
		a. SD/MI	0,50	0,19	162
		b. SMP/MTs	0,68	0,49	127,94
		c. SMA/MA	0,92	0,62	148,38
5.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS), APK(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan	10) Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		a. SD/MI/Paket A	113%	112,12	100,78
		b. SMP/MTs/Paket B	98%	91,89	93,77
		c. SMA/SMK/MA/Paket C	74,95%	71,10	95,32
		11) Angka rata-rata lama sekolah	7,48 tahun	7,63 tahun	102
		12) AngkaPartisipasiMurni (APM)			
		a. SD/MI/Paket A	99,65%	99,68	100,03
		b. SMP/MTs/Paket B	72,40%	75,52	104,31
c. SMA/SMK/MA/Paket C	57,50%	57,96	100,8		
6.	Berkurangnya kawasan Hutan yang Rusak Seluas 10.000 Ha/tahun	13) Luas penurunan kerusakan Hutan	1.000 Ha	985,05 Ha	98,50
7.	Menurunnya laju kerusakan lingkungan	14) Penurunan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Spot)	5.665	1.564	362,21
8.	Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan, dan terkendalinya penyakit hewan menular	15) Jumlah Populasi Ternak	49.201.951 ekor	66.574.718 ekor	135,31

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	16) Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	726.696,00 ton	2.043.680,00	171,94
10.	Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat	17) Jumlah Produksi Perikanan	276.477,96	248.698,22	89,95
11.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	18) Angka Produksi Pertanian			
		• Tanaman Pangan	2.010.540 ton	1.954.572 ton	97,22
		a) Padi	1.696.000 ton	1.625.356 ton	95,83
		b) Jagung	120.700 ton	166.825 ton	138,21
		c) Kedelai	2.360 ton	1.260 ton	53,39
		d) Kacang Tanah	1.080 ton	852 ton	78,89
		e) Kacang Hijau	1.300 ton	1.260 ton	96,92
		f) Ubi Kayu	177.400 ton	147.475 ton	83,13
		g) Ubi Jalar	11.700 ton	11.544 ton	98,67
		• Tanaman Hortikultura	297.450 ton	463.783 ton	155,92
		a) Buah-Buahan	230.100 ton	338.326 ton	147,03
		b) Sayur-Sayuran	56.800 ton	112.659 ton	198,34
		c) Biofarmaka	10.550 ton	12.798 ton	121,31
		d) Tanaman Hias	475.900 kg/tangkai/pohon	540.834 ton kg/tangkai/pohon	113,64
	19) Nilai Tukar Petani	102,95	93,91	91,22	
12.	Peraturan yang mendukung iklim investasi	20) Peningkatan Nilai Investasi	19,50 T	13,18 T	67,59
13.	Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	21) Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,08	0,95	87,96
		22) Jumlah Kualitas Permukiman dan Calon Transmigrasi	350 KK	65 KK	18,56
14.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	23) Nilai ekspor	2.220,32 juta US \$	1.006,96 Juta US\$	45,35
		24) Neraca Perdagangan	450 US \$	543,89 Juta US\$	120,86
		25) Angka Inflasi	4,5	3,99%	112,78
15.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing	26) Persentase Koperasi Aktif	90%	60,17 %	66,85
		27) Persentase Koperasi Berkualitas	23 %	21,72 %	94,43
16.	Tersedianya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	28) Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik + sedang)	84,58%	49,71%	58,77
17.	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang	29) Rumah tangga pengguna air bersih	54,69 %	55,20 %	101
		30) Persentase Rumah tangga yang bersanitasi	47,52 %	48,38 %	102

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	mencakup sektor sanitasi dan air bersih	31) Persentase Perumahan Sehat	47,73 %	44,31 %	88,87
		32) Persentase Rumah yang layak huni	87,11 %	83,28 %	95,60
		33) Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (RUPTL PLN 2012-2021)	86,4 %	87,22 %	101

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2018 : Rp. 2.214.254.825.989,00

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2018 : Rp 1.974.246.786.554,33



 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



 H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum



LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018